

◆ Muh. Baihaqi ◆ Muhamad Yusup, ◆ Muh. Salahuddin  
◆ Zainal Arifin ◆ Dewi Sartika Nasution  
◆ Naili Rahmawati ◆ Dahlia Bonang

# EKONOMI & PARIWISATA SYARIAH

---

*Catatan Pinggir Akademisi UIN Mataram*



EKONOMI & PARIWISATA SYARIAH  
Catatan Pinggir Akademisi UIN Mataram  
Copyright ©2019

Judul : EKONOMI & PARIWISATA SYARIAH  
Catatan Pinggir Akademisi UIN Mataram  
Penulis : Muh. Baihaqi  
Muhamad Yusup  
Muh. Salahuddin  
Zainal Arifin  
Dewi Sartika Nasution  
Naili Rahmawati  
Dahlia Bonang  
Editor : Dr. Muhammad Saleh, M.A  
Tata Letak : Intan Kusuma Pratiwi, M.SEI  
Desain Cover : Intan Kusuma Pratiwi, M.SEI

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau  
keseluruhan isi buku dengan media cetak atau elektronik tanpa izin  
tertulis dari penerbit

Cetakan 1 : Desember 2019  
ISBN : 978-623-7881-07-0

Penerbit:  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Mataram  
Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Sekarbela Mataram  
Telp. 0370-621298, Fax. 0370-625337  
Website: [www.uinmataram.co.id](http://www.uinmataram.co.id)

Sanabil  
Jln. Kerajinan 1  
Puri Bunga Amanah Blok C/13  
Telp. 0370-7505946  
Email : [sanabilpublishing@gmail.com](mailto:sanabilpublishing@gmail.com)  
[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)



## PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

---

H. Ahmad Amir Aziz  
Dekan FEBI UIN Mataram

Berbasis dialektika Hegel, maka tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan harus didasarkan pada hipotesis yang didasarkan pada asumsi dan keraguan atas realitas. Berdasarkan hipotesis itulah dilakukan penelitian (*research*) untuk membuktikan kebenaran, atau membantahnya. Atau bahkan menemukan sesuatu yang baru, dan belum ditemukan oleh peneliti/akademisi sebelumnya. Temuan dalam penelitian inilah yang kemudian dikenal sebagai tesis. Tesis adalah pengembangan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Untuk melestarikan perkembangan ilmu pengetahuan, dalam dialektika Hegel disiapkan *anti-thesis*, yaitu perangkat untuk mempertahankan *quo-vadis* kebenaran. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif, dan akan berubah sesuai dengan dukungan data, fakta, realita yang menyokong kebenaran dimaksud. Itulah hakekat ilmu pengetahuan, akan berkembang atas dasar *skeptifitas* seseorang terhadap sesuatu.

Penelitian merupakan pintu masuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian harus didasarkan pada pengamatan yang mendalam atas sebuah realitas, dengan berbagai ragam perspektif ilmu pengetahuan, untuk menilai realitas secara utuh, holistik, dan komprehensif. Keutuhan dalam melihat fenomena dengan beragam perspektif ini adalah aktivitas membangun kerangka berpikir konseptual untuk mendiskripsikan realitas. Dengan demikian, penguasaan atas pengetahuan, teori, dan konsep

adalah sesuatu yang mutlak dalam sebuah penelitian. Selain sebagai pemetaan pengembangan keilmuan, uraian teoritik untuk membangun logika berfikir seseorang dalam sebuah penelitian.

Penelusuran keilmuan (konseptual-teoritik), selain didapat dari buku babon, juga perlu melacak tulisan kekinian yang dimuat dalam jurnal, baik skala nasional maupun internasional. Dalam jurnal ilmiah inilah pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan temuan ilmiah lainnya dikodifikasi, didiskusikan, dan dianalisis oleh berbagai pakar dalam bidang keilmuan serumpun. Dengan demikian, akan ditemukan formula dan pola pengembangan keilmuan yang tidak hanya untuk ilmu pengetahuan, namun untuk kemanusiaan.

Dalam tradisi keilmuan keislaman Indonesia (PTKIN) upaya di atas terangkum dalam *integrasi keilmuan*. Dalam tradisi akademik UIN Mataram dinamakan *horizon keilmuan*. Ilmu pengetahuan, tidak hanya untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, namun terintegrasi dengan realitas yang hidup di dalam dan sekitar masyarakat. Itulah tradisi keilmuan yang dibangun dan dikembangkan oleh tim akademisi UIN Mataram, termasuk di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Di hadapan kita ini adalah karya ilmiah dosen yang didasarkan pada proses penelitian ilmiah. Temanya *pun* beragam, sesuai dengan konsentrasi, kapasitas, dan fokus keilmuan masing-masing dosen. Pendekatan yang digunakan, teori yang dikembangkan, dan kesimpulan yang dihasilkan adalah upaya integrasi keilmuan dengan kehidupan; baik dalam ekonomi, keuangan, dan pariwisata. Kehadiran hasil penelitian dosen FEBI UIN Mataram ini, mencoba untuk mengisi ruang kosong yang masih mungkin dikembangkan dalam pergolakan dan pengembangan keilmuan.

Mataram, November 2019

H. Ahmad Amir Aziz

## DAFTAR ISI

### **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**

H. Ahmad Amir Aziz  
Dekan FEBI UIN Mataram • iii

### **KINERJA BANK PEMBANGUNANDAERAH SYARIAH DI INDONESIA**

Muhamad Yusup • 1

### **DIALEKTIKA SOSIAL MASYARAKAT LOMBOK SELATAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Muh. Salahuddin & Zainal Arifin • 23

### **FINTECH & MUSLIM KOTA MATARAM**

Dewi Sartika Nasution • 49

### **STANDAR HALAL HOTEL SYARI'AH**

Muh. Baihaqi • 79

### ***LINK AND MATCH* FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN MATARAM DENGAN SEKTOR IKNB SYARIAH MATARAM**

Naili Rahmawati, Dahlia Bonang • 99





## KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SYARIAH DI INDONESIA

---

Muhamad Yusup

**Abstrak:** Penelitian ini untuk mengukur kinerja perbankan Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah index*. Penelitian ini mendiskripsikan rasio kinerja pada Bank Pembangunan Daerah Syariah dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk melihat pendidikan individu, penegakan keadilan, dan memelihara kemaslahatan. Bank Pembangunan Syariah yang ada di Indonesia, berdasarkan hasil sampling diperoleh hasil bahwa Bank Pembangunan Daerah Syariah yang memiliki *maqashid syariah indeks* tertinggi adalah Bank NTB Syariah.

**Kata Kunci:** *Maqashid Syariah*, Bank Syariah, Kinerja

### A. Pendahuluan

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi adalah sektor perbankan. Bank merupakan lembaga jasa keuangan yang melakukan aktifitas langsung menghimpun dan meyalurkan dana masyarakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Melalui sektor perbankan kegiatan perekonomian dapat terkelola dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang benar. Sebagai hasilnya tujuan dari perbankan sendiri dapat diukur, didefinisikan,

dioperasionalkan, dan berkontribusi pada tujuan khusus dan umum.<sup>1</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian diperbaharui menjadi undang-undang No. 10 Tahun 1998, bahwa keberadaan bank syariah telah diakui secara formal. Selain Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga mulai mengubah kiblatnya dari konvensional menuju syariah. Diantara BPD yang telah *spin off* ke syariah adalah Bank Aceh, Bank NTB syariah, Bank BJB dan Bank Nagari Sumatra Barat. Namun perubahan menuju layanan keuangan syariah tidak serta merta dapat dilakukan dengan mudah. Perlu adanya sinergi antar berbagai industri keuangan lainnya, yang hal ini diperlukan agar perkembangan layanan keuangan syariah tidak hanya sekedar kuantitas tetapi juga memiliki arah pada kualitas.

Berbicara tentang kualitas maka sudah barang tentu terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tersebut, seperti juga halnya pada Bank Pembangunan Daerah Syariah yang sudah seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang juga berbasis syariah dan berdasarkan pada paradigma ekonomis syariah, terutama harus bebas *riba* (bunga), bebas dari *maysir* (permainan kesempatan atau spekulasi), dan bebas dari *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam semua operasionalnya. Regulasi terkait perbankan syariah belum sepenuhnya memperhitungkan keunikan bank syariah, termasuk regulasi dalam sistem kinerja.<sup>2</sup>

---

1 Jazil dan Syahrudin, *The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank Based on the Maqashid al-Shari'ah Approach*, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 7 No.2 ( 2013), hlm. 284 diakses dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/viewFile/89/69>

2 Triyuwono et al, *Islamic Value Islamic Bank Underlying Performance Assessment*. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 5. No. 24. 2014, hlm. 1

Penerapan model penilaian kinerja bank syariah masih mengadopsi model yang digunakan pada perbankan konvensional seperti penilaian kinerja keuangan tradisional, *balance score card* (BSC) dan *Capital, Asset Quality, Management Earnings, Liquidity, and Sencitivity to Market Risk* (CAMELS). Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank syariah ditentukan oleh faktor-faktor CAMELS, yaitu: *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*. CAMELS pada intinya tidak berbeda dengan penilaian kinerja tradisional dan BSC yang lebih berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan, yaitu profit, dimana penggunaan indikator penilaiannya masih dominan pada kinerja keuangan. Penggunaan indikator tersebut masih memiliki kekurangan yaitu manajemen bank syariah akan lebih menghargai hasil (*output*) dibandingkan proses dan berperilaku *disfungsional* dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip syariah dan mengabaikan perannya sebagai organisasi sosial dan dakwah/ spiritual.<sup>3</sup>

Para pendiri bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian *maqashid syariah*, bank harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mencapai laba maksimum, tetapi juga harus berusaha mewujudkan *maqashid syariah*.<sup>4</sup> Oleh sebab itu penilaian kinerja perbankan syariah terus mengalami perkembangan seperti yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammad, Dzulfajri Abdul Razak, dan Fauziah MD Taib dimana penilaian

---

3 Triyuwono et al, *Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara. 2015, hlm 2

4 Jumansyah, Wirman, S.A., *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Business Sayriah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol.2 No.1, hlm: 25, 2013.

kinerja perbankan syariah berdasarkan pada *maqashid syariah*. Mereka mengembangkan sebuah pengukuran kinerja dalam bentuk *Maqashid Syariah Index* (MSI) dengan tiga tujuan utama, diantaranya *tahzibal-fardi* (mendidik manusia), *iqamah al-‘adl* (menegakan keadilan), dan *jalbal-maslahah* (kepentingan publik). Konsep tersebut kemudian dioperasionalkan melalui metode Sekaran sehingga menjadi parameter yang dapat diukur.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan menganalisa kinerja BPD Syariah dengan melihat seberapa besar tingkat pencapaian *masalah* (kesejahteraan) dalam *maqashid syariah index* jika ditinjau dari ketiga aspek yang meliputi pendidikan, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan pada Bank Pembangunan Daerah Syariah yang ada di Indonesia. Penelitian Sehingga penelitian ini mengambil judul “Implementasi Pendekatan *Maqashid Syariah Index* Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia”.

## B. Literature Review

Antonio, Sanrego, dan Taufiq menulis tentang “*An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*”. *Maqashid syariah* digunakan untuk mengukur kinerja industri bank syariah di Indonesia. Analisis data menggunakan metode *Simple Additive The Weighting* (SAW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan *maqashid syariah indeks* bank Islam di Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan bank syariah di Jordan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Antonio, Sanrego dan Taufiq. *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan*. Journal of Islamic Finance. Vol 1 (2). 2012, hlm.16.

<sup>6</sup> Antonio, Muhammad Syafii. 2012. *An Analisis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Yordania*.

Penelitian kinerja bank syariah dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* juga dilakukan oleh Novi Puspitasari, Devi Hardiyanti Rukmana dan Hari Sukarno dengan judul penelitian “*Analysis of Islamic Banking Efficiency Using Maqashid Shariah Approach (Study on Islamic Banks in Indonesia and Malaysia)*”. Untuk mengukur variabel efisiensi pada penelitian ini menggunakan pendidikan individu, mewujudkan keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Analisis data menggunakan data *envelope analysis* (DEA) selama periode 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 bank Islam yang mencapai tingkat efisiensi maksimum di Malaysia. Affin Islamic Bank mencapai tingkat efisiensi maksimum dalam hal distribusi dan profitabilitas output. CIMB Islamic Bank mencapai efisiensi maksimum dalam aspek distribusi output. RHB Islamic Bank Berhad mencapai efisiensi maksimum dalam hal distribusi output. Sedangkan di Indonesia, Bank Panin Syariah mencapai efisiensi maksimum dalam hal distribusi output dan Bank Mega Syariah dianggap efisien sehubungan dengan output profitabilitas dan pendapatan individu output.<sup>7</sup>

Irfan Soleh juga meneliti analisis kinerja bank syariah dengan penelitiannya “*The Impact of Maqashid Syariah and Core Competency on Performance of Islamic Bank*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi untuk masalah yang terkait dengan kinerja perbankan syariah dalam kaitannya dengan *maqashid syariah* dan kompetensi inti. Penelitian ini adalah review teoritikal dan dimaksudkan untuk mengusulkan hubungan kausal antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah harus mengevaluasi kembali tujuan

---

IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. Journal of Islamic Finance. Vol. 1 No.1, hlm 12-29

7 Novi Puspitasari, Devi H.R, Hari.H, *Analysis of Islamic Banking Efficiency Using Maqashid Shariah Approach* (Study on Islamic Bank in Indonesia and Malaysia), Journal of Finance and Banking Review, 2 (4), 2017, hlm 1-7 diakses dari [www.gatrepreneur.com/GATRJournal/index.html](http://www.gatrepreneur.com/GATRJournal/index.html)

mereka untuk mengkonfirmasi kepada *maqashid syariah* dan kompetensi inti memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja organisasi.<sup>8</sup>

Mohammed *et al* dengan penelitiannya yang berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, menganalisis kinerja perbankan Syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* dengan menggunakan metode Simple Additive Weighted (*SAW Method*). Penelitian kuantitatif ini berhasil merumuskan pengukuran kinerja keuangan Islami yang disebut sebagai *Maqashid Index* (MI). Dari beberapa sampel bank Islam yang menjadi subjek penelitiannya diperoleh hasil pencapaian ranking nilai *indeks maqashid* bank Islam tertinggi adalah Bank Islam Sudan.<sup>9</sup>

Afrinaldi juga melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Perbankan Syariah Indonesia ditinjau dari *Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Indeks* (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah.<sup>10</sup>

Penelitian berjenis kuantitatif deskriptif ini diteliti dengan menggunakan metode Sekaran dan konsep SMI. Adapun hasil yang di peroleh adalah model IMS dapat dilakukan dalam pengukuran kinerja *maqashid Syariah* perbankan. Selain itu, penelitian ini juga berhasil menggambarkan kinerja bank Syariah yang menjadi sampelnya dalam diagram perbandingan

---

8 Irfan Soleh, *The Impact of Maashid Syariah And Core Competency on Performance Of Islamic Bank*, *International Journal of weconomics, Commerce and Management*, Vol, IV, Issue 10 (2016), hlm 872-880, diakses dari <http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2016/10/41050.pdf>

9 Mohammed, Mustafa Omar., Razak, Dzuzastri Abdul & Taib,F.M.,*The Performance Measures Of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) di Putra Jaya Marriot Malaysia, 2008, hlm. 1-17

10 Afrinaldi, *Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatan Sayriah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Sayriah*. Paper Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

yang merupakan perbandingan antara kinerja profitabilitas bank Syariah dengan pelaksanaan *maqashid Syariah*.

Khisan juga melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Profitabilitas dan *Maqashid Syariah*. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode *Comparative Performance Index* (CPI) dan *Syariah Maqashid Index* (SMI). Diperoleh bahwa pengukuran kinerja perbankan Syariah dapat ditinjau dari profitabilitas dan *maqashid Syariah*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan model *indeks maqashid Syariah*. Kinerja setiap bank Syariah ditunjukkan melalui diagram perbandingan yang merupakan hasil perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan *maqashid Syariah* yang telah dilakukan oleh bank Syariah.<sup>11</sup>

Sudrajat dan Sodiq juga melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja perbankan Syariah dengan menggunakan MSI. Penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan *Indeks Maqashid Syari’ah*” menggunakan metode Sekaran dan *Simple Additive Weighting Methode* (SAW) dalam mengukur kinerja keuangan Islam. Mereka mencoba untuk melihat kegagalan dan keberhasilan keuangan Islam dalam kaitannya dengan *Maqashid al Syariah*. Hasil penelitian mengusulkan mekanisme untuk memantau kinerja lembaga keuangan Islam dalam mencapai tujuan social-ekonomi Islam khususnya di bidang keuangan Islam. Hasil penelitian menyarankan beberapa langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya diperlukan indeks yang lebih kuat dengan menggunakan *maqasid Syariah indeks* khususnya dalam mengukur kinerja dan kontribusi terhadap peredaran

---

11 Khisan, Zariatul., *Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari’ah Confirmity and Profitability Model*. International Association for Islamic Economics Review of Islamic Economics, Vol.13, No.2, 2015.

kekayaan, promosi keadilan sosial, ekonomi dan fokus pada pengembangan kapasitas Pendidikan.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian yang akan dilakukan ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kinerja perbankan syariah dengan pendekatan *maqashid syariah indeks* hanya saja perbedaan terletak pada sampel bank yang diteliti. Pada penelitian ini akan meneliti kinerja perbankan yang dikhususkan pada bank pembangunan daerah syariah di Indonesia dan untuk melihat bagaimanakah kinerja bank syariah tersebut bila diukur dengan *maqashid syariah indeks*.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Maqashid Syariah

Secara etimologi *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju air, atau dapat dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Konsep *maqashid syariah* sebenarnya telah dimulai pada masa Al-Juwaniyag terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali kemudian disusun secara sistematis oleh seorang ahli *ushulfiqh* bermazhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam *Al-Syatibi*. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqatfi Ushulal-Ahkam*, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*. Menurut *al-Syatibi*, pada dasarnya *syariah* ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*Mashalih-al-‘ibad*) baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi *maqasid syariah*.<sup>13</sup>

---

12 Sudrajat, Anton, Sodiq, Amirus., *Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah*. Bisnis, Vol. 4, No.1, 2016.

13 Fitriyani, Yeni. (2014). *Penilaian Kesehatan BMT Berdasarkan Maqashid Al-Syariah*. Tesis. Yogyakarta: UII, hlm 21

Senada dengan *al-Syatibi*, Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*, menjelaskan bahwa adanya *maslahat* sesuai dengan *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid syariah*. Sebaliknya mengesampingkan *maslahat* berarti mengesampingkan *maqashid syariah*.<sup>14</sup>

Menurut Abu Zahrah *maslahat* yang dapat diterima adalah *maslahat-maslahat* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar. kelima jaminan dasar tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Adapun kelima jaminan dasar itu adalah jaminan keselamatan agama (*al-Muhafazhah al Adiin*), jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), jaminan keselamatan akal (*al-Muhafazhah al-'Aql*), jaminan keselamatan keturunan (*al-Muhafazhah al-Nasl*), dan jaminan keselamatan harta (*al-Muhafazhah al-Maal*).<sup>15</sup> Sedang menurut teori imam al-Ghazali, *maslahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzhaldiin*); 2) melindungi jiwa (*hifzhalnafs*); 3) melindungi akal (*hifzhal 'aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzhalnasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzhal mal*).<sup>16</sup>

Imam Al-Syatibi menyampaikan bahwa *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyat* (kebutuhan pendukung) (Syatibi, 2004:221). Dari ketiga kategorisasi tersebut, *dharuriyyat* (kebutuhan primer) menjadi sangat

---

14 Zahrah, Muhammad Abu. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. hlm. 430

15 Zahrah, Muhammad Abu. (1995). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, hlm. 424-425

16 Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa*. Beirut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, hlm. 217

penting dan menjadi prioritas utama, karena *dharuriyyat* memiliki 5 (lima) hal penting diantaranya adalah: agama (*ad-Diin*), jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan (*an-Nasl*), dan harta (*al-Maal*).<sup>17</sup>

Pemahaman lengkap tentang *maqashid syariah index* diambil dari nilai luhur Islam (*maqashid syariah*) yang dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah dengan mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan dan manfaat (*jalbal-Masaalih*) dengan meninggalkan dan menghilangkan kesukaran atau penderitaan (*dar al-Mafaasid*).<sup>18</sup>

Mohammed dan Taib dalam penelitian mereka yang berjudul pengujian kinerja yang diukur berdasarkan model *maqashidal-shariah* (PMMS) pada 24 bank syariah dan konvensional terpilih telah merumuskan evaluasi kinerja perbankan Islam dengan mengacu pada konsep *maqashid syariah*. variabel yang digunakan mengacu pada teori *maqashid syariah* oleh Abu Zahrah yang meliputi *tahdzibal-fard* (mendidik individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *maslahah* (kesejahteraan). Melalui konsep Sakaran, ketiga *maqashid* tersebut telah diterjemahkan ke dalam 9 dimensi dan kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen. Sepuluh elemen diubah menjadi rasio kinerja.

Mendidik individu dalam *maqashid* pertama berarti pengembangan pengetahuan dan keahlian individu sehingga nilai spiritual meningkat. Bank Islam harus merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga mereka akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka kepada karyawan. Bank juga memberikan informasi kepada *stakeholder* bahwa produk yang ditawarkan

---

17 Syatibi, Abu Ishak. (2004). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, hlm. 221-222

18 Antonio, M. Syafii, dkk. (2012). *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*. *Jurnal of Islamic Finance*, 1 (1), hlm. 14.

sesuai dengan syariah. Rasio dalam *maqashid* pertama adalah hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, dan publisitas (promosi). *Maqashid* kedua adalah keadilan, bank syariah harus memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan bisnis yang tercakup dalam produk, harga dan ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh kontrak (*aqad*) harus bebas dari unsur ketidakadilan seperti *maysir*, *gharar* dan *riba*. rasio dalam *maqashid* kedua adalah rasio PER (*profit equalization reserves*), bagian dari skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta rasio pendapatan bebas bunga. Sedangkan untuk *maqashid* ketiga disebut masalah, di bank perkara harus mengembangkan proyek investasi dan layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. itu bisa dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan oleh bank dan investasi di sektor riil. Rasio dalam *maqashid* ketiga adalah pengembalian laba, transfer pendapatan pribadi (zakat) dan rasio investmen di sektor riil.

## 2. Penilaian Kinerja Perbankan Syariah

Untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bank dapat dilakukan dengan menilai kinerja dari bank tersebut. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem kendali manajemen. Penilaian kinerja adalah alat bagaimana manajemen dalam menentukan seberapa jauh pencapaian tujuan perusahaan/ bank yang telah dicapai, menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja bisnis yang dijalankan, manajer, divisi dan individu yang ada di dalam perusahaan dan juga untuk memprediksi ekspektasi perusahaan terkait bisnis di masa yang akan datang.<sup>19</sup> Sistem pengukuran kerja yang handal adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan organisasi.<sup>20</sup>

---

19 Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada Strategi*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka, 2004.

20 Mardiasno, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Terdapat dua kategori informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja/penilaian yaitu :

### 1. Kinerja keuangan

Pengukuran laporan keuangan dinilai berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Pengukuran dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dan anggaran. Analisis varians sebagian besar difokuskan pada dua varian yaitu pendapatan dan pengeluaran yang mencakup rutinitas dan investasi / belanja modal. Menurut Kasmir untuk mengetahui kondisi kinerja bank biasanya menggunakan analisis CAMEL (modal, aset, manajemen, penghasilan, likuiditas, sensitivitas, dan risiko pasar). Model pengukuran dan evaluasi ini telah dinyatakan oleh Bank Indonesia sehingga bank-bank di Indonesia diharuskan membuat laporan rutin dan reguler dengan menggunakan pengukuran CAMEL. Seiring dengan pengembangan alat evaluasi untuk mengukur kinerja perusahaan termasuk industri perbankan, muncul alat evaluasi yang disebut *economic value added* (EVA). Menurut Bringham dan Houston dalam Endri, Eva adalah nilai tambah yang diberikan oleh manajemen kepada pemegang saham untuk tahun tertentu.<sup>21</sup>

Sederhananya, angka EVA diperoleh dari pendapatan operasional dikurangi biaya modal yang diinvestasikan.<sup>22</sup>

### 2. Informasi non keuangan

Informasi non keuangan bisa menjadi patokan lain. Informasi non-keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dalam proses manajemen pengendalian kualitas. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang telah

---

21 Endri, *Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio-rasio Keuangan dan Economic Value Added*, Tazkia Islamic Finance & Business Review, Vol.13 No.2 (2008), hlm. 118.

22 Stern, Joel M. & Shiely, John S. (2001). *The EVA Challenge : Implementing Value Added Change in an Organization*, Canada : John Wiley & Sons, Inc, hlm.15

dikembangkan oleh berbagai organisasi adalah *balanced scorecard* yang melibatkan empat aspek yaitu perspektif keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Secara praktis, proses pengukuran kinerja perusahaan umumnya menggunakan rasio keuangan. Hanya saja, banyak terdapat kelemahan jika menggunakan keuangan sebagai sebagai tolok ukur kinerja perusahaan seperti mendorong manajer untuk lebih memilih mengambil tindakan jangka pendek dibandingkan rencana jangka panjang, sehingga rencana jangka panjang akan diabaikan, mengabaikan aspek pengukuran non finansial dan aset tidak berwujud, baik dari internal maupun eksternal akan memberikan pandangan yang keliru dari para manajer perusahaan di masa sekarang bahkan lebih di masa depan dan kinerja keuangan hanya berdasarkan kinerja masa lalu yang kurang mampu untuk memimpin perusahaan menuju tujuan perusahaan.<sup>23</sup>

**Kinerja Bank Pembangunan Daerah Syariah dengan Pendekatan Maqashid Syariah Indeks.**

*a. Tahdzib Al-Fard (Pendidikan)*

1. Hibah Pendidikan

Berdasarkan hasil perhitungan dari ke 4 BPD syariah di Indonesia tidak satupun bank yang menjelaskan secara rinci mengenai hibah pendidikan yang disalurkan kepada masarakat dari tahun 2016-2018. Hibah pendidikan yang dimaksud baik berupa dana beasiswa maupun bantuan terhadap lembaga pendidikan. Diantara ke 4 bank yang menyalurkan hibah pendidikan terbesar adalah Bank jawa barat syariah yang memiliki porsentase 0,01 % dari total beban yang dikeluarkannya. Kemudian diikuti

---

<sup>23</sup> Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004.

bank Aceh sebesar 0,0026%. Besarnya jumlah dana yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan Bank Jawa Barat Syariah mampu membuat program-program unggulan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, program BJB greenschool, program TPS terpadu dan program pelatihan wirausaha BJB. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang tidak hanya fokus pada tujuan komersil (*profit oriented*), diharapkan mampu membuat program-program yang bermanfaat tidak hanya bagi karyawan akan tetapi juga bagi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan beasiswa pendidikan. Program ini menunjukkan pemenuhan tanggung jawab sosial bank kepada masyarakat dan besarnya kontribusi dalam pengembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat dan usaha dalam mengatasi masalah ekonomi khususnya terkait kesulitan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan secara tidak langsung juga berdampak pada usaha peningkatan sumber daya manusia yang ada di wilayah tempat bank berada.

2. Penelitian. Rasio ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh bank pembangunan daerah syariah untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Dari ke 4 BPD syariah, terdapat 3 BPD syariah yang tidak melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk penelitian. Hanya Bank NTB Syariah yang melaporkan biaya penelitian atau pengembangan (*research and development*) untuk keberlangsungan kegiatan operasionalnya.
3. Pelatihan. Salah satu bentuk implementasi dari konsep *hifzul aql* (penjagaan terhadap akal) dan *hifzun nafs* (penjagaan terhadap nilai) yaitu adanya

pengalokasian dana oleh bank umum syariah untuk biaya pendidikan dan pelatihan karyawan. Dalam hal ini Bank NTB syariah memperoleh rasio yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya dengan nilai rasio sebesar 0,000049%. Program pelatihan yang diberikan berupa : peningkatan kompetensi tatap muka yang terdiri dari pelatihan, pendidikan, workshop, sosialisasi dan sertifikasi. Pelatihan dan training banyak terfokus pada persiapan dan peningkatan kemampuan karyawan terkait perbankan syariah.

4. Promosi/Publisitas. Bank syariah memiliki peran untuk memberikan pengetahuan mengenai perbankan syariah kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai bentuk informasi produk bank syariah dan operasionalnya. Bank Pembangunan Daerah yang memperoleh nilai rasio tertinggi dalam hal ini adalah Bank Aceh syariah dengan nilai 0,0009%. Kemudian disusul oleh Bank NTB dan Bank Jawa barat Syariah dengan nilai rasio 0,0002 %. Pemasaran yang dilakukan Bank lebih kepada pemasaran yang difokuskan di komunitas-komunitas untuk memperoleh segmen tertentu terutama segmen yang menegaskan profil syariah.

b. *Iqamah Al-Adl* (Keadilan)

1. Fair Returns (Rasio Pengembalian yang adil). Bank syariah dituntut untuk melakukan transaksi yg adil salah satunya dengan memberikan pengembalian yang adil kepada nasabahnya (*fair return*). Berdasarkan analisis, hampir semua bank umum syariah di Indonesia belum mengungkapkan berapa tingkat PER (*Profit Equalisation Ratio*) dalam laporan tahunannya. PER sendiri menurut

*Standar The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan / disisihkan, sebelum mengalokasikannya ke bagian Mudharib dengan tujuan untuk memberikan return / hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dan pemegang saham.

2. *Functional Distribution* (Fungsi Distribusi). Fungsi distribusi dalam hal ini menggambarkan seberapa besar pembiayaan dengan akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah terhadap seluruh akad pembiayaan yang diberikan bank syariah. Berdasarkan hasil perhitungan, bank pembangunan daerah syariah yang memperoleh nilai rasio tertinggi adalah Bank Jawa Barat syariah dengan nilai 1,15%. Artinya, bahwa Bank Jawa barat Syariah mengucurkan dana untuk akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah lebih banyak dibandingkan akad pembiayaan yang lainnya. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah pembiayaan seluruh bank pembangunan daerah syariah tiap tahunnya mengalami peningkatan secara kontinyu, hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh bank pembangunan daerah syariah berusaha meningkatkan fungsinya untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui transaksi bagi hasil.
3. *Interest Free Product* (Produk non bunga). Salah satu prinsip perbankan syariah melarang adanya riba (suku bunga), hal ini dikarenakan riba dapat memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam hal ini hampir ke

4 bank pembangunan daerah syariah yang diteliti memperoleh nilai 100% untuk kategori produk-produk dalam kegiatan operasinya yang terbebas dari bunga. Sebagai bank umum syariah tentunya dituntut untuk menjalankan aktifitas operasi yang terbebas dari riba. Karena semakin tinggi rasio investasi yang bebas bunga akan memberikan dampak positif atas berkurangnya kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Rasio ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran surat Ali-Imron ayat 130.

c. *Jalb Al-Maslahah* (Kesejahteraan/ Kemaslahatan)

1. Rasio Laba Bersih. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Semakin besar keuntungan yang diperoleh bank umum syariah, maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tidak hanya pada pemilik dan pegawainya saja akan tetapi dapat berdampak pada semua stakeholder perbankan syariah. Salah satu bank pembangunan daerah syariah di Indonesia yang memperoleh nilai rasio tertinggi untuk rasio laba bersih adalah Bank Jawa Barat Syariah dengan nilai perolehan 0,87%. Kemudian disusul dengan Bank Aceh dengan nilai rasio 0,123%.
2. *Distribution of Income* (Distribusi Pendapatan). Perbankan syariah selalu berupaya untuk peduli terhadap sesama dengan ikut mengentaskan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam ajaran islam, prinsip kepedulian sosial ini diwujudkan melalui kosep zakat infak dan

sedekah. Umat diharuskan bertanggungjawab secara material terhadap kemiskinan yang ada di lingkungannya. Lebih jauh konsep zakat ditujukan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Oleh karena itu, keberadaan bank pendapatan daerah syariah mempunyai peranan penting dalam mendistribusikan kekayaan kepada semua golongan salah satunya yaitu dengan mendistribusikan zakat atas penghasilan yang diperolehnya. Bank Aceh syariah memperoleh nilai ratio tertinggi dalam pendistribusian zakatnya. Disusul dengan bank nagari dan bank NTB. Namun Bank Pembangunan Daerah Jawa barat belum melaporkan pendistribusian zakatnya. Hal tersebut dikarenakan bank belummemiliki pengelolaan investasi terikat dan belum memulai aktivitas pengelolaan dana zakat. Oleh karenanya, bank tidak membuat laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas tersebut (annual report).

### 3. Investment Ratio in Real Sector

Keberadaan bank umum syariah diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam pertumbuhan sektor riil, semakin besar nilai rasio atas investasi sektor riil semakin akan memberikan kemaslahatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bank pembangunan daerah syariah yang memperoleh nilai rasio tertinggi pada investasi sektor riil adalah Bank NTB Syariah, hal tersebut membuktikan bahwa investasi yang dilakukan oleh Bank NTB hampir seluruhnya menyentuh sektor riil dan sangat sedikit dana yang diinvestasikan pada sektor keuangan. Meningkatnya jumlah investasi yang dikucurkan pada sektor riil pada setiap tahunnya, menyebabkan Bank NTB syariah semakin

memperkuat eksistensinya sebagai institusi bagi sektor riil.

### C. Penutup

Kinerja Perbankan daerah syariah berdasarkan konsep *maqashid syariah* menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya yang sesuai dengan tujuan syariah lebih dominan pada tujuan *Iqmah al-Adl*. Artinya, perbankan syariah Indonesia lebih maksimal dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. Bank umum syariah di Indonesia yang memperoleh pencapaian terbaik sesuai dengan nilai *Maqashid Syariah Index (MSI)* adalah Bank Aceh Syariah.

Bagi perbankan Syariah perlu kiranya untuk mengevaluasi kinerja dengan lebih memberi perhatian terhadap pengungkapan aspek-aspek syariah dan terus mempertahankan sistem operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi regulator dunia perbankan, untuk lebih mempertimbangkan kembali baik tidaknya rasio *Profit Equalisation Reserve (PER)* jika diberlakukan di perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi, Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah: Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah. *Paper Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah* di UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Antonio, Sanrego dan Taufiq. *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordan*. *Journal of Islamic Finance*. Vol 1 (2). 2012
- Antonio, Muhammad Syafii. 2012. *An Analisis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Yordania*. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. *Journal of Islamic Finance*. Vol. 1 No.1
- Ascarya, Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtashadia*. 2014
- Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Chapra. *Islam dan Pembangunan Ekonomi: Menurut Maqashid Asy-Syariah*. Terj. Solo: Al-Hambra. 2007.
- Endri, Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio-rasio Keuangan dan Economic Value Added, *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, Vol.13 No.2 (2008).
- Irfan Soleh, The Impact of Maashid Syariah And Core Competency on Performance Of Islamic Bank, *International Journal of weconomics, Commerce adn Management*, Vol, IV, Issue 10 (2016), hlm 872-880, diakses dari <http://ijecm.co.uk/wp-content/>

uploads/2016/10/41050.pdf

Jazil dan Syahrudin, *The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Bank Based on the Maqashid al-Shariah Approach*. 2013.

Jumansyah dan Syafei, *Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2. No. 1. 2013.

Khisan, Zariatul., Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shari'ah Conformity and Profitability Model. *International Association for Islamic Economics Review of Islamic Economics*, Vol.13, No.2, 2015.

Mardiasno, *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Mohammed, Dzuljastri dan Taib, (2008), *The Performance measures of Islamic Banking based on The Maqashid Framework*, paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) held at Putra Jaya Marriot, Malaysia. 25 Juni 2015

NoviPuspitasari, DeviH.R, Hari.H, Analysis of Islamic Banking Efficiency Using Maqashid Shariah Approach (Study on Islamic Bank in Indonesia and Malaysia), *Journal of Finance and Banking Review*, 2 (4), 2017, hlm 1-7 diakses dari [www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html](http://www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html)

Sanrego, *Maqashid Index Untuk Bank Syariah*. Kategori: Ekonomi Islam. 2015

Rusyiana, *Maqashid Syariah Index sebagai Ukuran Kinerja Perbankan*, Jurnal Ekonomi Islam. 2014

Sudrajat, Anton, Sodiq, Amirus., Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Shari'ah. *Bisnis*, Vol. 4, No.1, 2016

- Triyuwono et al, *Islamic Value Islamic Bank Underlying Performance Assessment*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 5. No. 24. 2014
- Triyuwono et al, *Konsep Dasar Penilaian Kinerja Bank Syariah*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara, 2015
- Yuwono, Sony, et al., *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi yang berfokus pada Strategi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995



## DIALEKTIKA SOSIAL MASYARAKAT LOMBOK SELATAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

---

Muh. Salahuddin & Zainal Arifin

**Kata Kunci:** *Dilalektika Sosial, Pembangunan, Tourism*

### A. Pendahuluan

Untuk kepentingan pembangunan, sikap *inclusive* masyarakat adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki. *Inclusivisme* itu mencakup ranah politik-hukum, adat-budaya, sosial, pendidikan, keamanan, dan dimensi lain dalam sistem sosial masyarakat. Hal di atas adalah ‘*software*’ yang dibutuhkan untuk memulai pembangunan. Perlindungan hukum dan jaminan sosial, walaupun tidak masuk dalam kajian ekonomi murni, adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan untuk investasi dan memulai aktivitas fisik pembangunan (*hardware*).<sup>24</sup>

Pada sisi lain, sikap *inclusive* ini harus juga didukung kuat oleh ‘benteng’ yang secara politik-sosial-ekonomi menjamin eksistensi masyarakat lokal. Eksistensi masyarakat yang dimaksud adalah terkait dengan nilai budaya lokal, aset ekonomi, partisipasi masyarakat, lingkungan, tradisi, dan lain-lain yang telah dahulu hidup (*existed*) dalam masyarakat. Dalam kata lain, bahwa pembangunan tidak menggilas peradaban yang telah *existed*, masyarakat lokal tidak sebagai ‘korban’ dalam pembangunan, dan ‘orang luar’ (investor) adalah sebagai mitra dalam proses pembangunan. Idealnya,

---

<sup>24</sup> Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester, The Islamic Foundation; 1991), h. 138.

pembangunan adalah sebuah proses yang *simbiosis-mutualis* dengan realitas, atau paling tidak terbangun ruang dialogis yang menjembatani ‘yang lama’ dan ‘yang baru’. Inilah yang dalam bahasa Soekarno, *jangan menjadi kuli di negeri sendiri*. Dalam konteks perubahan ini, dalam kaedah ushul fikih ditemukan kalimat *al-muhāfazat ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhz{u bi al-jadīd aṣlah* (melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik).<sup>25</sup>

Perubahan/pembangunan itu adalah mutlak dibutuhkan, namun orientasi membangun adalah dalam konteks yang visioner-inovatif-kreatif; membangun komunitas/masyarakat yang lebih baik secara kualitatif dan kuantitatif, spiritual-material, jiwa-raga. Inilah yang kemudian dikenal dengan terma *al-falāḥ* (keuntungan) dalam kajian ekonomi syariah/Islam,<sup>26</sup> yang orientasinya adalah *maqāṣid al-‘ibād fi dunyāhum wa ukhrāhum* (kesejahteraan manusia di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat).<sup>27</sup>

Salah satu aspek pembangunan yang seringkali dilematis di wilayah nusantara adalah pembangunan dalam bidang pariwisata. Pertemuan budaya lokal dengan budaya luar, terkadang sejalan-seiring dengan sistem nilai masyarakat, dan tidak jarang pembangunan bidang pariwisata ‘dihadang’ karena dianggap kontra produktif dengan nilai dan tatanan masyarakat yang berlaku. Relasi budaya ini dipengaruhi oleh nilai agama, adat, tata krama yang berlaku dan telah menjadi

---

25 Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press 2004), h. 174-213.

26 Muhammad Akram Khan, *Islamic Finance and Finance: A Glossary*, (London, Routledge; 2003), 60. Lihat juga Charles Tripp, *Islam the Moral Econoy The Challenge of Capitalism*, (Amerika, Cambridge University Press; 2006), 105.

27 M. Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shari’ah*, (London-Washington, The International Institute of Islamic Thought; 2008).

identitas dan eksistensi diri masyarakat. Ragam pertemuan budaya nusantara dalam konteks pembangunan pariwisata itulah yang membentuk pola, relasi, dan perubahan sosial yang khas dalam masyarakat Indonesia, termasuk di NTB.<sup>28</sup>

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Pembangunan dan Keterbelakangan

Pembangunan adalah sebuah proses pemerataan distribusi sumberdaya ekonomi (*economic power*) dalam kelompok masyarakat melalui kegiatan pengentasan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, lapangan kerja baru, pengembangan lahan/kawasan produksi, dan lain-lain dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, menurut Adam Smith, ditentukan oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas lahan dan dan sumber daya alam, serta teknologi yang digunakan. Senada dengan Smith, Ricardo memfokuskan teorinya pada jumlah populasi penduduk.<sup>29</sup>

Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak lahan yang dibutuhkan dan mendorong aktivitas ekonomi. Schumpeter menekankan pada peran kelas menengah (pengusaha) dalam pertumbuhan ekonomi dengan *stressing* pada kegiatan yang kreatif-inovatif. Indikator kreatifitas dan inovasi ada pada penggunaan teknik produksi, penemuan bahan dasar, pembukaan daerah pemasaran, penggunaan manajemen, penggunaan teknik pemasaran.<sup>30</sup>

---

28 Sumiman Udu, 'Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Pengembangan Badan Otorita Pariwisata Wakatobi', makalah disampaikan dalam Konfrensi Internasional Bahasa, Budaya, dan Sastra Indonesia, 17-19 September 2017.

29 Deliarinov, *Politik Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga; 2006), 24-36.

30 Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and Bussiness Cicle*, (New Jersey: The State University of New Jersey: 2016), 128-157.

Sombart menulis bahwa perkembangan ekonomi ditentukan oleh organisasi dan sistem teologi yang dianut oleh masyarakat. Rostow mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam 5 tahapan, yaitu; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi.<sup>31</sup>

Di negara berkembang dan terbelakang, pertumbuhan ekonomi/pembangunan dihambat oleh beberapa faktor, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, taraf hidup yang rendah, pertanian tradisional, kekuarangan modal, lemahnya pembangunan infrastruktur pertanian, minimnya teknologi pertanian, dan produktivitas yang rendah. Kesemua *point* di atas ada di Indonesia, khususnya di NTB. Hanya saja *level*-nya yang berbeda. Yang unik adalah bahwa kemiskinan dan keterbelakangan di NTB bukan karena kurangnya sumber daya. Dari realitas ini kemudian para ahli mengkategorikan kemiskinan menjadi *cultural poverty* dan *structural poverty*. *Cultural poverty* terkait erat dengan nilai yang dianut oleh masyarakat, sementara *structural poverty* terkait dengan sistem dalam satu tatanan masyarakat tertentu.

## 2. Dialektika Sosial dan Pembangunan

Hegel, dalam kajian filsafat dikenal sebagai tokoh yang ‘mendamaikan’ mazhab pemikiran yang baku dan beku. Tawaran pemikirannya tentang dialektika rasional melalui konsep tesis, anti tesis, dan sintesis dianggap sebagai puncak prestasi Barat dalam dunia ilmu pengetahuan. Tesis-antitesis-sintesis dalam dialektika Hegel adalah meniscayakan kebenaran nisbi/ sementara. Tesis mengandung kebenaran, demikian pula antitesis memiliki kebenaran yang berbeda. Untuk menjembatani dua kebenaran yang ada, diperlukan upaya sintesis yang memadukan dua

---

31 Walt Whitman Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, (Cambridge, Cambridge University Press; 1990).

kebenaran tanpa mengabaikan kebenaran yang telah ada.<sup>32</sup> Logika yang dikembangkan Hegel adalah bahwa objek yang tampaknya *independent* tidak sepenuhnya *independent*, namun ada aspek asing/lain yang mempengaruhi objek/seseorang yang kemudian harus didesain menjadi keseluruhan (sistem yang utuh). Sehingga perubahan dalam sejarah manusia adalah bukan perubahan garis lurus, namun perubahan dalam wujud spiral yang secara alamiah terkonstruksi melalui aktivitas tesis-antitesis-sintesis. Seiring dengan itu, perubahan dalam sejarah manusia selalu menemukan yang baru, walaupun dalam konteks yang sama. Inilah yang oleh Schumpeter dikatakan sebagai inovasi yang memicu pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup>

Sejalan dengan di atas, Hubermas menambahkan bahwa perubahan dalam dialektika itu akan berdampak pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan itu hadir dari dua realitas yang kontradiktif. Akibatnya terjadi negasi (pembaharuan) yang melampaui realitas yang ada sebelumnya.<sup>34</sup> Baik Hegel dan Hubermas menawarkan komunikasi dialogis untuk menyampaikan kebenaran. Komunikasi yang setara, tanpa adanya dominasi penguasaan satu pihak atas pihak lainnya. Inilah yang dikatakan Hubermas sebagai komunikasi emansipatoris.

Dalam konteks pembangunan, teori dialektika Hegel dan Hubermas ini digunakan sebagai 'negosiasi ruang' untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi. Negara sebagai *agent of change* adalah bukan satu-satunya pusat kedaulatan dalam masyarakat. Masih banyak kedaulatan lain yang secara *de facto* diakui masyarakat sebagai sumber kedaulatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara sebagai

---

32 Suyahmo, 'Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan UUD 1945', dalam *Humaniora*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007, 145-147.

33 Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development*,...134.

34 Santosa Irfan, 'Jurgen Hubermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial', dalam *Komunika*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni, 2009, 101-113.

sebuah sistem diliputi oleh banyak komponen/subsistem yang dapat mempengaruhi, dan saling mempengaruhi dalam sebuah unit sistem. Huberman mengategorikan sistem sebagai masyarakat besar, dan komponen/subsistem diibaratkan sebagai komunitas. Hubungan antar komponen dalam sebuah sistem inilah yang disebut dialektika, atau yang dalam teori sistem dikenal sebagai *emergence properties* (kebaharuan).<sup>35</sup>

Dialektika / adalah satu cara pandang atas sesuatu dalam keadaan bergerak. Proposisi dasar dialektika adalah sesuatu selalu ada dalam proses perubahan yang dinamik, yang seringkali prosesnya tidak terlihat dan tidak bergerak dalam garis lurus. Dalam bahasa pembangunan hari ini, Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi adalah upaya perubahan yang dinamis melalui lompatan yang tidak pada garis lurus.

### 3. Eksistensi Budaya dan Pembangunan

Eksistensi adalah aliran psikologi yang menyadarkan pada potensi diri dan kelompok. Pada dasarnya, eksistensi adalah suatu yang dinamis yang terus bergerak. Pergerakan itu bisa jadi lambat, atau cepat. Bisa juga dari arah negatif menuju positif, atau sebaliknya. Namun pada substansinya, eksistensi adalah dalam kerangka *being* (menjadi), dan oleh karena itu yang dikedepankan adalah konsep *to learn how to learn*. Konsep ini menuntut adanya interaksi antar orang/ kelompok/subsistem dalam masyarakat.

Kierkegaard mengklasifikasi dinamika eksistensi masyarakat/individu dalam tiga fase:<sup>36</sup> *aesthetic stage*, *ethical stage*, dan *religious stage*. Klasifikasi di atas, bagi individu dan masyarakat tidak selalu bersifat *linear-*

---

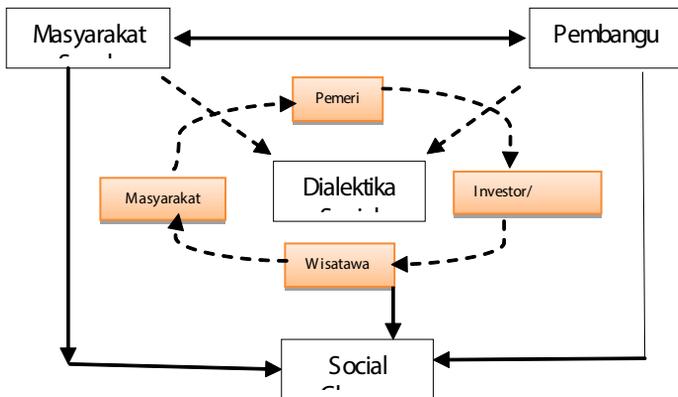
35 Muhammad Husni Muaz, *Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem*, (Mataram, Institut Pembelajaran Gelar Hidup: 2014).

36 F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta, Gramedia: 2007), 251-256.

*gradual*. Seringkali sifatnya *circle*, saling mempengaruhi, dan seringkali dipengaruhi oleh faktor luar (*external*) dalam setiap tahapnya. Tingkatan dan kualitas pengaruh *external* bagi diri dan kelompok adalah tergantung seberapa kuat masyarakat menginternalisasi nilai yang mereka anut, dan dinyatakan sebagai eksistensi diri/masyarakat.

Dalam konteks di atas, pembangunan dihadapkan pada upaya dialog dan adaptasi dengan realitas masyarakat sebagai subyek pemngunan. Pembangunan, idealnya harus mendapat dukungan kuat dari masyarakat lokal, sebagai motor penggerak utama.

Inti dari pembangunan adalah perubahan. Perubahan itu hanya mungkin didialogkan dengan baik kepada masyarakat. Dialog itu harus dilakukan untuk menghindari adanya 'benturan', yang merupakan penghalang proses pembangunan. Kerugian materiil, moril, dan sosial harus diminimalisir, karena semua itu adalah *asset* yang harus dihitung sebagai *cost* dalam pembanngunan. Dalam konteks di atas, disusun kerangka pikir sebagai berikut :



Ketika ide pembangunan diterima secara baik, maka proses perubahan sosial dapat dilakukan secara *ajeg*. Namun ketika ide pembangunan tidak diterima baik oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah dialektika sosial (dalam berbagai

ragam bentuk dan variannya), yang melibatkan berbagai unsur yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Dialektika sosial inilah yang akan ‘disorot’ dalam penelitian ini.

## C. Temuan dan Pembahasan

### 1. Tipologi Masyarakat Sasak Selatan

Kawasan Lombok selatan ‘dihiasi’ oleh tanah tandus dan gersang. Setiap musim kemarau datang, keluhan utama masyarakat adalah kekurangan air. Hanya beberapa titik sumber mata air yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara bersama. Bahkan pada masa/bulan tertentu di musim kemarau, antrian panjang untuk mengambil air di beberapa desa seringkali terlihat.<sup>37</sup> Dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terlihat beberapa mobil tangki yang menjajakan air bersih untuk dikonsumsi. Pada musim kemarau, air adalah yang paling berharga bagi masyarakat. *‘Ambil semua yang kita punya, tapi jangan ambil air dari rumah saya ini (dalam tampungan)’*, demikian ucapan warga masyarakat.<sup>38</sup>

Kondisi kering-tandus ini berdampak pada pola tanam masyarakat yang hanya mampu menyediakan *stock* makanan pokok dengan menanam padi satu kali musim tanam dalam setahun. Akibatnya, kekurangan ketersediaan itu harus dipenuhi dengan pekerjaan lain. Sebagian besar laki-laki masyarakat Lombok Selatan memiliki mental yang kuat untuk ‘keluar’ dari kampungnya dengan tujuan untuk mencari nafkah tambahan untuk keluarga dan kerabat. Biasanya para pemuda keluar ke daerah Mataram, Kalimantan,

---

37 Observasi lapangan di beberapa desa kawasan selatan Lombok Selatan rentang bulan Juli Agustus 2019.

38 Wawancara dengan *amaq* Apar, *inaq* Aida, *papuq* Amat, dan lain-lain masyarakat Lombok Selatan.

dan Malaysia sebagai alternatif ‘penyambung hidup’.<sup>39</sup> Namun beberapa tahun terakhir, dengan hadirnya budidaya semangka dan pengembangan wilayah wisata di kawasan selatan, masalah kekurangan penghasilan masyarakat selatan sedikit terjawab dengan terbukanya lapangan pekerjaan di wilayah ereka.

Masyarakat Lombok selatan dikenal sebagai ‘orang yang keras’ perkataan dan perilakunya. Kadang juga identik dengan masyarakat yang ‘kasar dan sadis’.<sup>40</sup> Bisa jadi kondisi geografis dan siklus kehidupan/musim turut membentuk karakter masyarakat yang demikian itu. Wilayah kering dan berbatu, angin kencang dan alam yang terbuka, kekurangan air dan kekurangan sumber hidup lainnya adalah unsur eksternal yang membentuk karakter masyarakat. Kerasnya alam dan kehidupan menyatu, dan secara alamiah membentuk watak masyarakat Lombok Selatan. Namun pada substansinya, sifat dasar masyarakat Lombok Selatan adalah masyarakat yang terbuka, menerima dan menghormati kedatangan orang lain (tamu), dapat diajak berdiskusi dan berdialog, ramah, dan seterusnya. Dengan catatan siapapun tamu (orang) yang datang tidak ‘menggangu’ masyarakat. *‘Kami terima semua orang datang di desa ini. Mau dari Jawa, Sulawesi, Australi, mana aja kita terima. Yang penting dia datang baik-baik aja. Orang bule itu kan memang begitu pakaiannya, ndak bisa kita paksa dia berpakaian seperti kita. Yang kelakuannya baik aja itu sudah cukup bagi kita. Pasti kita layani dengan baik siapapun yang datang’*, demikian ungkap mamiq Udan.

---

39 Wawancara dengan Lalu Yahya, Swasto Hadi, Rosadi, masing-masing mereka adalah tokoh di desa Selong Belanak, Tumpak dan Ungga.

40 Berita tentang tindak kekerasan, perampokan dan pembunuhan di kawasan pariwisata Lombok selatan semakin menguatkan identitas masyarakat selatan sebagaimana digambarkan di atas <https://insidelombok.id/kriminal/polsek-kuta-tangkap-jambret-dibawah-umur/>,

Masyarakat selatan Lombok adalah *wellcoming society* dengan kesederhanaan dan kesahajaan. Orang lain (tamu) bagi mereka adalah 'cermin' untuk mengaca diri. Jika tetamu yang datang adalah orang yang membawa kebaikan, maka sambutan yang keluar juga kebaikan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, namun proses perubahan itu haruslah melalui proses saling menghormati, saling menguntungkan, dan dalam suasana yang damai dan natural. Dalam pepatah Sasak dikenal kalimat bijak *aiq meneng tunjung tilah empak bau* (biarkan airnya tetap bening, bunga bakung tetap indah, namun ikannya harus tetap tertangkap).

## 2. Sosial Ekonomi Masyarakat

Secara umum, sumber daya ekonomi masyarakat Lombok Selatan adalah dari pertanian, perkebunan, dan nelayan, sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada di Lombo Selatan. Dengan tiga sumber utama itulah masyarakat Lombok Selatan bertahan, menyambung hidup, dan mengembangkan diri dengan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sekitar; regional, nasional, dan internasional.

Seiring dengan volume dan kualitas komunikasi masyarakat dengan dunia luar, sumber ekonomi masyarakat perlahan mulai berkembang. Motivasi masyarakat yang kuat untuk keluar dari 'keterkungkungan' dan keterbatasan sumber daya alam mendorong masyarakat Lombok Selatan untuk ekspansi, dan mencari sumber ekonomi lain untuk bertahan dan mengembangkan hidup. 'Pergerakan' masyarakat Lombok Selatan ini berdampak pada meluasnya sumber pendapatan masyarakat, yang juga berpengaruh signifikan pada pola dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan; baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, lingkungan dan seterusnya.

Terbukanya lahan baru sebagai sumber pencaharian masyarakat ini menambah semarak 'gerak' ekonomi

masyarakat, dan terbukanya akses komunikasi masyarakat Lombok Selatan dengan masyarakat luar. Transmisi dan transformasi pengetahuan yang bersifat non-formal membuka wawasan masyarakat untuk berlaku kreatif-inovatif dalam melihat, menganalisis, menimbang, dan mengekspresikan kualitas diri, komunitas, kelompok, dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Beberapa sumber ekonomi, dan perkembangan sosial yang ada di Lombok Selatan karena adanya interaksi masyarakat Lombok Selatan ini adalah sebagai berikut :

1. Didirikan beberapa lembaga pendidikan, formal-nonformal. Di antara beberapa lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan lembaga sosial keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Nahdlatul Wathan (NW) sudah banyak dibangun yang kesemuanya adalah 'pemicu' bagi pengembangan dan penguatan masyarakat Lombok Selatan.
2. Sejak tahun 1980-an, wisata pantai di Lombok Selatan mulai dipromosikan dan dikomersialkan. Masyarakat yang dulu membangun komunikasi mengandalkan hasil laut, mulai bergeser untuk mengolah kreativitas laut mereka untuk diguhkan kepada para pelancong, yang kemudian menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya pariwisata Lombok, wilayah selatan juga dikembangkan secara lebih massive lagi. Yang semula hanya terfokus di wilayah Pantai Kuta, kini dikembangkan ke beberapa titik, yang secara alamiah juga memiliki nilai jual bagi para pelancong/wisatawan.
3. Kebijakan pemerintah yang mengisiasi pariwisata halal dan menjadikan Lombok sebagai *pilot project* juga menambah semarak 'gerak roda ekonomi' masyarakat. Proyek pengembangan fisik, baik transportasi dan akomodasi untuk mendukung percepatan dan perkembangan ekonomi

masyarakat di tingkat bawah semakin mempercepat dan menguatkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Lombok Selatan

4. Hadirnya lembaga swadaya masyarakat, lembaga ekonomi, dan keterlibatan pihak ketiga lainnya dalam pemberdayaan ekonomi sosial-ekonomi masyarakat juga faktor lain yang mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat.
5. Kehadiran wisatawan, baik dalam dan luar negeri, juga turut meramaikan 'peta' pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Lombok Selatan.

Dengan adanya kontak (hubungan) masyarakat Lombok Selatan dengan beragam pihak luar; dengan ragam sumber daya, ragam pengalaman, ragam budaya, dan ragam ilmu pengetahuan membentuk 'karakter' baru masyarakat Lombok Selatan. Akibat dari itu, pengetahuan masyarakat semakin banyak, yang kemudian membentuk sikap dan mental inovatif dan kreatif masyarakat. Oleh karena sumber ekonomi masyarakat pun semakin banyak. Kolaborasi budaya, komunikasi sosial, difusi sosial, dan lainnya mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dari masyarakat yang hanya bergantung pada alam, masyarakat Lombok selatan hari ini berkembang menjadi masyarakat yang bersahabat, dan mengelola alam. Dari penonton, secara perlahan masyarakat Selatan menjadi pemain. Dari konsumen, secara perlahan masyarakat Selatan akan menjadi produsen. Dengan demikian, masyarakat selatan mulai mengambil peran sebagai pelaku ekonomi dan penyumbang bagi sumber daya ekonomi pembangunan regional Nusa Tenggara Barat.

Di balik sukses masyarakat Selatan dalam percepatan pembangunan, juga masih menyisakan banyak hal, terutama ketika berkaitan dengan nilai dan budaya asli masyarakat yang mulai tercerabut dari induk semangnya. Dalam beberapa

hal, pengembangan pariwisata juga menyimpan beberapa masalah, yang kesemuanya jika tidak dikemas dengan baik akan menjadi bumerang di masa yang akan datang. Tentunya, yang dibutuhkan adalah komitmen dan kebersamaan masyarakat dan *stake holder* yang mengitarinya untuk membangun dan memberdayakan masyarakat secara utuh-komprehensif-holistis.

### **3. Pengembangan Pariwisata: Konflik Segitiga**

Suatu konflik memang tidak dapat dihindari sampai kehidupan manusia berakhir, namun kita masih berupaya untuk melakukan pengelolaan konflik agar tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif bagi bangsa ini terlebih negara ini memiliki SDA yang melimpah, maka disitulah terdapat kutukan Sumber Daya Alam yang dapat menimbulkan konflik, kekerasan, dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

Negara (pemerintah) memiliki hak mengeluarkan izin usaha pengelolaan bisnis pariwisata dan hak pengelolaan terhadap lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 3 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Pengelolaan. Negara dapat memberi dan mencabut hak pengelolaan atas tanah itu dan memberikannya kepada siapa yang dihendaki sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Akan tetapi persoalan hukum dan konflik pertanahan muncul ketika pemerintah tidak mampu menjadi pihak yang netral dalam menyelesaikan persoalan pertanahan dan terjadinya salah tafsir terhadap hak menguasai Negara. Ketika konflik pertanahan muncul antara pemilik modal dengan rakyat, maka ada kecenderungan Pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang lebih membela kepentingan pemodal atau investor daripada memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah

menguasai tanah tersebut berpuluh-puluh tahun sebagai petani.

Kejadian konflik yang terjadi masih didominasi oleh konflik antara warga dan pengembang (swasta), antara warga dan pemerintah, antara warga dan warga, antara warga dan BUMN, warga dan aparat, swasta dan swasta, pemerintah dan swasta, serta pemerintah dengan pemerintah.

Konflik lahan masih menjadi sekelumit masalah bagi pemerintah dari masa ke masa, dari periode ke periode. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sampai dengan akhir tahun 2017 telah tercatat sebanyak 659 kejadian konflik agraria yang melibatkan 652.738 KK. Jumlah korban yang tercatat sebanyak 590 jiwa dengan bentuk kekerasan berupa kriminalisasi, penganiayaan, tertembak dan tewas.<sup>41</sup>

Permasalahan sengketa lahan pada kasus-kasus tertentu adakalanya menimbulkan kesan bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang timbul akibat pertentangan antara si kuat vs si lemah atau si kaya vs si miskin, permasalahan ini merupakan permasalahan asimetris dalam konflik lahan.

Si kuat atau si kaya bisa saja merupakan perorangan atau kelompok atau institusi yang memiliki pengaruh dan kekuatan besar, sedangkan si lemah atau si miskin merupakan orang-orang sederhana yang selalu kalah dalam pengadilan melawan si kaya atau si kuat. Mungkin ada benarnya, atau memang sebenarnya seperti itu adanya.

Kasus-kasus yang terjadipun tetap berulang-ulang dengan permasalahan yang sama, padahal pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatur segala hal, ratusan perangkat peraturan dan perundang-undangan dikeluarkan. Ada yang menyalahkan aturan dan undang-

---

41

undang tersebut, ada yang menyalahkan pemerintah, ada pula yang menyalahkan masyarakat. Sepertinya ada baiknya pemerintah melakukan reframing, melalui faktor-faktor mendalam dan mendasar dari konflik-konflik yang terjadi.

Konflik lahan yang terjadi di berbagai belahan bumi ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Politik: keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu serta praktek-praktek penyelewengan dan politik korup;
2. Ekonomi: peningkatan harga tanah dan evolusi “pasar tanah”;
3. Sosio-ekonomi: marjinalisasi, distribusi kekuatan dan sumber daya yang tidak sama;
4. Sosio-budaya: tergerusnya struktur dan nilai sosial, penolakan dan ketidakpercayaan kepada institusi luar maupun dalam;
5. Demografi: pertumbuhan penduduk yang tinggi;
6. Hukum dan yuridis: undang-undang yang saling bertentangan, kurangnya sosialisasi, pluralisme hukum, tidak ada akses ke penegakan hukum bagi orang yang lemah atau miskin;
7. Administrasi: kurangnya komunikasi, kooperasi dan koordinasi, administrasi yang korup, kurangnya rasa tanggung jawab/akuntabilitas;
8. Psikologis: hilangnya identitas, keinginan balas dendam, penderitaan kolektif dan sebagainya.

Sepertinya apa yang dinyatakan tersebut ada benarnya, contoh kasus yang terjadi dapat ditemukan di wilayah pujung khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Konflik lahan muncul dari tiga sektor unggulan yakni pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Layaknya komoditas penting

lainnya, lahan telah menjadi komoditas yang sangat bernilai, ditambah lagi sektor pariwisata menjadi arah pengembangan di wilayah Kawasan ekonomi Khusus ke depan.

Menurut laporan Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat sendiri, selama tahun 2017 tercatat sebanyak 203 kasus telah dilaporkan masyarakat terkait substansi pertanahan di NTB. Belum lagi kasus-kasus yang tidak terdata atau tidak dilaporkan dikarenakan tekanan-tekanan dari si kuat atau si kaya kepada si lemah atau si miskin.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada dasarnya harus berpegang teguh pada pengelolaan lahan yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip etis pengelolaan SDA dengan tanpa mengabaikan efek negatif degradasi lingkungan dan dampak bagi si lemah atau si miskin yang terusir akibat penggusuran.

Terdengar begitu mudah, namun banyak yang kontra. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menyiapkan diri, pemerintah Daerah harus memiliki *Political Will* yang besar dan bersunggu-sungguh demi kemakmuran rakyat luas, aturan dan regulasi yang memperhatikan keberlanjutan sebuah pengembangan, serta implementasi yang efektif. Ketiga unsur tersebut menjadi sangat penting karena potensi konflik lahan dapat bersumber dari padanya, terlebih apabila merujuk dan membenarkan faktor-faktor penyebab yang telah disebutkan.

### **1. Akomodasi Kepentingan**

Politik akomodatif yang dilakukan pemerintah untuk ‘mendamaikan’ kepentingan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- Sosialisasi program. Sejak dibukanya Hotel Mandalika Beach dan dibukanya pelabuhan udara Internasional Lombok perkembangan pariwisata Lombok Selatan terus meningkat, meskipun sering pula mengalami fluktuasi

sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Dunia Pariwisata Nasional dan Internasional.

Pengembangan pariwisata, peningkatan ekonomi, kesempatan kerja, perubahan gaya hidup semuanya muncul bersamaan. Semuanya erat hubungannya dengan perubahan lingkungan fisik yang akan terjadi. Semua itu akan berakibat eksploitasi berlebihan terhadap keberadaan sumber daya fisik lingkungan. Sebagai sebuah pulau kecil, Lombok memang memiliki keterbatasan daya dukung, baik daya dukung fisik maupun daya dukung lingkungan secara keseluruhan, karena itu pengembangan pariwisata di Lombok selatan harus dikaji secara seksama agar keberlanjutannya dapat dilaksanakan.

Perlu disadari bahwa agama dan organisasi kemasyarakatan di Lombok selatan mempunyai hubungan yang erat dengan kelestarian lingkungan fisik, karena Agama Islam memberlakukan lingkungan dengan bijaksana, sehingga organisasi-organisasi kemasyarakatan merupakan pengelola lingkungan fisik dan menjaga serta melindunginya. Hal tersebut, akan menghindari stres lingkungan, sehingga daya dukungnya dapat dipertahankan. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dan desa adat dalam pengelolaan fisik lingkungan merupakan hal yang sangat potensial.

Masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pariwisata berkelanjutan, yaitu: a). Kegiatan kepariwisataan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat setempat, b). kegiatan kepariwisataan tersebut tidak merusak lingkungan, c). kegiatan kepariwisataan tersebut bertanggung-jawab secara sosial, dan d). kegiatan kepariwisataan tersebut tidak bertentangan dengan budaya setempat. Dari konsep tersebut diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa perkembangan kepariwisataan di di Lombok Selatan dengan objek wisatanya adalah Pantai Kuta, Pantai Selong Belanak, Pantai Mawun, Pantai Seger, merupakan suatu berkah bukan sebaliknya merupakan suatu

musibah. Dengan demikian, masyarakat selalu berupaya menjaga kelestariannya, keberlanjutannya, dan mencipta suasana yang aman dan kondusif.

Pariwisataalam berkelanjutan, di mana lingkungan alam yang menjadi inti dalam pengembangan dan pariwisata berkelanjutan, di mana masyarakat yang menjadi inti dalam pengelolaannya, sehingga tujuan yang ingin dicapai betul-betul murni dari hasil pemecahan masalah yang terjadi di lapangan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang policy melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok tengah, hendaknya rutin turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang *tourism* agar pemahaman dan keterampilan masyarakat meningkat tentang pengelolaan suatu objek wisata, sehingga masyarakat dapat berperan aktif di dalam pengembangan untuk menjaga keberlanjutan objek tersebut. Industri/investor seharusnya memprioritaskan masyarakat setempat untuk menjadi karyawan untuk hotel yang dibangun, di samping memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat juga kaitannya dengan masalah keamanan, karena masyarakat secara otomatis akan menjaga dan mengamankan kegiatan kepariwisataan tersebut dan segala pendukungnya.

Pengembangan suatu objek secara tidak terkendali mengakibatkan musibah terhadap objek itu sendiri dan musibah terhadap masyarakat sekitarnya. Meningkatkan peranan masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengelola. Dalam hal ini, masyarakat harus meningkatkan kualitas SDM-nya karena dalam mengelola suatu objek perlu pengetahuan dan keterampilan yang baik, sehingga arah dari objek tersebut jelas dan benar sesuai konsep pariwisata berkelanjutan. Memanfaatkan potensi dan keindahan alam serta budaya setempat. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam beserta

isinya adalah demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk ciptaan lainnya.

- Distribution of power

Salah satu ciri negara demokrasi, kedudukan rakyat sebagai pemilik pemerintahan. maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam hal ini rakyat ikut berperan aktif dalam pemerintahan serta memiliki kewenangan dalam melakukan kontrol sosial, bersama-sama menetapkan pendapatan, juga bersama-sama melahirkan peraturan daerah terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Konsekwensinya adalah pemerintah yang terbentuk harus berpihak pada rakyat dan berjuang demi kesejahteraan rakyat semata sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aliran dukungan rakyat kepada pemerintah semakin besar dan semakin dilegitimasi.

### **Dialektika Sosial dan Pengembangan Pariwisata**

Pariwisata ditengarai oleh ahli sebagai sektor yang bisa dimaksimalkan untuk pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Sektor pariwisata ini paling tidak menjawab beberapa hal penting terkait dengan kesempatan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>42</sup> Namun pada sisi lain, pembangunan pariwisata juga menyimpan masalah terkait 'identitas' lokal yang terabaikan (*neglected society*).<sup>43</sup> Ada beberapa hal yang menurut penulis yang menjadi catatan dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata dan identitas lokal, yaitu :

---

42 Derek Hall and Greg Richards, *Tourism and Sustainable Community*, (London: Routledge, 2000) n.d.

43 Stroma Cole, *Tourism, Culture and Development*, (London: Chanel View, 2008) n.d.

1. Belum adanya kesiapan sumber daya manusia masyarakat lokal untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Biasanya, pengembangan destinasi pariwisata dilakukan di daerah yang masih tertutup, dan dianggap eskotik oleh pengunjung. Dan biasanya daerah yang demikian itu adalah wilayah yang tidak dijamah oleh 'peradaban' secara baik. Termasuk wilayah Lombok Selatan, hingga hari ini masih menyimpan cerita sisa 'peradaban' masa lalu yang menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata.
2. Belum adanya kesiapan pemerintah secara utuh untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi dan penyiapan perangkat yang memungkinkan terjadinya pengembangan pariwisata. Dalam konteks pengembangan pariwisata Lombok Selatan tampak bahwa pembangunan bersifat sporadik, yang hampir semuanya terletak pada kebijakan penguasa. Sikap akomodatif pemerintah bersifat parsial dan periperial, yang terpisah dari konteks *sustainable development*.
3. Kebijakan sebagaimana dimaksud di atas lebih banyak menguntungkan pihak pengembang (pemilik modal) yang secara sumber daya lebih siap mengelola potensi yang seharusnya dikelola oleh masyarakat. Awal konfliknya sebenarnya ada pada titik ini. Ketika 'lahan' kehidupan masyarakat sudah mulai dialih fungsikan menjadi 'proyek pembangunan'.
4. Berkembang pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada. Hal ini melahirkan pola penyelesaian sengketa tanah yang didominasi oleh pola

pe-nyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi.

5. Nilai budaya dan tradisi yang dianut oleh masyarakat lokal yang bertentangan dengan nilai yang masuk ke dalam wilayah mereka. Dengan terbukanya wilayah, maka resiko terbesar bagi masyarakat lokal adalah pergeseran, atau mungkin gesekan nilai tradisi dan budaya masyarakat akibat adanya dialog dengan masyarakat luar. Masyarakat Lombok Selatan sangat kuat memegang tradisi yang diwariskan nenek moyang, yang bersumber dari agama dan budaya Sasak, harus berhadapan dengan budaya Eropa yang serba 'terbuka'. *Cultural shock* mungkin saja terjadi, yang juga perlu *cultural therapy* dengan berbagai pendekatan, sesuai dengan ragam masalah yang muncul dalam kontek pengembangan pariwisata yang ada di wilayah mereka.

Posisi pemerintah memang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tindakan yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan pariwisata di satu daerah. Akan tetapi acapkali pemerintah daerah luput memahami dan mengkaji norma hukum, serta pemerintah kurang memahami persoalan yang mendasar pada masyarakat yang menguasai lahan.

Pemerintah Daerah disisi lain dengan begitu mudahnya memberikan izin usaha membangun hotel dan lain-lain pada lokasi yang dikuasai dan ditempati masyarakat kepada perusahaan tertentu tanpa memperhatikan eksistensi masyarakat setempat, baik masyarakat yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah maupun masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Pemberian surat-surat dan bukti-bukti formal kepada pengusaha diatas tanah yang digarap masyarakat dalam dimensi prulalisme hukum akan melemahkan posisi masyarakat.

Paling tidak dalam realitas pengembangan kawasan wisata Lombok Selatan telah tercatat beberapa tragedi besar sebagai berikut :

1. Penolakan masyarakat atas penguasaan lahan oleh PT LTDC (*Lombok Tourism Development Corporation*) dan PT. BTDC (*Bali Tourism Development Centre*). Dalam kasus ini keterlibatan pemerintah sangat dominan. Baik masyarakat maupun pengembang sama-sama 'mengantongi' hal pengelolaan atas lahan yang disengketakan.
2. Penolakan masyarakat atas pembebasan lahan untuk akses bandara Lombok. Sengketa lahan dalam kasus ini adalah 'pintu masuk' untuk mempertahankan 'identitas lokal' masyarakat selatan.<sup>44</sup> Artinya masyarakat belum siap untuk melepas lahan, karena mereka belum siap betul untuk menerima perubahan.
3. Kasus perampokan dan tindak kekerasan terhadap beberapa pengunjung (*tourist*) juga harus dilihat sebagai tindakan perlawanan, bukan hanya sekedar perbuatan melanggar hukum (perikalu kriminal).

Pengembangan kawasan eskotik Lombok Selatan masih menyimpan peluang yang besar. Percepatan yang harus dilakukan adalah pengembangan sumber daya manusia masyarakat. Pada satu sisi, masyarakat memahami makna pembangunan bagi mereka. Namun pada sisi lain, masyarakat juga ingin sebagai 'pemain' dalam proses pengembangan pariwisata daerah mereka.

Yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan sumber daya, sarana prasarana, keterlibatan masyarakat, keberpihakan pemerintah, dan partisipasi pengembang dalam menjaga nilai, tradisi, dan budaya lokal, serta mendialogkannya dengan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Lalu Wahyudi, masyarakat desa Selong Belanak tanggal 6 Agustus 2019.

pengembangan pariwisata. Dalam kata lain sumber daya (*power*) yang sudah ada pada masyarakat adalah kekuatan lain yang mungkin 'dijual' sebagai daya tarik pelancong untuk datang ke Lombok. Yang dibutuhkan adalah sinergi, dialog, keberpihakan, dan kebersamaan dalam pengembangan potensi wisata yang ada dengan melibatkan dan menyertakan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan pembangunan. *Participatory* dengan pola *empowerment* adalah pendekatan yang logis, dan sangat mungkin dikembangkan untuk pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryan Torrido, 'Dampak Sosial Ekonomi Budaya Pariwisata Parangtritis', *Tesis*, UGM Yogyakarta, 2005
- Baiq Elbadriati, 'Potensi Ekonomi Perempuan dalam Bidang Pariwisata (Studi Kasus Di Pantai Kuta Lombok Tengah)', *Laporan Penelitian*, IAIN Mataram, 2017.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 150. Satrios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Macmillan Education Australia Pty.Ltd., 1993)
- Deliarnov, *Politik Ekonomi*, (Jakarta, Erlangga; 2006)
- F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta, Gramedia: 2007)
- Frans Magnis-Suseno, 'Kata Pengantar' dalam buku *Jurgen Habermas, Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, terj. Hasan Basari (Jakarta, LP3ES:1990)
- Fransisco Budi Hardiman, "Menyimak Filsafat Politik Habermas: Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto", dalam *Basis*, No. 1112, November-Desember 2004
- Fransisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta, Kanisius: 1996)
- Hadari Nawawi, *Metode Buku Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 72
- Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester, The Islamic Foundation; 1991)
- <https://kicknews.today/2018/09/06/polemik-nama-bandara-lombok-diganti-zam-beserta-alasannya/> diunduh tanggal 11 September 2018.

- I ketut Setiawan, “Dampak Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Pemanfaatan Pura Tirta Empul Sebagai daya Tarik Wisata Budaya”, *Jurnal Arkeologi*, No. 2 Vol. 1 2011.
- Jeetesh Kumar, dkk. ‘Positive versus Negative Economic Impact of Tourism Development: A Review of Economy Impact Studies’, dalam *Development of The New Tourism Paradigm in Asia Pacific Region*, Annual Proceeding, Kuala Lumpur, May 2015
- Joseph A. Schumpeter, *The Theory of Economic Development An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and Bussiness Cicle*, (New Jersey: The State University of New Jersey: 2016)
- Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press 2004)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989)
- M. Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shari’ah*, (London-Washington, The International Institute of Islamic Thought; 2008).
- Made Suyana Utama, ‘Pengaruh Pariwisata Terhadap Kinerja Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali’, *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2006.
- Muhammad Akram Khan, *Islamic Finance and Finance: A Glosary*, (London, Routledge; 2003)
- Charles Tripp, *Islam the Moral Econoy The Chalenge of Capitalism*, (Amerika, Camridge University Press; 2006)
- Muhammad Husni Muaz, *Anatomi Sistem Sosial Pendekatan Sistem*, (Mataram, Institut Pembelajaran Gelar Hidup: 2014).
- Nemanja Tomic, ‘Factors Affecting City Destination Choice

Among Young People in Serbia', dalam [https://www.researchgate.net/publication/281865994\\_Journal\\_of\\_tourism\\_-\\_studies\\_and\\_research\\_in\\_tourism](https://www.researchgate.net/publication/281865994_Journal_of_tourism_-_studies_and_research_in_tourism) [accessed Sep 26 2018]

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)

Novita Rifaul Kirom dkk, 'Faktor-faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Wisatawan', *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No. 3 Maret 2016

Peraturan Gubernur NTB No. 51 tahun 2015 tentang Wisata Halal.

Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (Canada: A Wiley-Interscience Publication John Wiley and Sons, 1975)

Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Cetakan Keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

Santosa Irfan, 'Jurgen Hubermas: Problem Dialektika Ilmu Sosial', dalam *Komunika*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni, 2009

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983)

Sumiman Udu, 'Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Pengembangan Badan Otorita Pariwisata Wkatobi', makalah disampaikan dalam Konfrensi Internasional Bahasa, Budaya, dan Sastra Indonesia, 17-19 September 2017

Suyahmo, 'Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya dengan Pembukaan UUD 1945', dalam *Humaniora*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007

Walt Whitman Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Comunist Manifesto*, (Cambridge, Cambridge University Press; 1990).

Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980)



## FINTECH & MUSLIM KOTA MATARAM

---

Dewi Sartika Nasution

**Kata Kunci** : *Perilaku konsumen, financial technology, Persepsi*

### A. Pendahuluan

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi di semua sektor yang pesat khususnya ekonomi digital telah mengubah perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan seperti pada aktivitas ekonomi jual beli secara online (*e-commerce*), interaksi sosial (*facebook, whatsapp*), *e-book*, koran elektronik, pemesanan layanan transportasi (taksi ataupun ojek), layanan pendukung pariwisata dan keuangan. Disadari ataupun tidak teknologi digital telah memobilisasi banyak perubahan di masyarakat dan ekonomi global.

Ekonomi yang berbasis teknologi atau sering disebut dengan ekonomi digital didukung baik oleh lembaga jasa keuangan yang telah ada (perbankan, pasar modal, asuransi dan perusahaan pembayaran) maupun oleh perusahaan-perusahaan pemula yang memanfaatkan teknologi dengan berbagai inovasi untuk menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*).

Geliat bisnis teknologi keuangan (*fintech*) telah mengubah sistem keuangan, mulai dari pembayaran, pembiayaan, perbankan, manajemen aset, deteksi fraud hingga di tahapan regulasi. Data di Indonesia menunjukkan fintech merupakan sektor bisnis dengan jumlah investasi terbanyak kedua di Indonesia pada tahun 2016 setelah *e-commerce*.

Secara perlahan namun pasti fintech yang berkembang saat ini sudah merambah masuk ke sistem keuangan syariah. Perkembangan fintech berbasis syariah dalam beberapa tahun terakhir semakin pesat. Perusahaan fintech yang pertama kali mendapatkan sertifikat syariah adalah *Beehive* di Dubai pada tahun 2014. Platform yang disediakan adalah pembiayaan murah untuk UMKM yang menggunakan pendekatan “*peer to peer lending marketplace*”. Pada tahun 2016 Kapital Boost (perusahaan fintech di Singapura) mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari *Financial Shariah Advisory & Consultancy* (FSAC). Salah satu perusahaan fintech syariah di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi MUI adalah *Paytren*.

Hingga awal 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 600 perusahaan peminjaman berbasis teknologi (Fintech) yang beroperasi di Indonesia.<sup>45</sup> Masyarakat cenderung menyukai layanan Fintech karena lebih mudah dan fleksibel sehingga dengan adanya fintech berpeluang meluaskan akses masyarakat terhadap institusi keuangan. Daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke perbankan konvensional menjadi lokasi yang menjanjikan bagi pelaku usaha Fintech. Apalagi bila daerah tersebut sudah memiliki jaringan internet yang dapat diandalkan, yang merupakan syarat utama layanan Fintech.

NTB merupakan daerah yang sangat potensial untuk masuknya fintech sebagai salah satu daerah dengan karakteristik sinyal yang kuat dan memiliki rasio kantor bank yang tinggi dimana satu kantor cabang bank melayani lebih banyak nasabah. Selain itu produk fintech jenis pembayaran seperti *tcash*, *ovo*, *go pay*, *paytren* sudah tersedia di outlet-outlet pertokoan yang ada di Mataram. Berdasarkan

---

45 Fakhri Kurniawan, *Provinsi Potensial untuk Pengembangan Bisnis Fintech di Indonesia* diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datablog/2017/10/27/provinsi-potensial-untuk-pengembangan-bisnis-fintech-di-indonesia>

observasi di lapangan banyak dijumpai masyarakat yang sudah menggunakan beberapa fintech seperti tCash, OVO dan GoPay dalam kegiatan harian mereka. Produk fintech khususnya untuk transaksi pembayaran digunakan untuk memesan makanan melalui gojek, membayar jasa Grab dan tidak sedikit yang menggukannya untuk mencari potongan harga pada outlet-outlet yang ada di pusat perbelanjaan (mall).

Melihat fenomena perkembangan penggunaan produk fintech pada masyarakat di Kota Mataram yang begitu cepat maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji perilaku konsumen muslim di Kota Mataram dalam menggunakan fintech. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, penilaian/persepsi dan perilaku masyarakat muslim Kota Mataram terhadap konsep dan produk fintech; untuk menguji adakah pengaruh faktor pribadi, lingkungan sosial, budaya, pendidikan dan norma keagamaan terhadap pengetahuan dan perspsi masyarakat muslim kota Mataram terkait fintech, untuk menguji adakah pengaruh yang signifikan antara pengetahuan tentang konsep fintech dengan persepsi masyarakat terkait fintech, pengaruh pengethuan dengan perilaku dan pengaruh persepsi terhadap perilaku masyarakat muslim kota Mataram dalam menggunakan fintech.

## **B. Kajian Teori**

Kajian mengenai fintech telah banyak dilakukan di berbagai negara. Moh.Siri, Fitriyani dan Asti Herlina melakukan penelitian mengenai salah satu perusahaan fintech syariah yang ada di Indonesia yaitu Paytren. Hasil dari analisis sikap pengguna Paytren menggunakan *technology acceptance* model pada 100 sampel responden di Bandung menunjukkan memiliki pengaruh yang kuat pada sikap terhadap penggunaan

Paytren. Untuk variabel persepsi kemudahan berpengaruh lemah terhadap sikap penggunaan Paytren.<sup>46</sup>

Kajian mengenai fintech juga dilakukan oleh Lee Sang Jung. Peneliti tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana sikap dan kepuasan dalam meningkatkan niat pengguna untuk tetap menggunakan fintech. Konten penelitian yang digunakan untuk melakukan pembuktian hipotesa terkait dengan hubungan antara *self efficacy*, inovasi, pengaruh sosial, kompleksitas, bahaya yang dapat ditimbulkan, sikap, kepuasan terhadap niat menggunakan ulang fintech. Data diperoleh dari 250 responden yang ada di Korea Selatan. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan kompleksitas secara statistik tidak signifikan terhadap sikap, inovasi dan bahaya yang dirasakan tidak mempengaruhi kepuasan.<sup>47</sup>

Jurnal yang membahas mengenai *Fintech: Ecosystem and Business Model* yang ditulis oleh In Lee membahas mengenai 6 model bisnis fintech yaitu pembayaran, manajemen aset/kekayaan, *crowdfunding*, pembiayaan, pasar modal dan layanan asuransi. Artikel ini mengidentifikasi 5 elemen dari fintech ekosistem yaitu (1) *fintech startups* seperti pembayaran, *wealth management*, pembiayaan, *crowdfunding*, pasar modal, dan perusahaan asuransi fintech (2) pengembangan teknologi seperti analisis data yang besar, *cloud computing*, *cryptocurrency* and *social media developers* (3) pemerintah seperti regulasi keuangan (4) konsumen keuangan baik individu ataupun organisasi (5) institusi keuangan tradisional seperti

---

46 Moh. Siri, Fitriyani, Asti Herlina, (2017). *Analisis Sikap Pengguna Paytren Menggunakan Technology Acceptance model*, Jurnal Informatika, 4 (1), 66-75.

47 Lee-Sang Jung.(2016).*The Relationship Between Attitude and Satisfaction for Improving Continue User Intention in Fintech*, International Journal of IT-Based Business Strategy Management, 2 (1), 33-38.

bank tradisional, perusahaan asuransi, perusahaan broker saham dan lainnya.<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Yeow Pooi Mun, Haliyana Khalid dan Devika Nadarajah mengenai “*Millenials’ Perception on Mobile Payment Services in Malaysia*”.<sup>49</sup> Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen terutama di kalangan milenial untuk menggunakan layanan *mobile payment* di Malaysia yang mendorong pengembangan *mobile payment* sebagai metode pembayaran alternatif yang inovatif. Untuk meningkatkan prediksi akan niat untuk menggunakan layanan pembayaran seluler di Malaysia penelitian ini menggunakan *The Extended Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai model awal dari penelitian dan mengembangkannya dengan konstruksi tambahan lainnya. Model penelitian terdiri dari empat konstruksi seperti kegunaan yang dirasakan, persepsi kemudahan penggunaan, pengaruh sosial dan kredibilitas yang dirasakan. *Self-administered questionnaire* digunakan untuk pengumpulan data dari 300 sampel di Semenanjung Malaysia. Temuan menunjukkan bahwa semua faktor yang disarankan memiliki dampak yang signifikan mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan layanan pembayaran seluler di Malaysia dengan konstruksi kegunaan yang dirasakan terbukti menjadi determinan terkuat.

Penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) oleh Tri Inda Fadhila Rahma bertujuan untuk untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan Fintech.<sup>50</sup>

---

48 In Lee. (2016). Fintech : Ecosystem and Business Models, *Advance Science and Technology Letters*, 142, 57-62.

49 Yeow Pooi Mun, Haliyana Khalid dan Devika Nadarajah. (2017). *Millenials’ Perception on Mobile Payment Services in Malaysia*, *Science Direct - Procedia Computer Science*, 124, 397-404

50 Tri Inda Fadhila Rahma. (2018). *Persepsi Masyarakat Kota Medan*

Informan dalam penelitiannya, yaitu masyarakat Kota Medan yang menggunakan ataupun tidak menggunakan fintech sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *indepth interview*. Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang berguna untuk memberikan fakta dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penggunaan fintech meliputi sikap, minat, pemahaman, motivasi, dan harapan. Dimana sikap masyarakat terhadap penggunaan fintech, memberikan dukungan kepada kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat, sedangkan minat masyarakat untuk menggunakan fintech sudah terbukti dari hasil wawancara 9 dari 10 responden sudah berminat menggunakannya. Masyarakat sudah begitu memahami manfaat dan penggunaan fintech karena penggunaan fintech lebih efisien dan efektif dibandingkan jasa keuangan lainnya sehingga masyarakat termotivasi untuk menggunakan fintech. Harapan masyarakat kepada penyelenggara fintech agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kemudahan atau kepraktisan dalam menggunakan layanan, sehingga masyarakat yang kurang memahami teknologi dapat menggunakannya dengan mudah.

Penelitian lain terkait fintech jenis transaksi pembayaran dilakukan oleh Changsu Kim dan Mirsobit Mirusmonov A dan In Lee.<sup>51</sup> Penelitian dengan judul “*An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment*” meninjau literatur yang relevan mengenai layanan pembayaran seluler, menganalisis dampak karakteristik sistem m-payment dan

---

*Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech)*, At-Tawassuth, III (1), 642 – 661.

51 Changsu Kim, Mirsobit Mirusmonov.A, In Lee,. (2009). *An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. Computer of Human Behaviour*, 1-13, diakses dari doi:10.1016/j.chb.2009.10.013

faktor-faktor pengguna-sentris pada penggunaan m-payment. Untuk menganalisis perilaku pengguna m-payment, penelitian ini mengusulkan model penelitian m-payment yang terdiri dari dua faktor yang berpusat pada pengguna (pengetahuan pribadi dan pengetahuan m-payment) dan empat karakteristik sistem m-payment (mobilitas, *reachability*, kompatibilitas, dan kenyamanan). Penelitian ini mengevaluasi model yang diusulkan secara empiris, menerapkan data survei yang dikumpulkan dari pengguna m-payment mengenai persepsi mereka tentang *mobile payment*. Penelitian ini juga berusaha mengkategorikan pengguna m-payment dan menggambarkan faktor-faktor yang berbeda untuk kedua jenis pengadopsi yang mempengaruhi niat mereka untuk menggunakan m-payment. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel inovasi pribadi, mobilitas dan kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap variabel kemudahan. Variabel kesesuaian tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan kemudahan. Pengetahuan produk berpengaruh signifikan terhadap variabel kemudahan. Persepsi kemudahan dan manfaat berpengaruh signifikan terhadap niat penggunaan.

### C. Teknologi Keuangan

Teknologi keuangan mengacu pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan teknologi IT. Teknologi keuangan yang sering disebut dengan FinTech merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur jasa keuangan yang mengubah model bisnis dan mengurangi “*barrier to entry...*”. FinTech merujuk pada layanan yang menyediakan kenyamanan dan kemudahan kepada pengguna dengan mencangkok dan menggunakan teknologi pada mobile phone yang ada ke layanan keuangan.<sup>52</sup>

*National Digital Research Centre* di Dublin, Irlandia mendefinisikan *financial technology* atau *fintech* sebagai:

---

52 Lee-Sang Jung, *The Relationship Between...*, h. 34.

“*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, perusahaan FinTech dapat menasar segment perusahaan (B2B) maupun ritel (B2C). Tujuan FinTech adalah untuk memudahkan masyarakat mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan meningkatkan literasi keuangan.

Terdapat berbagai macam jenis FinTech di Indonesia antara lain:<sup>53</sup>

1. *Payment Channel/System*, merupakan layanan elektronik yang menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran (e-money, Bitcoin).
2. *Digital banking*, merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah (ATM, ED, *internet banking*, *mobile banking*, *sms banking*, *phone banking* dan *video banking*, *branchless banking*).
3. Asuransi online / digital, merupakan layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital seperti memanfaatkan *mobile application* dan web portal untuk menawarkan produk, menerbitkan polis, menerima laporan klaim, jasa perbandingan premi (*digital consultant*) keagenan (*digital marketer*).
4. *Peer to Peer (P2P) lending* adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman dengan menggunakan website.

---

<sup>53</sup> Agus E Siregar, *Financial Technology Tren Bisnis Keuangan ke Depan*, diakses dari <http://infobanknews.com/financial-technology-tren-bisnis-keuangan-ke-depan/>

5. *Crowdfunding*, adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website / teknologi digital lain untuk tujuan investasi maupun sosial.

#### **D. Perilaku Konsumen**

Menurut Hawkins dalam Sudarmiatin, perilaku konsumen adalah studi terhadap individu, kelompok atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan dan menentukan produk, servis, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak proses tersebut pada konsumen atau masyarakat.<sup>54</sup>

Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh dan menggunakan barang-barang serta jasa melalui proses pertukaran atau pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan yang menentukan tindakan-tindakan tersebut.<sup>55</sup>

Dimensi perilaku konsumen yang terkait dengan barang, jasa, pengalaman dan ide yaitu (1) bagaimana ia mendapatkannya. Untuk mendapatkannya konsumen akan melakukan hal-hal seperti menemukan, menerima, memproduksi, memperoleh warisan dan membeli (2) bagaimana ia mengkonsumsinya. Untuk itu ia akan melakukan hal-hal seperti memakan, meminum, memakai, menggunakan, membaca, menonton, memiliki, mengendarai, menempati, merawat (3) bagaimana ia menghilangkan sisa konsumsi atau bagian yang tidak dikonsumsinya, seperti dengan cara memberikan, membuang, mendaur ulang, menjual kembali.<sup>56</sup>

---

54 Sudarmiatin.(2009). *Model Perilaku Konsumen dalam Perspektif Teori dan empiris pada jasa Pariwisata*, Jurnal Ekonomi Bisnis, 14 (1), 2.

55 Sri Wigati.(2011). *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Maliyah, 01 (01), 26.

56 Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen...*, h.6-7

Beberapa teori yang berkaitan dalam menganalisa perilaku konsumen terdapat diantaranya teori ekonomi, dimana perilaku konsumen tidak terlepas kaitannya dengan tingkat kepuasan (utilitas) konsumen sehingga perubahan pilihan dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan suatu produk/jasa dipengaruhi oleh perubahan tingkat kepuasa yang diberikan oleh produk/jasa tersebut. Merujuk dari teori ekonomi diasumsikan konsumen bersifat rasional.

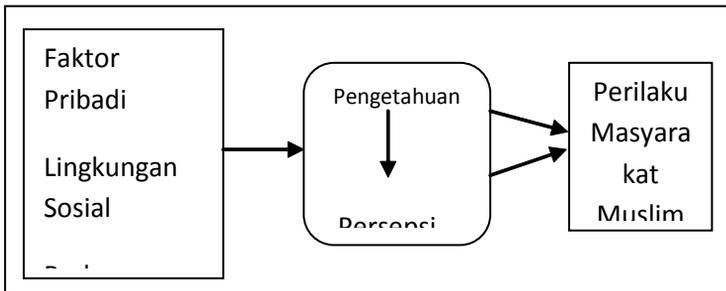
Teori psikologis, beberapa ahli beranggapan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dorongan psikologis. Teori pembelajaran (oleh Pavlov, Skinner & Hull) menyatakan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari akumulasi pengalaman selama hidupnya. Konsumen akan belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain terkait produk dan jasa. Teori psikologis lainnya adalah teori motivasi oleh Freud dan Maslow, dimana kedua teori tersebut bertolak belakang. Freud menyatakan bahwa seseorang tidak bisa memahami motivasi yang mendorong perilakunya secara pasti sedangkan Maslow mengatakan bahwa motivasi seseorang dapat dihubungkan dengan kebutuhannya.

Teori sosiologis, menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, seperti keluarga dan kelompok-kelompok sosial dimana seseorang itu menjadi anggota. Pada dasarnya, seseorang akan berusaha mengharmoniskan perilakunya dengan apa yang dianggap pantas oleh lingkungan sosialnya. Dengan demikian seseorang akan membeli atau menggunakan produk/jasa jika produk/jasa tersebut diterima oleh kelompoknya.

Teori anthropologis, memandang bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, namun pada konteks yang lebih luas. Termasuk di dalam kelompok yang lebih besar ini adalah kebudayaan, subkultur, dan kelas sosial.

## E. Hipotesis dan Model Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini melibatkan variabel pengetahuan terhadap fintech, persepsi akan fintech, dan perilaku dalam menggunakan fintech. Sedangkan untuk hipotesis variabel pendidikan, Norma religius dan lingkungan digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi atau menjelaskan tinggi rendahnya variabel pengetahuan dan persepsi.



## F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan dilakukan di kota Mataram dengan menetapkan responden terbatas hanya masyarakat muslim. Berdasarkan sifat permasalahannya, penelitian ini tergolongkan ke dalam jenis penelitian asosiatif korelasional/ sebab akibat. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat muslim Kota Mataram dengan usia diantara 15-49 tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kota Mataram dengan usia diantara 15-49 tahun sebanyak 266.602 jiwa.<sup>57</sup> Berdasarkan rumus Slovin dengan perhitungan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir adalah 10 % atau 0,1, diperoleh jumlah sampel minimal 99,9 responden. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 105 responden.

---

<sup>57</sup> BPS Kota Mataram, Jumlah Penduduk Kota Mataram Menurut Jenis Kelamin dan kelompok Umur 2015, diakses dari <https://mataramkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/279>

Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Skala pengukuran variabel menggunakan skala likert lima poin, 1 bermakna sangat tidak setuju sampai dengan 5 bermakna sangat setuju. Analisis validitas butir kuesioner dilakukan dengan melihat validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi divalidasi oleh ahli. Instrumen yang dibuat dikonstruksikan dengan aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu dan dikonsultasikan kepada para ahli. Penilaian berdasarkan ahli untuk instrumen kuesioner pada penelitian ini adalah sangat baik. Hasil perhitungan menghasilkan angka 52 sehingga termasuk dalam kategori  $48 < X$ . Ini menunjukkan kuesioner tersebut valid dan dapat mewakili penilaian terhadap Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram dalam menggunakan Fintech. Sedangkan validitas konstruk dilakukan dengan uji coba instrumen pada 30 sampel kemudian mengkorelasikan skor tiap butir instrument dengan skor total instrument untuk masing-masing variabel dengan menggunakan korelasi *product moment*. Uji validitas konstruk ini dilakukan dengan menggunakan excel. Hasil olahan data menunjukkan semua butir soal menunjukkan nilai  $r$  hitung  $> 0.3$  atau korelasi masing-masing butir soal dengan skor total adalah diatas nilai  $r$  kritis 0,3.<sup>58</sup> Ini berarti instrumen dapat digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan mencari nilai Cronbach Alpha. Semua variabel dengan butir pertanyaannya menunjukkan nilai alpha lebih dari 0.60. Ini menunjukkan data reliabel.

### G. Uji Kelayakan data

*Uji normalitas.* Berdasarkan hasil uji *chi-square*, hasil olahan data menunjukkan data berdistribusi normal. Ini ditandai dengan melihat nilai  $p > 0,05$ . Masing-masing variabel memiliki nilai *chi square* lebih dari syarat ditunjukkan. Variabel

---

<sup>58</sup> Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, h. 178-179.

pengetahuan dengan nilai Chi-square 0.994, faktor pribadi 0.997, lingkungan sosial 0.955, pendidikan 0.999, budaya 0.995, norma religi 0.978, persepsi 0.992, perilaku 0.997.

*Uji multikolinieritas.* Multikolinieritas dilihat berdasarkan nilai VIF  $< 5$ . Berdasarkan data yang telah diolah menunjukkan bahwa tidak ada interkorelasi / kolinearitas antar variabel bebas yaitu pengetahuan dan persepsi karena nilai VIF untuk keduanya adalah  $1 < 5$ . Untuk multikolinieritas variabel bebas terhadap pengetahuan masing masing yaitu pendidikan (1,263), faktor pribadi (1,351), lingkungan sosial (1,7), budaya (1,274) dan norma religius (1,295) dan untuk multikolinearitas variabel bebas terhadap persepsi adalah pendidikan (1,263), faktor pribadi (1,351), lingkungan sosial (1,7), budaya (1,274) dan norma religius (1,295). Untuk multikolinearitas variabel pengetahuan dan persepsi terhadap perilaku 1.368. Berdasarkan olahan data diatas menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas pada masing masing variabel bebas yang ditunjukkan dengan Nilai VIF semua variabel  $<$  dari 5.

*Uji autokorelasi.* Untuk uji autokorelasi dengan SPSS adalah dengan menggunakan uji durbin Watson dan nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria. Nilai durbin Watson adalah 1,527. Nilai ini berada pada rentang mendekati Tidak ada autokorelasi. Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi untuk variabel pribadi, lingkungan social, pendidikan, budaya dan norma religious terhadap persepsi.

*Uji Heteroskedastisitas.* Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dilakukan uji grafik dengan menggunakan SPSS, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar pada scatterplot. Hasil uji grafik dengan melihat scatterplot menunjukkan bahwa tidak ada terbentuk pola yg jelas ataupun pola tertentu sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

## H. Pembahasan

### 1. Pengetahuan masyarakat terkait fintech

Pengetahuan masyarakat muslim kota Mataram terhadap fintech diukur melalui sejumlah indikator. Indikator dimaksud adalah wawasan tentang produk (konsep, manfaat, keamanan, penggalian informasi produk fintech syariah/halal); wawasan tentang pembelian (pengetahuan tentang perusahaan fintech, dimana mencari fintech, pemilihan produk fintech yang akan digunakan, pengetahuan kapan fintech akan digunakan dan startup fintech apa yang akan dipilih); dan cara penggunaan/ pemakaian (cara menggunakan/ mengakses fintech).

Jawaban responden terkait 17 pernyataan yang dikembangkan dari 3 indikator pengetahuan akan fintech menyebar antara rentang tidak mengetahui dan sangat mengetahui. 50% dari responden memberikan jawaban mengetahui mengenai konsep fintech, kemudahan menggunakan fintech, uang elektronik, teknologi keuangan pada perbankan, fintech pada produk asuransi, resiko menggunakan fintech, produk fintech untuk transaksi, manfaat fintech, kapan waktu menggunakan fintech dan cara pemakaian fintech. Sebaran jawaban lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar masyarakat muslim kota Mataram mengenai fintech masih berada di tahap rata-rata mengetahui. Tingkat pengetahuan masyarakat muslim kota Mataram dapat dihitung melalui suatu indeks pengetahuan atas fintech yang dibuat dalam rentang 5 (dimulai dari tingkat kualitas “sangat tidak tahu” dengan skor 1 hingga ke level “sangat mengetahui” dengan skor 5). Hasil analisis 3,77 menunjukkan tingkat kualitas “tinggi”, dengan pengertian bahwa tingkat pengetahuan masyarakat muslim kota Mataram terkait fintech adalah tinggi.

## 2. Tingkat Pengetahuan Mengenai Fintech Pada Setiap Karakteristik Demografik Responden

Berdasarkan hasil pengujian dengan statistik F diketahui bahwa tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan mengenai fintech antara jenis kelamin laki laki dan perempuan, antara karakteristik usia yang berbeda, antara responden yang memiliki besar pengeluaran yang berbeda, antara responden dengan pekerjaan berbeda dan latar belakang pendidikan berbeda pada signifikan alpa 5%.

Meskipun tidak jauh berbeda data yang terkumpul mengenai tingkat pengetahuan responden terhadap fintech menurut jenis kelamin, namun terdapat kecendrungan bahwa responden laki-laki mempunyai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi terhadap fintech dibandingkan responden perempuan. Hal ini dilihat pada mean skor responden laki-laki sebesar 64.2963 yang berada pada tingkat “sangat tinggi” sedangkan nilai mean skor responden perempuan yaitu 64,0256 berada dibawah nilai mean skor laki-laki. Walaupun demikian kedua masih masuk ke dalam level indeks “sangat tinggi”. Ini menunjukkan bahwa responden laki-laki mempunyai tingkat pengetahuan yang relatif homogen dibanding perempuan dalam hal pengetahuan akan fintech. Hal ini diasumsikan bahwa secara umum responden laki-laki lebih banyak berinteraksi dengan fintech sehingga wajar jika mereka mempunyai tingkat pengetahuan lebih tinggi dibanding perempuan.

Meskipun secara umum tingkat pengetahuan terhadap fintech pada setiap kelompok responden dapat dikatakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena semua berada pada skala indeks tinggi (3,41 – 4.20), namun jika diperhatikan lebih seksama terdapat trend peningkatan yang linear antara pengetahuan responden dengan peningkatan tingkat pendidikan dari jenjang SLTA ke jenjang pasca sarjana. Responden dengan tingkat pendidikan pasca sarjana

mempunyai nilai mean skor tertinggi yakni 66,3571 dibanding responden pada tingkat pendidikan lainnya. Kemudian diikuti dengan latar pendidikan SLTP yang mencapai skor 64,40. Responden pada jenjang pendidikan sarjana memperoleh skor 63,68 dan SLTA memperoleh skor 62,46. Dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat pengetahuan responden terhadap konsep dasar fintech berdasarkan usia berada dalam rentang kualitas sangat tinggi yaitu dengan pencapaian indeks diatas rentang 4,5 – 5 berarti tingkat pengetahuan mereka sangat tinggi. Dengan kata lain pengetahuan responden pada usia yang berbeda mempunyai tingkat pengetahuan atas fintech yang sangat memadai. Responden dengan usia 31-50 tahun mempunyai tingkat pengetahuan dengan nilai mean skor 65,1622 diikuti dengan responden berusia 23-30 tahun sebesar 63,5926 yang berbeda tipis dengan responden berusia 15-22 tahun dengan nilai mean skor 63,4634.

### **3. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Fintech**

Persepsi responden terhadap fintech adalah bagaimana mereka memandang penting penggunaan fintech. Dalam penelitian ini persepsi diukur menggunakan beberapa indikator meliputi persepsi kemanfaatan, persepsi resiko dan persepsi kegunaan yang jika dijabarkan lagi menjadi penilaian tentang pentingnya fintech dalam kehidupan harian, harapan/ keinginan untuk dapat menggunakan/mengakses produk, keyakinan memilih produk dan layanan (penilaian) fintech yg akan digunakan, pandangan mengenai penting/tidaknya sertifikasi halal pada produk, kemudahan dan kenyamanan penggunaan produk, rasa aman menggunakan fintech (seperti kamanan data konsumen dari *cyber crime*), tanggapan tentang pentingnya lembaga resmi yg memberikan regulasi & pengawasan.

Persepsi masyarakat muslim terhadap fintech adalah sangat positif berada pada rentang jawaban setuju hingga

sangat setuju. Mean skor berada pada range 3,42- 4,20. Ini menunjukkan berdasarkan kualitas indeks rentang 4 hingga 5, persepsi responden menunjukkan pada level positif. Dari indikator ini menunjukkan adanya harapan (keinginan) yang tinggi dari masyarakat muslim untuk menggunakan fintech. Dengan kata lain mayoritas responden menunjukkan harapan (keinginan) yang sangat tinggi agar akses untuk menggunakan fintech dapat merata sampai ke pelosok desa, terjamin keselamatan bagi konsumen dan perlu adanya informasi/ label bagi fintech syariah.

Hasil analisis indeks persepsi secara keseluruhan adalah 3,95 (indeks persepsi atas fintech dibuat dalam rentang 5 dimulai dari level sangat yakin/ sangat berharap dengan nilai 1 hingga sangat yakin/sangat berharap dengan nilai 5). Ini menunjukkan tingkat keyakinan tinggi, dengan pengertian bahwa tingkat keyakinan masyarakat terkait fintech yang diteliti adalah tinggi. Tingginya skor indeks persepsi menunjukkan bahwa masyarakat muslim kota Mataram memahami indikator-indikator pembentuk persepsi akan fintech.

#### **4. Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram Dalam Menggunakan Fintech**

Perilaku masyarakat muslim kota Mataram dalam menggunakan fintech dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu apa yang digunakan / dibeli konsumen, mengapa konsumen membeli/menggunakan fintech, kapan mereka membeli/menggunakan, dimana mereka membelinya, berapa sering mereka membelinya, berapa sering mereka menggunakannya.

## 5. Korelasi Antara Pengetahuan, Persepsi Dan Perilaku Masyarakat Muslim Terkait Fintech

Indeks perilaku menggunakan fintech diukur dari mean skor keseluruhan indikator. Secara keseluruhan mean skor menunjukkan 3,78 (dalam skala 5) dan berada dalam rentang 3,41 – 4,20 menunjukkan perilaku baik. Indeks ini berada di atas indeks pengetahuan yang bernilai 3,77 dalam rentang 3,41 – 4,20 yang menunjukkan pengetahuan cukup tinggi dan berada di bawah indeks persepsi yang bernilai 3,95 dalam rentang 3,41 – 4,20 yang menunjukkan persepsi positif. Responden yang mempunyai pengetahuan cukup tinggi terhadap fintech dan mempunyai persepsi positif terhadap fintech dalam tataran perilaku berada pada rentang baik dalam berperilaku terhadap penggunaan dan penerimaan fintech.

## 6. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Persepsi

Pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.<sup>59</sup> Menurut Engel, Blackwell dan Miniard dalam Ujang membagi pengetahuan konsumen dalam tiga macam yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian.<sup>60</sup> Pengetahuan konsumen akan suatu produk menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penggunaan produk tersebut. Pengetahuan produk merujuk pada jenis informasi yang diperoleh konsumen dari penggunaan produk. Sebelum memutuskan menggunakan suatu produk, konsumen akan mempertimbangkan informasi yang diperolehnya pertama kali mengenai produk. Informasi ini

---

59 Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen...*, h.147.

60 *ibid*

sebagai bahan acuan dan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan penggunaan produk tersebut.<sup>61</sup>

Persepsi merupakan penyerapan terhadap informasi melalui indera dengan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasa. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kata persepsi memiliki arti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi konsumen akan suatu produk dapat terbentuk dari informasi yang diterima oleh indera mereka. Pengetahuan konsumen dipandang sebagai persepsi yang dimiliki oleh konsumen dan wawasan mereka terhadap produk. Seorang konsumen melakukan pemetaan terhadap produk fintech. Terdapat dua komponen penting dalam pengetahuan produk, yaitu kesadaran dan citra.<sup>62</sup> Analisis kesadaran konsumen adalah sebuah perangkat dalam pengenalan produk-produk tertentu yang dipandang memiliki manfaat yang sesuai dengan situasi tertentu. Analisis citra ialah sebuah persepsi yang ditanamkan oleh produsen bahwa produk yang diproduksi oleh perusahaannya lebih baik dibandingkan pesaingnya.

Dalam menggunakan produk fintech, konsumen terlebih dahulu akan mempertimbangkan informasi yang dimiliki mereka mengenai fintech. Dari informasi tersebut maka dapat terbentuk persepsi mengenai produk fintech yang akan digunakan.

Berdasarkan uji analisis jalur, persepsi signifikan positif dipengaruhi oleh pengetahuan responden akan fintech. Semakin tinggi pengetahuan responden terhadap fintech maka akan meningkatkan persepsi positif terhadap fintech.

---

61 Candraditya, I. H. (2013). "Analisis penggunaan uang elektronik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Produk Flazz BCA di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro)." *Diponegoro Journal of Management*, 2 (3) : 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

62 Engel, James., Roger, D, Blackwell., Paul, W, Miniard. (1994). *Perilaku konsumen*. Jakarta, Binarupa aksara.

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t statistik sebesar 6,154 yang mempunyai tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Besarnya pengaruh pengetahuan terhadap peningkatan persepsi responden akan fintech adalah 26,9 %.

## 7. Pengaruh Persepsi terhadap perilaku Konsumen

Perilaku atas fintech signifikan positif dipengaruhi oleh persepsi responden akan fintech. Semakin tinggi atau positif persepsi responden terhadap fintech maka akan meningkatkan perilaku positif terhadap fintech. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji analisis jalur berdasarkan nilai t statistik sebesar 9,962 yang mempunyai tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Besarnya pengaruh persepsi terhadap peningkatan perilaku responden akan fintech adalah 49,1 %.

Merujuk pada teori TAM, perilaku konsumen pengguna teknologi dapat diukur dengan menggunakan 3 indikator persepsi yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi resiko. Persepsi manfaat diyakini menjadi faktor penentu dasar penerimaan pengguna teknologi. Persepsi manfaat diartikan sebagai sebuah keyakinan pengguna bahwa menggunakan suatu teknologi akan mendatangkan manfaat yang dapat meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Seorang pengguna akan percaya terhadap penggunaan suatu produk teknologi terbaru apabila teknologi tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya secara lebih produktif, lebih cepat, dan lebih baik.<sup>63</sup> Di sisi lain, pengguna akan mengembangkan sikap dan niat yang baik terhadap sistem pembayaran mobile karena pembayaran tunai dan kartu.<sup>64</sup> Hasil penelitian Kim,

---

63 Candraditya, I. H. 2013. "Analisis penggunaan uang elektronik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Produk Flazz BCA di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro)." *Diponegoro Journal of Management* 2(3): 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>

64 Nguyen, T. N., Cao, T. K., Dang, P. L., dan Nguyen, H. A. (2016). "Predicting Consumer Intention to Use Mobile Payment Services: Empirical Evidence from Vietnam." *International Journal of Marketing Studies* 8(1):

Mirusmonov, dan Lee,<sup>65</sup> Priyono,<sup>66</sup> Diphtha,<sup>67</sup> dan Aritonang dan Arisman,<sup>68</sup> (2017) menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan teknologi pembayaran elektronik.

Persepsi kemudahan yaitu sebuah keyakinan pengguna bahwa suatu teknologi dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah.<sup>69</sup> Merujuk pada teori TAM, persepsi kemudahan juga salah satu faktor penentu dasar penerimaan penggunaan teknologi. Maka pengguna akan berperilaku positif dalam artian menggunakan produk fintech apabila sistem tersebut mudah digunakan, bebas dari masalah dan tidak memerlukan usaha ekstra dalam penggunaannya. Persepsi kemudahan merupakan konstruk yang sudah banyak diteliti dan menjadi faktor dengan dampak paling dominan terhadap perilaku seseorang dalam menggunakan fintech seperti pada layanan pembayaran secara mobile.<sup>70</sup>

---

117–124.

65 Kim, C., Mirusmonov, M., dan Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. *Computers in Human Behavior* 26(3): 310–322. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.10.013>.

66 Priyono, A. (2017). “ Analisis pengaruh trust dan risk dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay.” *Jurnal Siasat Bisnis* 21(1): 88–106. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol21.iss1.art6>.

67 Diphtha, K. A. S. (2017). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Karyawan Dalam Menggunakan Uang Elektronik Kartu Flazz BCA di Lingkungan Anantara Seminyak Resort - Bali.” *Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 9 (1).

68 Aritonang, Y. A. L., dan Arisman, A. (2017). “Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan E-Money.” *Jurnal Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, hal 1–17.

69 Davis, F.D. (1989). “Perceived Usefulness , Perceived Ease Of Use , And User Acceptance of Information Technology.” *MIS Quarterly* 13(3): 319-340.

70 Phonthanukitithaworn, C., Sellitto, C., dan Fong, M. W. L. (2016). “An investigation of mobile payment (m-payment) services in Thailand.” *Asia-Pacific Journal of Business Administration* 8(1): 37–54. <https://doi.org/10.1108/APJBA-01-2016-0001>.

Kategori persepsi lainnya dalam TAM adalah persepsi risiko. Persepsi ini adalah bentuk dari sebuah kekhawatiran pengguna akan ketidakpastian atau kemungkinan kerugian yang bisa timbul saat menggunakan produk fintech. Kerugian tersebut mencakup konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi konsumen, seperti kerugian finansial, pelanggaran privasi, ketidakpuasan terhadap kinerja, kecemasan psikologis atau ketidaknyamanan, membuang waktu.<sup>71</sup> Penggunaan teknologi aplikasi dapat menimbulkan dampak negatif yang biasa disebut risiko.<sup>72</sup> Risiko yang dikhawatirkan pengguna fintech dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam memutuskan untuk menggunakan fintech.

Kemungkinan resiko yang dapat ditemui oleh konsumen fintech adalah kejahatan cyber crime seperti keamanan data pribadi, penipuan, penyalahgunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsu, legalitas, terjebak fintech ilegal dan lain-lain. Persepsi resiko dinilai sebagai tingkat persepsi pengguna akan hasil negatif yang didapat dari transaksi secara online (produk fintech).<sup>73</sup> Berdasarkan pada temuan dari beberapa penelitian pada berbagai produk teknologi keuangan tersebut diatas, memiliki hasil temuan yang sama dengan penelitian ini yaitu persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam menggunakan produk teknologi keuangan. Semakin positif persepsi konsumen terhadap produk fintech

---

org/10.1108/APJBA-10-2014-0119.

71 Yang, Y., Liu, Y., Li, H., dan Yu, B. (2015). "Understanding perceived risks in mobile payment acceptance." *Industrial Management & Data Systems* 115(2): 253–269. <https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2014-0243>.

72 Fachmi, M. I., dan Astuti, S. R. T. (2016). "Analisis Kemenarikan Desain Website, Reputasi Vendor, Dan Persepsi Keputusan Pembelian Belanja Online Sebagai Variabel Intervening." *Diponegoro Journal of Management* 5(3): 1–17.

73 Featherman, M. S., dan Pavlou, P. A. (2003). "Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective." *International Journal of Human Computer Studies* 59(4): 451–474. [https://doi.org/10.1016/S1071-5819\(03\)00111-3](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3).

maka perilaku mereka akan cenderung menerima penggunaan teknologi keuangan.

## 8. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku

Pengetahuan konsumen merupakan segala informasi yang dimiliki oleh konsumen tentang berbagai macam produk/jasa dan pengetahuan lainnya yang terkait dengannya serta informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan dapat mempengaruhi perilaku konsumen yang tercermin dari keputusan konsumen dalam pembelian produk/penggunaan suatu jasa.

Menurut Engel, Blackwell dan Miniard (1995) dalam Ujang Sumarwan ada tiga kategori pengetahuan konsumen yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur pengaruh pengetahuan terhadap perilaku konsumen yaitu pengetahuan produk (kategori produk, merk, atribut / fitur produk, harga produk dan kepercayaan produk), Pengetahuan pembelian (pengetahuan tentang dimana produk dapat diperoleh) dan pengetahuan pemakaian (terkait manfaat produk/jasa dan cara mengakses/menggunakan produk/jasa). Pengguna fintech memiliki tingkat pengetahuan akan fintech (*level of product knowledge*) yang berbeda dan ini dapat digunakan untuk menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan dalam penggunaan fintech. Tingkat pengetahuan dibentuk ketika konsumen mengkombinasikan beberapa konsep arti ke dalam kategori pengetahuan yang lebih besar dan lebih abstrak. Analisis jalur digunakan untuk menguji kebenaran akan adanya pengaruh pengetahuan terhadap perilaku seseorang akan fintech. Perilaku atas fintech signifikan positif dipengaruhi oleh pengetahuan responden akan fintech. Semakin tinggi atau positif pengetahuan responden terhadap fintech maka akan meningkatkan perilaku positif terhadap fintech. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t statistik sebesar 5,239 yang mempunyai tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Besarnya

pengaruh pengetahuan terhadap peningkatan perilaku responden akan fintech adalah 21,0 %.

Hasil penelitian Kim, Mirusmonov dan Lee, menemukan bahwa pengetahuan produk merupakan faktor penting dalam memudahkan pengguna untuk menggunakan *mobile payment* (salah satu produk fintech jenis pembayaran).<sup>74</sup> Dengan tingkat pengetahuan yang baik ataupun tinggi mengenai atribut produk fintech, tata cara penggunaan, kesesuaian dengan syariah (jika itu adalah fintech syariah), dan kelegalan fintech yang digunakan akan menjadikan konsumen lebih nyaman dalam menggunakan fintech dan mendorong konsumen untuk tetap menggunakannya. Hal ini juga selanjutnya dapat mendorong konsumen fintech untuk menyarankan orang lain untuk menggunakannya. Tetapi hasil penelitian ini juga ada bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Candraditya<sup>75</sup> dan penelitian oleh Parastiti, Mukhlis, dan Haryono,<sup>76</sup> mengenai uang elektronik yang merupakan salah satu jenis fintech. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pengetahuan produk tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang elektronik.

---

74 Kim, C., Mirusmonov, M., dan Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. *Computers in Human Behavior* 26(3): 310–322. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.10.013>.

75 Candraditya, I. H. (2013). “Analisis penggunaan uang elektronik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Produk Flazz BCA di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro).” *Diponegoro Journal of Management* 2(3): 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.

76 Parastiti, D. E., Mukhlis, I., dan Haryono, A. (2015). Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7(1): 75–82.

## 9. Pengaruh Pengetahuan Dan Persepsi Terhadap Perilaku

Secara statistik, pengetahuan dan persepsi bersama sama mempengaruhi variabel perilaku. Hal ini diketahui dari nilai statistik F yaitu 51,646 dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Secara bersama sama dari nilai R square diketahui bahwa pengetahuan dan persepsi berpengaruh sebesar 50,3% terhadap pengendalian perilaku masyarakat muslim kota Mataram dalam menggunakan fintech. Berdasarkan nilai statistik-t yang menguji apakah ada pengaruh masing-masing variabel pengetahuan terhadap perilaku diketahui nilai signifikansinya persepsi adalah  $0,000 < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa persepsi berpengaruh positif terhadap perilaku. Sedangkan untuk pengetahuan signifikansi  $0,133 > 0,05$  sehingga tidak signifikan karena eror pada pengetahuan lebih dari standar yang ditentukan yaitu 0,05 tetapi tetap berpengaruh hanya saja sangat kecil. Dari koefisien jalur diketahui bahwa persepsi mempunyai pengaruh yang lebih besar sebesar 1.075(49,1%) dibandingkan dengan pengetahuan yang hanya berpengaruh sebesar 0.120 (21%) terhadap perilaku.

Peningkatan persepsi positif dibarengi dengan peningkatan pengetahuan yang mumpuni mengenai fintech akan semakin meningkatkan perilaku baik dalam menggunakan fintech seperti mendukung penggunaan fintech, menggunakan fintech berulang kali, mengikuti perkembangan fintech, menyarankan kerabat menggunakan fintech dan lainnya. Tetapi jika pengujian dilakukan secara terpisah (secara individu) menunjukkan hasil peningkatan pengetahuan responden memberikan pengaruh positif terhadap perilaku dalam menggunakan fintech hanya saja sumbangan pengaruh sangatlah sedikit. Ini diasumsikan jika pengetahuan yang dimiliki konsumen terkait fintech terus bertambah tetapi persepsi yang terbentuk bertolak belakang dengan pengetahuan ataupun informasi yang dimiliki maka

akan berpengaruh pada perilaku konsumen yaitu konsumen tidak menerima dan menggunakan fintech ataupun tidak menyarankan untuk penggunaan fintech kepada orang lain.

## **I. Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis perilaku masyarakat muslim di Kota Mataram dalam hal menggunakan fintech. Hasil uji dengan menggunakan analisis jalur dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat pengetahuan masyarakat muslim di Kota Mataram terhadap fintech berada pada level pengetahuan tinggi. Pengetahuan memberikan pengaruh positif terhadap persepsi individu masyarakat muslim akan fintech. Peningkatan pengetahuan responden terhadap fintech akan meningkatkan pula persepsi positif terhadap fintech. Persepsi responden pula berpengaruh positif terhadap perilaku masyarakat kota Matram dalam menggunakan produk fintech. Besarnya pengaruh persepsi terhadap peningkatan perilaku responden akan fintech adalah 49,1 %. Untuk variabel pengetahuan secara signifikan memberikan pengaruh positif pada perilaku dalam menggunakan fintech. Semakin tinggi atau positif pengetahuan responden terhadap fintech maka akan meningkatkan perilaku positif terhadap fintech. Besarnya pengaruh pengetahuan terhadap peningkatan perilaku responden akan fintech adalah 21,0 %.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assael Henry. (1999). *Consumer Behavior and Marketing Action*, New York: South Western College Publishing
- Bilson Simamora. (2008). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Davis, F.D. (1989). "Perceived Usefulness , Perceived Ease Of Use , And User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly* 13(3): 319-340
- Diptha, K. A. S. (2017). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Karyawan Dalam Menggunakan Uang Elektronik Kartu Flazz BCA di Lingkungan Anantara Seminyak Resort-Bali." *Ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 9 (1)
- Engel, James., Roger, D, Blackwell., Paul, W, Miniard. (1994). *Perilaku konsumen*. Jakarta, Binarupa aksara
- Fan, Y., Saliba, A., Kendall, E.A. and Newmarch, J. (2005). *Speech interface: an enhancer to t h e acceptance of m-commerce application*. Proceedings of the International Conference on Mobile Business (ICMB'05). Sydney, Australia
- Featherman, M. S., dan Pavlou, P. A. ( 2003). "Predicting e-services adoption: A perceived risk facets perspective." *International Journal of Human Computer Studies* 59(4): 451–474.[https://doi.org/ 10.1016/S1071-5819\(03\)00111-3](https://doi.org/10.1016/S1071-5819(03)00111-3)
- Hofstede, G. (1984). *Culture>s Consequences: International Difference in Work-related Values*. London: Sage Publications
- Imam Ghozali. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan*

Program SPSS, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- In Lee. (2016). Fintech : Ecosystem and Business Models, *Advance Science and Technology Letters*, 142, 57-62
- Lamb, Charles. W. et.al. (2001). *Pemasaran. Buku I Edisi Pertama*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Lee-Sang Jung.(2016).The Relationship Between Attitude and Satisfaction for ImprovingContinue User Intention in Fintech, *International Journal of IT- Based Business Strategy Management*, 2 (1), 33-38
- Legris, P.,Ingham, J., dan Collette, P. (2003). “Why do people use information technology ? A critical review of the technology acceptance model”. *Journal of Information & Management*, 40,191–204
- Loudon, D. L & Della Bitta, A.J,. (1993). *Consumer Behaviour: Concepts and Aplication : 4th Ed*. New York: Mc.Graw-Hill
- Khalifa, M. and Shen, N.K. (2008). Explaining the adoption of transactional B2C mobile commerce. *Journal of Enterprise Information Management*. Vol. 2 1 No. 2 : 110-24
- Kim, C., Mirusmonov, M., dan Lee, I. (2010). An empirical examination of factors influencing the intention to use mobile payment. *Computers in Human Behavior* 26 (3):310–322. Diakses dari <https://doi.org/10.1016/j.chb.2009.10.013>
- Kotler, P.,Keller,K.,(2009). *Manajemen Pemasaran. 13Th. Edisi Bahasa Indonesia* Jakarta: PT.Indeks
- Kussudyarsana. (2008, Desember). *Budaya Dan Pemasaran Dalam Tinjauan Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Konsumen*, *BENEFIT Jurnal Manajemen dan*

- Mangkunegara, A.P. (2002). *Perilaku konsumen*. Edisi Revisi. Jakarta : Refika Aditama
- Moh. Siri, Fitriyani, Asti Herlina, (2017). Analisis Sikap Pengguna Paytren Menggunakan Technology Acceptance model, *Jurnal Informatika*, 4 (1), 66-75
- Muchith A. Karim. (2013). *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi ProukHalal*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementrian Keagamaan RI
- Muntianah, S. T., Astuti, E. S., & Azizah, D. F. (2012). Pengaruh Minat Perilaku Terhadap Actual Use Teknologi Informasi dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Profit Universitas Brawijaya Malang*, 6(1), 88–113
- Nguyen, T. N., Cao, T. K., Dang, P. L., dan Nguyen, H. A. (2016). “Predicting Consumer Intention to Use Mobile Payment Services: Empirical Evidence from Vietnam.” *International Journal of Marketing Studies* 8(1): 117–124
- Parastiti, D. E., Mukhlis, I., dan Haryono, A. (2015). Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 7(1): 75–82
- Phonthanakitithaworn, C., Sellitto, C., dan Fong, M. W. L. (2016). “An investigation of mobile payment (m-payment) services in Thailand.” *Asia-Pacific Journal of Business Administration* 8(1): 37–54. Diakses dari <https://doi.org/10.1108/APJBA-10-2014-0119>
- Tse, D.K., Lee, K-H., Vertinsky, I. and Wehrung, D.A. (1988, October). Does Culture Matter? A Crosscultural Study of Executives > Choice, Decisiveness and Risk Adjustment in International Marketing, *Journal of Marketing*,

52: 81-95.

- Yeow Pooi Mun, Haliyana Khalid dan Devika Nadarajah. (2017). Millenials' Perception on Mobile Payment Services in Malaysia, *Science Direct-Procedia Computer Science*,124, 397–404
- Yang, Y., Liu, Y., Li, H., dan Yu, B. (2015). "Understanding perceived risks in mobile payment acceptance." *Industrial Management & Data Systems*115(2): 253–269. <https://doi.org/10.1108/IMDS-08-2014-0243>.
- Yeniyurt, Sengun and Townsend Janell D.( 2003). Does Culture Explain Acceptance of New Products in a Country?AnEmpirical Investigation *International Marketing Review*, 20 (4) : 377-396.
- Yeow Pooi Mun, Haliyan Khalid, Devika Nadaraja. (2017). Millenials' Perception on Mobile Payment Services in Malaysia, 4th Information System international Conference 2017, *Procedia Computer Scienc,e* 124 : 397-404.



---

## STANDAR HALAL HOTEL SYARI'AH

---

Muh. Baihaqi

**Kata Kunci:** *Hotel, Pelayanan, Standar Syari'ah, Sertifikasi.*

### A. Pendahuluan

Saat ini, muslim di dunia merupakan komunitas agama terbesar kedua setelah Kristen dengan jumlah pemeluk yang mencapai lebih dari 1,62 miliar jiwa. Merujuk pada data statistik ini, umat Islam mengisi 23 persen populasi manusia di bumi. Muslim memiliki etika hidup yang diatur dalam syariat termasuk di dalamnya makanan dan minuman halal, obat dan kosmetik, fasyen, juga wisata.<sup>77</sup> Dengan pertumbuhan yang sangat pesat ditambah perbaikan taraf kehidupan mereka saat ini, umat Islam menjadi kekuatan baru dalam wisata global.

Sebagai langkah awal realisasi wisata syariah di Indonesia, Kemenparekraf telah menetapkan 12 destinasi wisata syariah, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan.<sup>78</sup>

Sektor pariwisata tentunya sangat berkaitan dengan bisnis akomodasi, khususnya bisnis perhotelan. Tumbuh kembang dunia pariwisata di tanah air hingga kini kian terasa sangat bergejolak. Tidak bisa dipungkiri bahwa bisnis

---

<sup>77</sup> Sofyan Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata syariah*. (Jakarta: Buku Republika, 2012), h. 10

<sup>78</sup><http://www.antarantb.com/berita/28641/wisata-syariah-di-pulau-seribu-masjid>, (diakses tanggal 20 Maret 2017).

ini merupakan salah satu penunjang sektor pariwisata yang sangat cepat kemajuannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah menjadi tren tersendiri. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan efek dari semakin besarnya tingkat kesedaran masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan ketentuan Islam didalam segi kehidupannya.

Munculnya hotel syariah di tanah air belakangan ini, tentunya berdasar atas kebutuhan pasar tersebut, yang bersumber atas sajian spiritual Islami. Namun pada pelaksanaannya, hotel syariah masih belum menjadi tawaran akomodasi yang menarik bagi seluruh kalangan. Hotel syariah masih terdengar asing ditelinga masyarakat Indonesia. Tantangan pengemasan hotel syariah merupakan pekerjaan rumah bagi seluruh *stakeholder* yang berhubungan.

Berbicara mengenai keuntungan, **bisnis hotel syariah** ini berpeluang besar menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha perbankan mulai menggunakan sistem syariah, merupakan sebuah sarana informasi dalam memperkenalkan prinsip syariah, walaupun dalam hal yang berbeda. Namun masyarakat mulai mempelajari dan mencoba hal-hal yang dianggapnya baru. Berawal dari itu, secara perlahan-lahan pasar industri hotel syariah semakin meluas. Perkembangan hotel syariah masih terbilang lambat dibanding hotel konvensional, hal ini disebabkan karena lisensi resmi dari lembaga keagamaan yang sedikit sulit didapatkan sehingga pengusaha yang ingin terjun ke bisnis juga terhambat. Maka dari itu dibutuhkan kerja sama dari pemilik hotel agar serius menjalankan prinsip syariah sehingga memudahkan dalam pengurusan administrasi.

Hotel Grand Madani Syari'ah Mataram adalah salah satu hotel yang berada di Kota Mataram yang melabel usahanya

dengan label syari'ah. Beralamat di Jalan Udayana No. 20 Mataram, Hotel Grand Madani menyiapkan fasilitas lengkap seperti halnya hotel-hotel konvensional seperti kamar inap, ballroom, kolam renang, kafe/restoran dan lain sebagainya. Dengan berlabel syari'ah, maka seluruh bentuk pelayanan hotel harus disesuaikan dengan nilai-nilai syari'ah.

Untuk menjamin bahwa sebuah hotel berlabel syari'ah telah menjalankan nilai-nilai syari'ah dalam operasionalnya, maka dibutuhkan sebuah perangkat standar nilai-nilai sebagai acuan bagi semua pelaku perhotelan syari'ah. Dengan adanya perangkat nilai tersebut, dapat mempermudah konsumen dan stake holder lainnya dalam menilai sejauh mana pengelola hotel syari'ah dapat menerapkan pelayanan yang islami.

## **B. Kajian Teoretik**

### **1. Pengertian Hotel Syari'ah**

Secara harfiah, kata Hotel dulunya berasal dari kata *hospitium* (bahasa Latin), artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata *hospitium* mengalami proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara Guest House dengan Mansion House (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah besar disebut Hostel. Rumah-rumah besar atau hostel ini disewakan kepada masyarakat umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, yang selama menginap, para penginap dikoordinir oleh seorang host, dan semua tamu-tamu yang selama menginap harus menaati peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh *host*. sesuai dengan perkembangan dan tuntutan orang-orang yang ingin mendapatkan kepuasan, tidak suka dengan aturan atau peraturan yang terlalu banyak sebagaimana dalam hostel, dan kemudian kata hostel lambat laun mengalami perubahan. Huruf "s" pada kata hostel tersebut dihilangkan, sehingga

kemudian kata hostel berubah menjadi Hotel seperti yang kita kenal sekarang.<sup>79</sup>

Menurut Bachtiar, dalam praktik keseharian masyarakat, wisata berarti rekreasi. Berwisata, berarti rekreasi aktif atau suatu aktivitas mengunjungi tempat tertentu, untuk tujuan mencapai kebahagiaan. Ada pula istilah wisata atau rekreasi, yang bukan sekedar demi kepentingan kebahagiaan subyek yang berwisata, tetapi juga memberikan untung bagi banyak pihak penyelenggaranya. Tujuan kebahagiaan ini, lebih mengarah kepada kondisi psikologis manusia yang lebih tenang, tentram, damai dan sentosa (*happiness*).<sup>80</sup>

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No.KM 94/HK.103/MPPT – 87 disebutkan bahwa Pengertian hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam keputusan ini.

Untuk memperjelas wawasan mengenai usaha perhotelan, berikut adalah beberapa pengertian tentang hotel, yaitu:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 37/PW-340/MPT-86 adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan layanan penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.<sup>81</sup>

---

79 <http://e-journal.uajy.ac.id/165/3/2TA12941.pdf>.

80 <http://seputartax.blogspot.co.id/2016/02/essay-%27pariwisata-syariah.html> (diakses tanggal 3 April 2017)

81 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 37/PW-340/MPT-86 Tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Republik Indonesia Pasal 61 dinyatakan bahwa “Pelayanan pokok usaha hotel yang harus disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, penyediaan pelayanan pencucian pakaian dan penyediaan fasilitas lainnya.” Peraturan pemerintah tersebut secara implisit memberikan definisi mengenai kata hotel.<sup>82</sup>

Menurut Widyarini,<sup>83</sup> menyebutkan bahwa Hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip - prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional/ non-syariah pada umumnya. Namun konsep hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku didalam pengelolaan dan pengoperasiannya.

Sedangkan menurut Basalamah,<sup>84</sup> rambu - rambu syariah yang bersifat umum dalam menjalankan usaha ekonomi, termasuk usaha perhotelan, meliputi: (1) tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan produk atau jasa yang secara keseluruhan maupun sebagiannya dilarang dalam ketentuan syariah. Seperti dalam hal makanan, mengandung unsur babi, minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, dan yang semacam itu; (2) tidak mengandung unsur kezhaliman, kemungkaran, kemaksiatan maupun kesesatan yang terlarang dalam kaidah syariah, baik secara

---

82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Republik Indonesia.

83 Widyarini, *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*, Jurnal EKBISI, Vol. VIII, No. 1. (Desember 2013), h. 4.

84 Anwar Basalamah, *Hadirinya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*. Jakarta Barat: Jurnal Binus Business Review Vol. 2 No. 2. (November 2011), h. 766.

langsung maupun tidak langsung; (3) tidak ada pula unsur penipuan, kecurangan, kebohongan, ketidak - jelasan, resiko yang berlebihan dan membahayakan; dan (4) ada komitmen menyeluruh dan konsekuen dalam menjalankan perjanjian yang disepakati antar pihak-pihak terkait.

Hotel syariah adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman serta lain sesuai perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hotel Syariah adalah hotel yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, dikelola secara komersial serta memenuhi kelentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, industri, dan syariah.<sup>85</sup>

## **2. Profil Hotel Madani Syari'ah Mataram**

### **1. Pendirian**

Pengertian hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel. Motto dari Hotel Madani Syariah adalah “Mengutamakan kenyamanan dan keberkahan”, kami senantiasa menjaga pelaksanaan pengelolaan hotel kami agar senantiasa dalam koridor syariah.<sup>86</sup> Sedangkan *Symply Homy Guest House* mengaplikasikan konsep syariah dengan pemberian fasilitas di setiap kamar berupa: mukena, sajadah,

---

<sup>85</sup> Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa tidak! Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 87.

<sup>86</sup><http://www.jogjarumah.com/2013/01/hotel-madani-syariah-yogyakarta.html>

Al Qur'an dan tasbih serta adzan yang dikumandangkan disetiap waktu sholat.<sup>87</sup>

Fasilitas standar secara umum untuk hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional, kamar, restoran maupun fasilitas olah raga (misal: kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf). Perbedaannya adalah untuk beberapa kasus ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada diskotik, bar dan *night club* maupun panti pijat serta tidak menyediakan minuman beralkohol.

Grand Madani Hotel yang terletak di Jalan Udayana Mataram ini merupakan salah satu hotel di Mataram berbasis syariah. Hotel ini dikelola oleh Prasanthi Syariah yang juga mengelola sejumlah hotel ternama di Jakarta. Hotel yang dimiliki oleh H Nur Fatah Reginata ini baru beroperasi Juni 2016 lalu. Hotel ini dioperasikan dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyyah dan menerapkan sistem hunian yang sesuai tuntunan syariah.

## 2. Tantangan dan peluang Hotel Grand Madani Mataram.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kehidupan di hotel lebih banyak menampilkan kehidupan glamour, bebas, dan bahkan melanggar prinsip-prinsip keagamaan. Hidup glamour dan bebas memang terkadang menjadi daya tarik dan motif seseorang untuk menjadi tamu di hotel. Inilah sebagai salah satu tantangan yang dihadapi oleh industri perhotelan terutama yang berlabel syari'ah seperti Madani Hotel.

Sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Manager Hotel Madani; “dibutuhkan kerja keras untuk menarik minat masyarakat menjadi tamu hotel syari'ah karena selama ini mereka sudah terbiasa dan lebih familiar dengan hotel

---

<sup>87</sup><http://www.jogjarumah.com/2013/01/hotel-madani-syariah-yogyakarta.html>

konvensional yang lebih menawarkan fasilitas yang bebas dan tidak mengenal batas-batas syari'ah."<sup>88</sup>

Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh Hotel Madani adalah semakin menjamurnya pembangunan hotel di wilayah mataram dan sekitarnya sehingga persaingan semakin ketat. Sebagaimana diketahui, perkembangan investasi di bidang perhotelan di Mataram sangat tinggi sehingga berpotensi merugikan pengusaha. Semakin menjamurnya usaha perhotelan tanpa diiringi peningkatan kunjungan wisatawan dapat menjadi penyebab matinya usaha perhotelan.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Manager Hotel Madani, Sigit. Menurutnya, tantangan itu adalah sebuah keniscayaan bagi semua pelaku investasi di bidang perhotelan. Semakin banyak kunjungan wisatawan, semakin banyak yang berminat mendirikan hotel. Akan tetapi, tingginya tingkat perkembangan hotel justru terkadang tidak sebanding dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Artinya, peningkatan jumlah hotel menyalip tingkat kunjungan wisatawan.<sup>89</sup> Meski demikian, Sigit tetap optimis Hotel Madani akan selalu didatangi pengunjung. Dia mengatakan jika kita berbuat sesuatu dengan berlandaskan syari'ah, insya Allah tuhan akan membantu.<sup>90</sup>

Data terkini yang dihimpun PHRI NTB, jumlah hotel dan restoran di NTB sebanyak 787 hotel. Dari jumlah tersebut, baru 70 hotel yang menyatakan bergabung dengan PHRI.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan hotel, PHRI NTB melakukan pembinaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan tentang pelayanan hotel dan

---

88 Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

89 Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

90 Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

restoran. Tidak hanya itu, PHRI berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah baik Pemerintah Provinsi NTB, maupun kabupaten/kota. Termasuk sejumlah organisasi dan pelaku wisata lainnya di NTB. Untuk memaksimalkan kerjanya, PHRI membentuk koordinator di masing-masing kabupaten kota. Itu dilakukan sementara sebelum terlaksananya musyawarah cabang di 10 kabupaten/kota di NTB.<sup>91</sup>

Sebagai Hotel pertama yang menawarkan konsep-konsep syari'ah di NTB khususnya di Kota Mataram, Hotel Madani mempunyai peluang yang sangat besar untuk menggaet tamu. Ini disebabkan karena label hotel syari'ah menawarkan produk-produk halal yang bukan saja diminati oleh tamu yang muslim, namun juga diminati oleh tamu non-muslim.

Beberapa hal yang dapat menjadi peluang bagi Hotel Madani dalam memasarkan produknya adalah:

1. Muslim sebagai penduduk mayoritas Nusa Tenggara Barat. Sebagai daerah dengan penduduk muslim menjadi penghuni mayoritas dapat menjadi pasar potensial bagi produk hotel berlabel Syariah. Munculnya Hotel Syari'ah yang merupakan penerapan dari nilai-nilai Islam sangat perlu didukung oleh ummat Islam sendiri. Oleh karena itu, besarnya komunitas muslim di Nusa Tenggara Barat adalah salah satu peluang bagi manajemen Hotel Madani dalam mengembangkan bisnisnya.
2. Gencarnya branding wisata halal di NTB. Halal Tourism yang saat ini tengah gencar digarap oleh NTB bisa sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pencapaian target sebanyak 20 juta wisatawan pada 2019 mendatang. Perkembangan pariwisata di NTB pun tergolong pesat dalam tiga tahun terakhir dengan pertumbuhan wisatawan yang tumbuh di atas 20 persen. Bahkan

---

91 <http://www.lombokpost.net/2016/12/31/phri-bakal-sertifikasi-hotel-dan-restoran/>

saat ini NTB sangat identik dengan pariwisata halal.<sup>92</sup> Berdasarkan analisis SWOT yang bersumber dari Standing Committee of Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) yang dikutip dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional NTB disebutkan bahwa kekuatan dalam pelaksanaan wisata halal di Indonesia lebih besar daripada kelemahannya.<sup>93</sup> Dalam laporan tersebut dipaparkan beberapa kekuatan Indonesia dalam melakukan program wisata halal antara lain berpengalaman dalam penyediaan tempat ibadah sholat di area publik. Sebagai imbas dari branding wisata halal, maka harus sejalan juga dengan perkembangan hotel syariah karena kedua hal tersebut memang saling melengkapi. Lonjakan jumlah wisatawan yang begitu besar secara otomatis membutuhkan akomodasi hotel yang cukup. Untuk mengisi permintaan akan kebutuhan akomodasi bagi para wisatawan, terutama bagi yang ingin berpariwisata halal di NTB, maka Hotel Madani adalah satu-satunya hotel yang menyediakan seluruh fasilitas dengan standar yang islami.<sup>94</sup>

#### 1. Standar Islami Pelayanan Hotel Madani Mataram

*Karyawan.* Sebagai hotel yang menyatakan dirinya menerapkan standar syari'ah, Hotel Madani menerapkan standar islami mulai dari karyawan.

Standarisasi islami pada karyawan ini meliputi:

- a. Etika berbusana. Hotel Syari'ah Madani mengharuskan semua karyawati menggunakan

---

<sup>92</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/06/09/or8u06361-wisata-halal-disebut-identik-dengan-ntb>

<sup>93</sup> [bisnis.tempo.co/read/883886/wisata-halal-digadang-gadang-jadi-penggerak-ekonomi-ntb](http://bisnis.tempo.co/read/883886/wisata-halal-digadang-gadang-jadi-penggerak-ekonomi-ntb)

<sup>94</sup> Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

busana muslim mulai dari jajan manajemen sampai pada tingkat cleaning servis. Menurut Bapak Sigit, kebijakan ini diterapkan karena Hotel Madani sangat komitmen menjalankan standar islami pada semua sisi pelayanan hotel.<sup>95</sup> Standar model busana muslim yang digunakan oleh para karyawan Hotel Madani Syari'ah adalah sebagaimana yang umum digunakan oleh para muslimah, di mana tidak condong ke ekstrim kanan seperti burqa dan cadar, tidak pula dengan busana muslimah yang condong ke kiri seperti busana muslimah yang masih menonjolkan lekuk tubuh penggunanya. Menurut Sigit, ini dilakukan agar semua masyarakat dari golongan manapun bisa menerima kehadiran Hotel Madani, bahkan dari masyarakat non muslim sekalipun.<sup>96</sup>

- b. Salam adalah identitas muslim ketika bertemu dengan saudara yang seiman, salam bisa menjadi identitas suatu kelompok perkumpulan dalam Islam. Dalam kesehariannya, para karyawan Hotel Madani Syari'ah membiasakan diri mengucapkan salam ketika bertemu baik dengan sesama karyawan terlebih dengan para tamu. Ketika seorang karyawan ingin memasuki sebuah kamar untuk memberikan pelayanan kepada tamu seperti membersihkan kamar ataupun mengantar kebutuhan para tamu sementara tamu tersebut ada di dalam kamar, maka mereka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Tidak peduli apakah itu tamu muslim ataupun non-muslim karena ucapan salam

---

95 Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

96 Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

adalah sebuah doa untuk keselamatan.<sup>97</sup> Karena tidak semua karyawan dan tamu Hotel Madani adalah muslim.

- c. Tamu Hotel. Tamu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah usaha hotel. Oleh karena itu, seorang tamu layak mengharapkan dan mendapatkan pelayanan yang maksimal dari sebuah hotel. Beragamnya tamu yang berkunjung ke Hotel Madani menjadi perhatian khusus manajemen terutama yang terkait dengan standar keislaman. Jika tamu yang datang adalah berasal dari yang beragama Islam, setidaknya pihak manajemen tidak dibuat repot terkait pakaian yang digunakan oleh tamu, meskipun mungkin tidak menggunakan jilbab, setidaknya aurat sudah tertutup minimal dari pergelangan kaki sampai leher.<sup>98</sup> Meskipun pada saat tertentu, kita mendapatkan para tamu tersebut terkadang tampil dengan busana minim di depan lobby hotel. Selain persoalan busana, hal yang penting dalam standarisasi halal bagi para tamu adalah pasangan yang menemani ketika ingin menginap di hotel khususnya jika pasangan tersebut berlainan jenis kelamin. Sebagaimana prosedur di Hotel Sofyan, Hotel Madani Mataram juga menerapkan aturan yang sama di mana setiap ada tamu dengan membawa pasangan berlainan jenis, maka harus menunjukkan surat nikah sebagai bukti menjadi pasangan yang sah. Namun ada perbedaan antara Sofyan Hotel dengan Hotel Madani Mataram, yaitu; jika di Sofyan Hotel

---

97 Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017

98 Windiana Putra, General Manager Hotel Madani, disampaikan dalam acara FGD Pariwisata Halal pada tanggal 26 Oktober 2016.

tamu harus menunjukkan surat nikah sebelum memasuki kamar hotel. Sementara di Hotel Madani Mataram, surat nikah harus ditunjukkan jika ada teman berbeda jenis yang datang setelah tamu tersebut beberapa waktu menginap di hotel.<sup>99</sup> Untuk mengantisipasi jika ada tamu yang datang berdua dengan pasangan yang sebenarnya bukan merupakan pasangan suami isteri yang sah, pihak hotel akan meminta mereka menunjukkan Kartu Tanda Penduduk. Menurut Bapak Sigit, jika pada masing-masing Kartu Tanda Penduduk pasangan tersebut tertulis sudah menikah dan mereka memiliki alamat yang sama maka sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah pasangan yang sah menurut agama tanpa harus menunjukkan surat nikah.<sup>100</sup> Karena pada umumnya, jika alamat seseorang sudah sama dengan pasangan lain jenis di Kartu Tanda Penduduk, maka diyakini kedua orang tersebut sudah menjalin hubungan pernikahan meski tidak membawa surat nikah. Meskipun terkadang ada juga yang memiliki alamat yang sama namun sebenarnya mereka sudah bercerai, namun kasus seperti itu sangat jarang terjadi.

- d. Fasilitas. Seluruh fasilitas Hotel Madani yang berupa fasilitas dasar dan fasilitas tambahan adalah fasilitas-fasilitas yang diyakini dapat memberikan kemanfaatan positif bagi tamu. Sementara fasilitas-fasilitas yang dapat mengakibatkan hal-hal negatif seperti kerusakan, kemungkaran, perpecahan, mengundang perilaku amoral,

---

<sup>99</sup> Windiana Putra, General Manager Hotel Madani, disampaikan dalam acara FGD Pariwisata Halal pada tanggal 26 Oktober 2016

<sup>100</sup> Sigit, Sekretaris Manager Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017

eksploitasi wanita dan lainnya tidak disediakan. Mewujudkan fasilitas hotel yang mengamalkan nilai-nilai syari'ah memiliki tantangan tersendiri. Karena system perhotelan konvensional yang sudah mengakar begitu lama di negeri ini sangat sulit untuk dihilangkan sampai ke akar-akarnya. Di antara salah satu cara dalam membangun system perhotelan syari'ah adalah dengan menghapus dan menutup fasilitas yang tidak sesuai dengan syari'ah seperti diskotik, club malam, bar dengan minuman beralkohol dan lain-lain. Dengan terhapusnya fasilitas-fasilitas tersebut maka sebuah hotel dapat dikatakan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Berhijrah dari hotel konvensional menuju hotel dengan prinsip syari'ah pada intinya adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

## 2. Restoran bersertifikat halal MUI.

Hotel Madani memiliki restoran halal dengan nama Restoran Firdaus. Restoran Firdaus sudah mendapat sertifikat halal MUI NTB dengan nomor sertifikat 27310012281216.<sup>101</sup> Yang dimaksud Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari Badan POM RI atau Balai Besar POM dimasing-masing Provinsi.

Pengadaan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya

---

101 Putri, Admin Hotel Madani, wawancara tanggal 11 Agustus 2017.

perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang di sembelih menurut syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Bahkan jika ada sangkar burung yang digantung di dekat pengolahan dan penjualan kuliner, maka secara otomatis tim sertifikasi tidak meluluskan.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol).
- f. Semua Koki yang mengolah menu makanan untuk restaurant hotel harus beragama Islam.<sup>102</sup>

### C. Penutup

Sangat banyak peluang yang dimiliki oleh Hotel Grand Madani dalam mengembangkan sayap bisnisnya di Nusa Tenggara Barat. Salah satu di antaranya adalah mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat. Munculnya Hotel Syari'ah yang merupakan penerapan dari nilai-nilai Islam sangat perlu didukung oleh ummat Islam sendiri. Oleh karena itu, besarnya komunitas muslim di Nusa Tenggara Barat

---

102 Mustamiuddin Ibrahim, Ketua Dewan Fatwa MUI NTB, disampaikan pada Focus Group Discussion Dinas Pariwisata NTB tanggal 26 Oktober 2016.

adalah salah satu peluang bagi manajemen Hotel Madani dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, branding wisata halal yang disandang Nusa Tenggara Barat menjadi keuntungan tersendiri bagi Hotel Grand Madani yang sedang mengembangkan usahanya karena label wisata syari'ah sangat identik dengan hotel syari'ah yang merupakan penyedia akomodasi bagi pelancong wisata syari'ah. Sedangkan tantangannya adalah semakin menjamurnya pembangunan hotel di Kota Mataram yang menyebabkan ketatnya persaingan. Meningkatnya usaha di bidang perhotelan akan menyebabkan turunnya tingkat hunian hampir di semua hotel, terlebih di hotel yang berlabel syariah. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih familiar dengan hotel konvensional yang lebih menawarkan kebebasan bagi para tamunya.

Standar pelayanan islami Hotel Grand Madani Mataram diterapkan pada hampir semua fasilitas dan layanan, baik fisik maupun nonfisik. Standar pelayanan islami nonfisik diantaranya adalah etika berbusana, etika bertemu dengan ucapan salam, shalat berjamaah bagi karyawan, dan bertingkah laku yang baik dan santun ketika bergaul antara para pengelola dan tamu hotel. Layanan islami yang bersifat fisik di antaranya seperti fasilitas dalam kamar tamu yang menyediakan arah kiblat, sarana berwudu, alat perangkat shalat, al-Qur'an, dan tempat duduk bagi yang bukan muhriin. Selain menyiapkan beberapa fasilitas ibadah di dalam kamar, kamar juga disetting dengan ukuran yang hampir menyamai ukuran kamar Rasulullah Saw. Fasilitas lainnya yang berstandar islami adalah fasilitas kolam renang. Kolam renang Telaga Kausar Hotel Grand Madani memisahkan antara kolam laki-laki dan perempuan. Fasilitas restoran Hotel Grand Madani menyediakan makanan berstandar halal yang sudah disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- David.C.Korten dan Rudi Klauss. *People Centered Development: Contribution Toward Theory and Planning Frameworks*. (West Hartford : Kumarian Press, 1994 ).
- Arjana, I Gusti Bagus. 2015. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basalamah, Anwar. 2011. *Hadirinya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*. Jakarta Barat: Jurnal Binus Business Review Vol. 2 No. 2.
- Digilib.uinsby.ac.id
- Kartajaya, Hermawan. & Syakir Sula. 2006. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. 2013. *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Rezeki, S. Reza Irwansyah. 2011. *Strategi Komunikasi “Change Management” (Studi Kasus: Perubahan Konsep Bisnis dari Hotel Konvensional ke Hotel Syariah)*. Jurnal Semai Komunikasi. Vol. II No. 1.
- Sambodo, Agus. 2006. *Dasar-Dasar Kantor Depan Hotel*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sofyan, Riyanto. 2010. *Bisnis Syariah, Mengapa tidak! Pengalaman Penerapan pada Bisnis Hotel*. Jakarta.
- Tarmizi, Erwandi. 2015. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Widyarini. 2013. *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*. EKBISI, Vol. VIII, No. 1.
- Widyarini & Fitri Kartini. 2014. *Variabel yang Mempengaruhi*

- Keputusan Pemilihan Hotel Syariah*. Jurnal EKBISI, Vol. IX, No. 1.
- Fahad Salim Bahamman, *Panduan Wisatawan Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012).
- Sucipto, Hery. dan Fitria Andayani. *Wisata Syariah :Karakter, Potensi, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta Selatan : Grafindo, 2004).
- G. Suwanto. *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta : Andi, 2004).
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- I Gde Pitana. Gayatri, P.G. *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2005).
- Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Jakarta: Mandar Maju, 2009).
- Ismayanti. *Pengantar Pariwisata*. (Bandung : Grasindo, 2010).
- Jaih Mubarak. *Pengaturan Wisata Syari'ah di Indonesia*. (Bandung: BPH DSN- Majelis Ulama Indonesia, 2014).
- Kodhyat, *Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta:Grasindo, 1998).
- Muhammad Tahwin, *Pengembangan Obyek Wisata Sebagai Sebuah Industri*, Jurnal Gema Wisata, 2003).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, alih bahasa Frans Gromang (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).
- Sofyan Riyanto, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Buku Republika, 2012).
- Teoman Duman. *Values of Islamic Tourism Offering Perspectives From The Turkish Experience*. International Burch University

: Sarajenova

Unggul Priyadi dkk, *Potensi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Syari'ah di Kabupaten Sleman*, DPM UII Yogyakarta 2014.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Karya, 1989).

Wiendu Nuryanti. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, Makalah bagian dari laporan konferensi internasional mengenai pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.





## LINK AND MATCH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN MATARAM DENGAN SEKTOR IKNB SYARIAH MATARAM

---

Naili Rahmawati, Dahlia Bonang

**Abstrak:** Realitas saat ini banyak alumni perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, termasuk di FEBI UIN Mataram. Ada indikasi ada *miss-link* anantara kebutuhan pasar dan lembaga pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk menelusuri *link and match* antara kebutuhan tenaga kerja (Industri Keuangan non-Bank).

**Kata Kunci:** *Link and Macth, kurikulum, Institusi Keuangan*

### A. Pendahuluan

Saat ini perguruan tinggi sudah seharusnya memiliki peranan yang sentral di dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten bagi dunia usaha. Namun, realita menggambarkan fakta sebaliknya, di mana banyak para alumni yang bekerja tidak pada bidang keahlian yang dimiliki dan bahkan yang lebih miris lagi adalah tidak sedikit lulusan yang menjadi pengangguran. Data statistik di Kota Mataram menunjukkan bahwa jumlah penduduk pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.518 orang dengan jumlah pencari kerja yang berasal dari lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 217 orang dan sementara jumlah pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan sebanyak 1 orang saja.<sup>103</sup> Fakta ini mengindikasikan

---

103 Biro Pusat Statistik Kota Mataram, *Katalog Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2018*, (Mataram: BPS Kota Mataram, 2018), hlm. 71-84.

terjadinya ketidaktertautan dan ketidaksesuaian (*mis-link and mis-match*) kompetensi para pencari kerja dengan dunia kerja, meskipun peluang lapangan kerja yang tersedia yang cukup luas. Kondisi ini merupakan eksese negatif dari belum/tidak optimalnya lembaga pendidikan dalam menyiapkan peserta didiknya memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja.<sup>104</sup> Karenanya, konsep *link and match* yang dikenalkan oleh Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjadi suatu kemutlakan yang harus dipenuhi oleh dunia pendidikan guna mengimbangi tuntutan kebutuhan dunia usaha.<sup>105</sup>

Terjadinya *mis-link and mis-match* tersebut menurut Kellerman dan Sagmeister dapat disebabkan, *pertama*: sistem pendidikan tinggi memiliki jarak dengan dunia kerja sebagai akibat tidak mengantisipasi kompetensi lulusan yang diperlukan untuk bekerja (*under qualification*), *kedua*: dunia kerja mungkin tidak diorganisasikan dengan baik, sehingga keterampilan lulusan tidak dapat dimanfaatkan secara efisien (*under utilization*), dan *ketiga*: lulusan memiliki kemampuan yang melebihi syarat kompetensi di dunia kerja (*over qualification*).<sup>106</sup> Karenanya, hipotesis awal yang mengemuka

---

104 Erman Suparno, *Kompetensi, Jabatan Penghubung Dunia Pendidikan dan Industri*, (Jakarta: LPE, 2012), hlm 43.

105 Perspektif keterkaitan (*link*) menunjukkan suatu proses yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun berkesesuaian (*match*) dengan kebutuhan dunia usaha, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun dari segi waktunya. Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1999), hlm. 14.

106 P. Kellermann and G Sagmeister, *Higher education and graduate employment in Austria*, European Journal of Education, Vol. 35, No. 2 June 2000 dalam Yelli Eka Sumadhinata dan Pipin Sukandi, *Analisis Relevansi Kompetensi Lulusan terhadap Kebutuhan Kerja*, Conference on Management and Behavioral Studies, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 27 Oktober 2016, hlm., 22.

adalah kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan tinggi saat ini belum terbentuk dari unsur kemampuan dan pengetahuan yang seharusnya menjadi orientasi kebutuhan rekrutmen bagi dunia usaha. Implikasinya, sangatlah rasional jika kondisi ini memunculkan tuntutan logis masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu bersaing menghadapi era globalisasi,<sup>107</sup> yang mana akan dapat direalisasikan dengan adanya kepekaan lembaga pendidikan dengan melakukan antisipasi nyata melalui pembaruan (updating) dan modernisasi berbagai unsur terkait di dalamnya seperti unsur tenaga pendidik, sarana dan prasarana, termasuk unsur kurikulum<sup>108</sup> yang tentunya harus didesain dengan salah satunya menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (competency based training).<sup>109</sup>

FEBI UIN Mataram sebagai salah satu fakultas favorit dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak boleh berdiri sendiri hanya untuk kepentingan pendidikan semata. Akan tetapi lebih dari itu proyeksi masyarakat terhadap lembaga ini harus mampu memberikan kemanfaatan berupa kompetensi bagi pemenuhan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), khususnya yang berbasis keislaman termasuk lembaga keuangan non bank yang biasanya dikenal dengan istilah industri keuangan non bank (IKNB)<sup>110</sup>. Melalui pemenuhan aspek kemanfaatan ini, keberadaan FEBI UIN

---

107 Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm., 152.

108 Oemar Hamalik, *Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm., 1.

109 Yoyoh Jubaedah, Neni Rohaeni dan Tati, *Model Link And Match dengan Pendekatan Competency Based Training pada Pembelajaran Tata Graha di Sekolah Menengah Kejuruan*, Jurnal Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, 2007), hlm., 21.

110 Lihat Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan.

Mataram akan dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu merespon tuntutan masyarakat tersebut.

Sejak berdirinya pada tanggal 20 Juli 2017<sup>111</sup>, FEBI UIN Mataram hingga tahun akademik 2018/2019 ini telah mencetak sekitar 1567 lulusan sarjana,<sup>112</sup> di mana sekitar 24 alumni dari sebanyak 156 alumni yang telah bekerja mendapatkan pekerjaan di lembaga keuangan non bank seperti asuransi, koperasi, lembaga leasing termasuk BMT ataupun asuransi syariah.<sup>113</sup>

Minimnya kuantitas alumni FEBI UIN Mataram tersebut dapat diasumsikan sebagai imbas dari *mis-link and mis-match* antara *output* lembaga FEBI UIN Mataram dengan kebutuhan kompetensi kerja dari IKBN. Kondisi ini menjadi sesuatu yang menarik untuk didesain sebagai kajian penelitian untuk dapat mendeskripsikan secara riil tentang kondisi *link and match* FEBI UIN Mataram khususnya dengan sektor IKNB Syariah yang terdapat di Kota Mataram, termasuk untuk mengetahui strategi pengelolaan FEBI UIN Mataram dalam meningkatkan *link and match* tersebut guna mengantisipasi terjadinya *mis-link and mis-match* dengan kebutuhan sektor IKNB Syariah.

## B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam rentang waktu tertentu dengan maksud menggambarkan kondisi alamiah yang terjadi pada

---

111 Lihat Pasal 11 huruf (e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2017.

112 Dokumentasi Kepegawaian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, UIN Mataram. Diambil tanggal 30 Juli 2019.

113 Dokumentasi Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, UIN Mataram. Diambil tanggal 31 Juli 2019.

saat tersebut.<sup>114</sup> Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan target pengelola (dekan, wakil dekan, ketua program studi), mahasiswa dan alumni FEBI UIN Mataram serta *stakeholder* eksternal terkait sebagai responden (obyek penelitian). Peneliti dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, (teknik analisis yang memberikan gambaran tentang alur logika analisis data, sekaligus memberi masukan terhadap teknik analisis data kualitatif yang digunakan).<sup>115</sup> Selain itu, teknik analisis data kuantitatif (hasil angket) untuk mempertajam dan memperkaya analisis kualitatif itu sendiri.<sup>116</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

Secara harfiah kata *link* dapat diartikan sebagai suatu pertautan, keterkaitan, yaitu menyangkut proses yang harus interaktif, sedangkan kata *match* berarti suatu kecocokan, kesepadanan atau persesuaian, yaitu menyangkut hasil yang harus sesuai dan sepadan.<sup>117</sup> Konsep *link and match* dalam dunia pendidikan merupakan format konsep yang menawarkan keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, di mana konsep tersebut mengacu pada keterkaitan (*link*) dan kesesuaian (*match*) antara dunia pendidikan dan dunia usaha dan dunia industry (DUDI). Perspektif keterkaitan (*link*) menunjukkan suatu proses yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai

---

114 Cohen, Louis et al., *Research Methods in Education*, 5th ed., (USA: Routledge Falmer, 2005).

115 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

116 Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 83-84.

117 Dedi Supriadi, *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2002), hlm. 231.

dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun berkesesuaian (*match*) dengan kebutuhan dunia usaha, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi maupun dari segi waktunya.<sup>118</sup> Konsep *linkandmatch* ini pada dasarnya adalah *supplyanddemand* dalam arti luas antara dunia pendidikan sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan SDM bagi dengan dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

Penyebab minimnya angka penyerapan lulusan perguruan tinggi dalam dunia kerja saat ini masih menjadi perdebatan yang belum selesai yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam menyikapi kondisi tersebut, yakni:<sup>119</sup> a) *Pendekatan Kalangan Dunia Kerja*, yaitu lulusan perguruan tinggi tidak mampu bekerja sebagaimana yang diinginkan dunia kerja karena keahlian yang dimiliki masih jauh dari harapan. b) *Pendekatan Kalangan Perguruan Tinggi*, yaitu tujuan pendidikan tidak disiapkan hanya untuk siap kerja, tetapi jauh lebih luas yakni menyangkut pembentukan peserta didik menjadi manusia seutuhnya. Namun demikian, seyogyanya perbedaan dua pendekatan yang terjadi ini harus dikembangkan menjadi suatu pemahaman yang lebih komprehensif agar tidak terjadi saling mengklaim benarnya sendiri dengan dapat menarik benang merahnya.

Implementasi *link and match* dalam dunia pendidikan tinggi bukanlah hal sederhana untuk dijalankan. Idealnya, ada tiga komponen yang harus bergerak simultan untuk menyukseskan program *link and match*, yaitu perguruan tinggi, dunia kerja (perusahaan) dan pemerintah. MF. R. Senarath dan Patabendige menegaskan bahwa terjadinya

---

118 Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan...*, *Ibid*, hlm. 14.

119 M. Rosul Asmawi, *Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu di Perguruan Tinggi*, *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, (Banten: Universitas Islam Syekh Yusuf, 2005), hlm. 68.

*mis-match* yang mengakibatkan *mis-link* antara perguruan tinggi dengan dunia usaha yang paling utama adalah adanya permasalahan pada struktur pendidikan, kualitas dan materi sistem pendidikan yang secara tidak langsung memberikan pengaruh pada kegagalan universitas menyediakan alumni yang memiliki kemampuan (skil) yang dibutuhkan dunia kerja.<sup>120</sup> Sehingga, implementasi konsep tersebut pada pendidikan tinggi lebih diarahkan pada peningkatan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari segi jumlah, komposisi menurut keahlian, maupun mutu keahlian yang dimiliki. Pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang seimbang, baik dilihat dari kemampuan profesional maupun kemampuan akademik. Kemampuan akademik menekankan pada kemampuan penguasaan dan pengembangan ilmu, dan kemampuan profesional menekankan pada kemampuan dan keterampilan kerja.

Menurut Kellermann and Sagmeister, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas (mutu) lulusan dengan kapasitas reputasi yang tinggi (*highly reputable*) yang dapat memenuhi kriteria kebutuhan dunia kerja (*education-job match*), yaitu:<sup>121</sup> a) *Kualitas Penerimaan Mahasiswa (Quality of Admission)*, di mana Penerimaan mahasiswa perguruan tinggi sudah seharusnya dilakukan melalui penyaringan (*scening test*) yang ketat termasuk dengan membuka jalur penerimaan tersendiri (khusus), bukan dengan membuka jalur penerimaan yang “ala kadarnya” semata-mata karena

---

120 MF. R. Senarath & Patabendige, S.SJ., *Job Education Mismatch Among the Graduates: A Srilangka Perspective*, Ruhuna Journal of Management and Finance, 2014, Page, 2 dalam Eka Prihatin Disas, *Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan*, Jurnal Penelitian Pendidikan ISSN 1412-565 X, (Bandung: UPI, 2018), hlm., 232.

121 Kellermann, P and G Sagmeister, *Higher Education and Graduate Employment in Austria*, European Journal of Education Vol 35 No 2 June 2000, hlm. 18.

kekurangan mahasiswa. b) *Kualitas Dosen (Quality of Lecture)*, di mana dengan tersedianya tenaga pengajar (dosen) pada perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang kapabel dan berdedikasi tinggi akan berpengaruh besar pada kualitas output (lulusan) lembaga tersebut. Miskinnya kualitas pengajar/dosen baik secara teori dan praktis akan sangat memberikan efek yang kurang baik pada kualitas pembelajaran. c) *Kualitas Sistem Penilaian Hasil Pembelajaran (Quality of Assesment Teaching Result)*, di mana sistem penilaian atas hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi memiliki peranan yang besar dalam menentukan kualitasnya. d) *Kurikulum dan Kualitas Materi Bahan Ajar (Curriculum and Quality of Teaching Materials)*, di mana perguruan tinggi sudah seharusnya didukung oleh adanya kurikulum yang berbasis kompetensi pada dunia kerja. Kurikulum sudah seharusnya dikembangkan mengacu kepada standar kompetensi yang ditetapkan oleh industri/asosiasi profesi, dan memuat isi yang menunjang pencapaian kompetensi kebutuhan dunia kerja. Selain itu, adanya bahan ajar (teaching materials) yang memadai dan berkualitas memegang peranan penting. Kualitas bahan ajar yang bermutu ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran, meskipun memang sangat berkaitan erat dengan fasilitas dan tersedianya akses yang disediakan lembaga. e) *Kualitas Sarana-Prasarana (Quality of Facilities)*, di mana keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas dukungan sarana dan prasarana akademik. f) *Kemitraan-Kerjasama dengan DUDI*, di mana dalam memasuki era industrialisasi saat ini, sudah semestinya kerjasama di antara dunia usaha dengan perguruan tinggi tersebut lebih dioptimalkan. Jika tidak, maka kedua potensi tersebut akan tetap berjalan sendiri-sendiri, dan tidak membentuk sinergi yang positif dan produktif.

Rangkaian observasi, survei dan wawancara tentang kondisi *link and match* FEBI UIN Mataram dengan Sektor

IKNB Syariah di Kota Mataram yang meliputi tentang kondisi kualitas internal lembaga FEBI UIN Mataram, baik yang terkait erat dengan aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik mahasiswa, tenaga pengajar (dosen) maupun administrator pengelola manajemennya, selain dukungan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai serta kebijakan-kebijakan internal lembaga. Beberapa aspek ini dalam pandangan peneliti sangat mempengaruhi kualitas (mutu) lulusan dengan kapasitas reputasi yang tinggi (highly reputable) yang dapat memenuhi kriteria kebutuhan dunia kerja (education-job match).

#### 1. Kondisi Mahasiswa dan Alumni

Data terakhir pada Semester Genap tahun akademik 2017-2018, total jumlah mahasiswa FEBI UIN Mataram berjumlah 1.960 orang mahasiswa, di mana Program Studi Ekonomi Syariah jumlah mahasiswanya sebanyak 1.118 orang, Program Studi Perbankan Syariah sebanyak 646 orang dan Program Studi Pariwisata Syariah sebanyak 126 orang mahasiswa.<sup>122</sup> Pada tahun akademik 2019-2020 ini jumlah mahasiswa baru yang diterima sebanyak 320 orang mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa FEBI UIN Mataram ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor, yaitu: a) Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) secara *on-line*, b) Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) secara *on-line* dan nasional dan c) Ujian Mandiri (UM-UIN Mataram). Mahasiswa dinyatakan diterima di FEBI UIN Mataram setelah melalui proses tes tulis dan wawancara.

---

<sup>122</sup> Lihat data Tabel Jumlah Alumni FEBI UIN Mataram berdasarkan Jurusan. *Ibid*, hlm., 10.

**Tabel 1**  
Survey Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Poin 1	Sistem penerimaan mahasiswa baru berpengaruh pada kualitas mahasiswa/ mutu alumni?		
Jawaban	Ya	Tidak	Tidak tahu
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	26	2	2
Alumni	15	3	2
Eksternal	6	-	-
Jumlah	54	5	4
Total	63		
Poin 2	Seleksi penerimaan mahasiswa baru UIN Mataram termasuk sulit atau biasa saja?		
<b>Jawaban</b>	<b>Sulit</b>	<b>Biasa saja</b>	<b>Tidak tahu</b>
Mahasiswa	23	7	-
Alumni	9	11	-
Jumlah	32	18	-
Total	50		
Poin 3	Pertimbangan mahasiswa kuliah di FEBI UIN Mataram?		
Jawaban	Pilihan utama	Tidak diterima di universitas lain.	Lain-lain (biaya murah dll).
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Jumlah	50	-	-
<b>Total</b>	<b>50</b>		

2. Keadaan Sumber Daya Pengajar (Dosen)

FEBI UIN Mataram sejak berdiri pada akhir tahun 2017 memiliki 3 program studi, yaitu Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Pariwisata Syariah. Proses pengelolaan FEBI UIN Mataram didukung oleh tenaga fungsional dosen (baik ASN dan Non-ASN) yang berjumlah 31 orang dosen.

**Tabel 2**

Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan Dosen Tetap  
FEBI UIN Mataram

No	Jurusan	Pendidikan				Jabatan				Jml
		S1	S2	S3	Sdg S3	AA	L	LK	GB	
1	Ekonomi Syariah	-	11	1	2	1	11	3	-	14
2	Perbankan Syariah	-	10	1	2	5	7	1	-	13
3	Pariwisata Syariah	-	5	1	-	3	2	1	-	6
<b>Jumlah</b>		-	26	3	4	9	20	5	-	23

**Tabel 3**

Survey Kondisi Sumber Daya Dosen FEBI  
UIN Mataram Tahun 2019

<b>Poin 1</b>	Kualitas/mutu dosen berpengaruh pada mutu lulusan/ alumni pendidikan tinggi?		
Jawaban	Ya	Tidak	Tidak tahu
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	<b>63</b>		

Poin 2	Kualitas/ mutu dosen dipengaruhi oleh kombinasi kemampuan akademis (kelimuan) dan kemampuan profesional (aplikatif)?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah			
<b>Total</b>	<b>63</b>		
Poin 3	Kualitas/ mutu pembelajaran (perkuliahan) dipengaruhi oleh kualitas/ mutu dosen?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	<b>63</b>		
Poin 4	Pola rekrutmen dosen yang berkualitas akan dapat menentukan kualitas/ mutu seorang dosen?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	26	-	4
Alumni	17	-	3
Eksternal	6	-	-
Jumlah	56	-	7
<b>Total</b>	<b>63</b>		
Poin 5	Dosen FEBI UIN Mataram memiliki kualifikasi sebagai dosen yang berkualitas/ bermutu?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	16	11	3

Alumni	12	6	2
Jumlah	35	17	5
<b>Total</b>	<b>57</b>		
Poin 6	Dosen FEBI UIN Mataram ada yang berasal dari praktisi (misalnya akuntan, bankir dll)?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak/ Belum</b>	<b>Tidak tahu/Lupa</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	25	5	-
Alumni	18	-	2
Jumlah	50	5	2
<b>Total</b>	<b>57</b>		
Poin 7	Dosen dari praktisi (eksternal) lebih menguasai materi aplikatif dibandingkan dosen non praktisi (internal)?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	23	7	-
Alumni	11	9	-
Jumlah	41	16	-
<b>Total</b>	<b>57</b>		
Poin 8	Penilaian terhadap kinerja kualitas dosen dibutuhkan?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Total	57		

Poin 9	Lembaga FEBI UIN Mataram pernah melakukan kegiatan survey/penilaian terhadap kinerja kualitas dosen?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak/ Belum</b>	<b>Tidak tahu/Lupa</b>
FEBI	7	-	-
Mahasiswa	-	25	5
Alumni	-	18	2
Jumlah	-	43	7
<b>Total</b>	<b>57</b>		

### 3. Keadaan Kurikulum dan Bahan Ajar

FEBI UIN Mataram dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) integrasi interkoneksi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

**Tabel 4**

Survey Kondisi Kurikulum FEBI UIN Mataram Tahun 2019

Poin 1	Kurikulum yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas/mutu lulusan pendidikan tinggi?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	<b>63</b>		

Poin 2	Kurikulum FEBI sudah ideal mendukung kualitas/ mutu lulusan/alumni?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	4	-	-
Dosen	3	-	-
Mahasiswa	18	10	2
Alumni	10	5	5
Jumlah	35	15	7
<b>Total</b>	<b>57</b>		
Poin 3	Pengelola FEBI sudah pernah melakukan pengembangan kurikulum?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	4	-	-
Dosen	3	-	-
Jumlah	7	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>		
Poin 4	Pengembangan kurikulum FEBI tersebut melibatkan lembaga eksternal?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	-	4	-
Dosen	-	3	-
Eksternal	-	6	-
Jumlah	-	13	-
<b>Total</b>			
Poin 5	Pengelola FEBI pernah melakukan evaluasi terhadap penerapan kurikulumnya?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	-	4	-
Dosen	-	3	-
Jumlah	-	7	-
<b>Total</b>	<b>7</b>		

Dosen atau tenaga pengajar di FEBI UIN Mataram dalam menjalankan proses perkuliahan tentunya memiliki bahan ajar yang dijadikan panduan dan referensi dalam penyampaian materi di ruang kelas. Dan untuk mendukung hal tersebut, LPM memberikan kesempatan kepada para dosen untuk menyusun bahan ajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

**Tabel 5**

Survey Kondisi Bahan Ajar FEBI UIN Mataram Tahun 2019

Poin 1	Bahan ajar yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas/mutu pembelajaran?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	<b>63</b>		
Poin 2	Bahan ajar yang digunakan dosen FEBI UIN Mataram sudah memenuhi standar kualitas?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	4	-	-
Dosen	3	-	-
Mahasiswa	8	19	3
Alumni	4	15	1
Jumlah	19	34	4
<b>Total</b>	<b>57</b>		
Poin 3	FEBI pernah melakukan kegiatan pengembangan bahan ajar dosen?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>

FEBI	4	-	-
Dosen	3	-	-
Jumlah	7	-	-
<b>Total</b>	7		
Poin 4	Lembaga eksternal dilibatkan dalam pengelola FEBI UIN Mataram dalam pengembangan bahan ajar?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	4	-	-
Dosen	3	-	-
Eksternal	3	3	-
Jumlah	10	3	-
Total	13		
Poin 5	Pengelola FEBI UIN Mataram pernah melakukan evaluasi terhadap bahan ajar?		
Jawaban	Ya	Tidak	Tidak tahu
FEBI	4	-	-
Dosen	2	1	-
Jumlah	6	1	-
Total	7		

### 3. Keadaan Evaluasi Hasil Perkuliahan

Standar penilaian atau evaluasi hasil perkuliahan yang dilakukan pada FEBI UIN Mataram merujuk pada Pedoman Akademik UIN Mataram yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Mataram Nomor 1313 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Akademik 2018/2019.

**Tabel 6**

Survey Evaluasi Perkuliahan FEBI UIN Mataram Tahun 2019

Poin 1	Sistem penilaian hasil belajar mempengaruhi kualitas/ mutu lulusan perguruan tinggi?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	63		
Poin 2	Sistem penilaian hasil belajar FEBI UIN Mataram sudah ideal untuk mencetak lulusan yang bermutu?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	7	-	-
Mahasiswa	23	4	3
Alumni	16	2	2
Jumlah	6	6	5
<b>Total</b>	57		
Poin 3	FEBI pernah melakukan kegiatan evaluasi terhadap sistem penilaian hasil belajar?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI	4	-	-
Dosen	3	-	-
Jumlah	7	-	-
<b>Total</b>	7		

#### 4. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

Saat ini FEBI UIN Mataram untuk mendukung operasionalisasi pembelajaran (perkuliahan) bagi mahasiswa memiliki berbagai sarana dan prasaran antara lain Ruang Kelas Perkuliahan sebanyak 27 ruang, Laboratorium Komputer dan Perbankan, Unit Pengembangan Bahasa, Bisnis, Kewirausahaan dan Karir. Selain itu, saat ini UIN Mataram masih melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

**Tabel 7**  
Survey Kondisi Sarana-Prasarana FEBI UIN Mataram  
Tahun 2019

Poin 1	Sarana-prasarana yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas/mutu pembelajaran?		
Jawaban	Ya	Tidak	Tidak tahu
FEBI/Dosen	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	<b>63</b>		
Poin 2	Sarana-prasarana yang tersedia di FEBI UIN Mataram sudah memenuhi standar kualitas?		
Jawaban	Ya	Tidak/Belum	Tidak tahu
FEBI/Dosen	5	2	-
Mahasiswa	20	8	2
Alumni	16	2	2
Eksternal	-	6	-
Jumlah	41		
<b>Total</b>	<b>63</b>		

## 5. Keadaan Kemitraan

FEBI UIN Mataram sampai saat ini telah melakukan kerjasama (kemitraan) dengan beberapa lembaga, antara lain Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, beberapa lembaga perbankan baik yang konvensional maupun syariah ataupun lembaga keuangan non bank seperti BMT ataupun Lembaga Pembiayaan lainnya, selain juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Advokasi Hukum seperti LBH atau Kantor Advokat dan beberapa perkantoran pemerintah lainnya.

Bentuk kerjasama kemitraan ini adalah dengan menempatkan beberapa mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dengan rentang waktu sekitar 2 bulan. Selain itu, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pengelola FEBI UIN Mataram adalah meminta beberapa tenaga teknis bari lembaga-lembaga tersebut untuk dijadikan tenaga pengajar untuk mata kuliah-mata kuliah yang bersifat teknis aplikatif.

**Tabel 8**

Survey Kondisi Kemitraan FEBI UIN Mataram Tahun 2019

Poin 1	Kemitraan dengan lembaga eksternal berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan kualitas/mutu alumni?		
	Ya	Tidak	Tidak tahu
Jawaban			
FEBI/Dosen	7	-	-
Mahasiswa	30	-	-
Alumni	20	-	-
Eksternal	6	-	-
Jumlah	63	-	-
<b>Total</b>	<b>63</b>		

Poin 2	Lembaga eksternal pernah dilibatkan (kemitraan) untuk pengembangan FEBI UIN Mataram?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak/ Belum</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	7	-	
Eksternal	3	1	2
Jumlah	10	1	2
<b>Total</b>	<b>13</b>		
Poin 3	Hubungan kemitraan eksternal tersebut pernah dievaluasi?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak/ Belum</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	5	1	1
Jumlah	5	1	1
<b>Total</b>	<b>7</b>		
Poin 4	FEBI UIN Mataram pernah melakukan riset ke lembaga eksternal?		
<b>Jawaban</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak/ Belum</b>	<b>Tidak tahu</b>
FEBI/Dosen	7	-	-
Jumlah	7	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>		

#### 6. Strategi Pengembangan *Link and Match* Lembaga

Strategi pengembangan *link and match* di FEBI UIN Mataram secara garis besar dalam pandangan Dekan FEBI UIN Mataram, Dr. H. Ahmad Amir Azis, MA., sangat berkaitan erat dan harus selaras dengan kualitas internal lembaga FEBI UIN Mataram itu sendiri sebagaimana pernyataannya berikut:

“Strategi pengembangan *link and match* di UIN Mataram secara umum, harus didukung oleh adanya kualitas manajemen

SDM yang ada, baik sistem penerimaan calon mahasiswa, pola pembelajaran mahasiswa sendiri, kualitas dosen dalam proses perkuliahan, maupun sarana prasarana pendukung termasuk adanya kemitraan yang bagus dengan stakeholder eksternal”.<sup>123</sup>

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Muh. Salahudin, M.Ag., menambahkan sebagai berikut:

“Strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan *link and match* di UIN Mataram, termasuk FEBI UIN Mataram paling tidak pihak lembaga harus memiliki perhatian pada adanya perkembangan ekonomi bisnis, pemahaman tentang arah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, adanya komunikasi dan dialog dengan stakeholder maupun dengan melakukan *research treasury*. Adanya kegiatan *research* ini pada intinya sebagai langkah strategis untuk meningkatkan relevansi *link and match* alumni FEBI UIN Mataram dengan dunia usaha/ kerja secara khusus.”<sup>124</sup>

Analisis terhadap Kondisi *Link and Match* FEBI UIN Mataram dengan Sektor IKNB Syariah Mataram

#### 1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Sikap sebagian besar responden (86%) yang menggambarkan tentang pentingnya sistem penerimaan mahasiswa yang selektif dan berkualitas akan sangat berpengaruh pada pembentukan kualitas mahasiswa/ alumni secara rasional merupakan hal yang rasional. Logikanya, untuk dapat menghasilkan produk yang baik, maka bibit-bibit yang akan disemai untuk ditanamkan harus berasal dari pembibitan yang baik pula. Hal ini senada dengan pernyataan Muh. Nasir Jailani, SE (Manajer Utama) KSU BMT Al-Iqtishady dan Dr. Muh.

---

123 Wawancara dengan Dr. H. Ahmad Amir Azis, MA., Dekan FEBI UIN Mataram, pada tanggal 02 Agustus 2019 pukul 10.30 WITA.

124 Wawancara dengan Dr. Muh. Salehudin, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN Mataram, pada tanggal 02 Agustus 2019 pukul 09.30 WITA.

Salahudin, M.Ag., (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN Mataram) yang menegaskan bahwa sistem penerimaan mahasiswa yang lebih ketat akan berimbas pada jaminan kualitas mahasiswa/alumni, meskipun memang perlu ditunjang oleh adanya kebijakan lembaga untuk mempersyaratkan penentuan penerimaannya dengan adanya skill penguasaan teknologi informasi ataupun dari kemampuan penguasaan bahasa yang secara umum saat ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja.

## 2. Sumber Daya Pengajar (Dosen)

Data Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 31 orang dosen (baik ASN dan Non-ASN) yang mengajar di FEBI UIN Mataram. Jumlah ini jika dilihat dengan rasio perbandingan jumlah mahasiswa FEBI UIN Mataram yang berjumlah lebih dari 2000 mahasiswa, maka jumlah tersebut secara rasional memang belum memenuhi standar proporsional yang seharusnya untuk mengajar di 3 program studi yang ada. Jumlah ideal tersebut seharusnya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, khususnya pada huruf (C) tentang Perhitungan Rasio Dosen terhadap Mahasiswa, di mana untuk kategori yang sesuai dengan FEBI UIN Mataram adalah 1 (satu) : 45 (empat puluh lima). Selain itu, jika melihat data Tabel 2 sebelumnya, maka kondisi FEBI UIN Mataram belum memiliki dosen-dosen yang memiliki latar belakang (background) pendidikan (kelimuan) yang relevan dengan program studi yang diampu, maka kondisi ini

menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi lembaga FEBI UIN Mataram secara khusus untuk menindaklanjuti kondisi tersebut sebagaimana ketentuan seharusnya. Di mana, Satu program studi di sebuah perguruan tinggi minimum harus memiliki 6 (enam) orang dosen yang berlatar belakang keilmuan relevan dengan program studi yang diasuh, kecuali program studi yang diatur secara khusus.<sup>125</sup>

Sepakatnya seluruh responden (kuisisioner pertama) pada dasarnya menunjukkan tentang pentingnya ketersediaan tenaga pengajar (sebagai lakon utama dalam proses tranferisasi keilmuan/agent of transferred for knowledge) pada perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang kapabel dan berdedikasi tinggi akan berpengaruh besar pada kualitas out-put (lulusan) lembaga tersebut. Miskinnya kualitas pengajar/dosen baik secara teori dan praktis akan sangat memberikan efek yang kurang baik pada kualitas pembelajaran. Melalui tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan, sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa akan dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa sesuai dengan kajian bidang ilmu yang dipilihnya.<sup>126</sup>

3. Kondisi yang didasarkan pada data responden ini (62% berkualitas dan 38% tidak berkualitas) pada intinya membutuhkan tindak lanjut dari pihak lembaga untuk memberikan perhatian penuh guna peningkatan kualitas dosen yang ada. Karena tanpa ada upaya untuk

---

125 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

126 Elianti, *Pengaruh Kemampuan Mengajar...Ibid*, hlm., 39.

meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bisa jadi kurang efektif. Peningkatan kualitas dosen perlu dimulai dari sistem perekrutan, peningkatan kemampuan dosen (peningkatan jenjang pendidikan), sistem penilaian terhadap kemampuan dan kinerja dosen, serta sistem peningkatan karirnya.<sup>127</sup>

#### 4. Kurikulum dan Bahan Ajar

Meskipun kecil (26%) jumlah data yang menyatakan ketidak-idealan kurikulum FEBI UIN Mataram tersebut tidak lain berangkat dari apa yang dialami (pengalaman) yang diperoleh oleh mahasiswa, terutama alumni yang secara khusus sebagai penyumbang nilai terbanyak untuk data kuisioner terkait materi tersebut. Data ini harus disikapi dengan positif oleh lembaga FEBI UIN Mataram untuk dapat melakukan pembenahan terhadap kurikulum yang ada melalui kegiatan pengembangan sebagaimana pendapat Dekan FEBI UIN Mataram sesuai kondisi internal dan eksternal lembaga, di mana salah satunya dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi dengan tetap memperhatikan aspek tuntutan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan stakeholder lainnya.

Data kuisioner keempat pada data Tabel 6 yang menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan bahwa dalam kegiatan pengembangan kurikulum tersebut belum melibatkan pihak eksternal terkait dan data kuisioner yang kelima yang menegaskan bahwa seluruh responden menyatakan tidak pernah ada kegiatan terkait evaluasi terhadap kurikulum tersebut, maka kondisi ini tentunya merupakan kelemahan yang

---

127 Darwin Syamsulbahri, *Strategi., Ibid.,* hlm., 125.

harus segera dibenahi oleh lembaga FEBI UIN Mataram karena terjadinya *mismatch* dan *mislink* antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja/industri sebagian besar sebagai akibat dari terjadinya disparitas jenis dan mutu kompetensi kurikulum yang diimplementasikan perguruan tinggi yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja khususnya industri, hingga pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan cepat angkatan kerja berpendidikan tinggi melebihi pertumbuhan daya serap (kesempatan kerja). Sementara itu, terkait dengan data di atas yang menjelaskan sebagian besar (60%) responden menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan dosen FEBI UIN Mataram belum memenuhi standar kualitas harus disikapi dengan bijak dan tindak lanjut yang konkrit untuk evaluasi dan pengembangannya. Karena, adanya bahan ajar (teaching materials) yang memadai dan berkualitas memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, meskipun memang sangat berkaitan erat dengan fasilitas dan tersedianya akses yang disediakan lembaga. Modul/bahan ajar sudah seharusnya dikembangkan berdasarkan kurikulum dan standar kompetensi dengan melibatkan pihak eksternal terkait, serta mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti program sesuai dengan tingkat kecepatan yang dimilikinya. Berdasarkan data wawancara yang ada, langkah-langkah pengembangan bahan ajar yang pernah dilaksanakan oleh LPM, sudah seharusnya terus digalakkan secara kontinyu agar memiliki bobot dan kualitas yang sesuai dan up-to date agar proses pembelajaran dan transfer keilmuan pada proses perkuliahan berjalan optimal.

5. Melihat data tentang sebaran mata kuliah yang ada di FEBI UIN Mataram ada 3 Program Studi berdasarkan Tabel 4, dapat terlihat bahwa mata kuliah-mata kuliah

yang sifatnya aplikatif dan banyak menjadi bagian persyaratan yang harus menjadi penguasaan kemampuan bagi calon karyawan ternyata masih memiliki bobot SKS yang rendah, sebagai misal mata kuliah Teknologi Informasi (IT) maupun Komunikasi Organisasi masing-masing hanya berbobot 2 SKS. Kondisi ini harus menjadi perhatian penuh karena jenis atau varian mata kuliah yang bersifat aplikatif seharusnya dijadikan mata kuliah yang prioritas untuk diperbanyak dari aspek kuantitas SKS untuk memantapkan dasar mahasiswa ketika menghadapi dunia kerja.

#### 6. Evaluasi Hasil Perkuliahan

Terlepas dari kecilnya data jumlah responden (20%) pada Tabel 8 yang menyatakan masih belum/tidak idealnya sistem penilaian hasil belajar pada FEBI UIN Mataram tersebut, namun paling tidak dari aspek ini harus dapat disimpulkan bahwa harus diakui ada pihak stakeholder yang juga merasakan kondisi yang sebaliknya. Nilai positif yang harus dapat dipetik dari nilai kecil dari data ini adalah dibutuhkan adanya penyempurnaan pada tahapan ini karena sistem penilaian atas hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi memiliki peranan yang besar dalam menentukan kualitasnya.<sup>128</sup> Paling tidak, dengan adanya proses ini memberikan feedback positif bagi lembaga khususnya berupa informasi untuk mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang dilaksanakan lembaga sudah sesuai dengan harapan atau belum, selain hasil penilaian juga merupakan data yang dapat dimanfaatkan lembaga untuk merencanakan pengembangan lembaga pada masa yang akan datang dan untuk dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga.

---

128 Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm., 15.

## 7. Sarana dan Prasarana

Meskipun jumlahnya kecil, obyektifitas pernyataan responden (29%) yang menyatakan belum representatifnya ketersediaan sarana dan prasarana ini tentunya didasarkan pada pengalaman beberapa mahasiswa/alumni yang menekankan pada adanya ketidaknyamanan ruang perkuliahan. Maka, sudah seharusnya bagi pengelola untuk memberikan perhatian penuh dengan memberikan tindak lanjut atas ketidakpuasan stakeholder terkait tersebut dengan menyeegerakan melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana perkuliahan yang harus disesuaikan dengan regulasi yang mengaturnya.

## 8. Kemitraan dengan Lembaga Eksternal

9. Hasil survey berdasarkan data Tabel 10 menunjukkan hal yang sangat positif tentang adanya keterlibatan pihak lembaga eksternal yang menjalin kerjasama dengan FEBI UIN Mataram. Karena terkadang, aspek kerjasama ini sering dilupakan oleh lembaga perguruan tinggi, karena kadang terlalu angkuh dan percaya diri tanpa merasa membutuhkan bantuan pihak lain. Sinergitas ini menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilakukan karena perguruan tinggi akan mencetak lulusan yang membutuhkan pekerjaan, sedangkan perusahaan akan membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang siap bekerja. Hal ini disampaikan oleh Menristekdikti pada acara Academic Excellent Day 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Yogyakarta.<sup>129</sup> Adanya agenda FEBI UIN Mataram untuk melakukan riset dengan lembaga eksternal ini merupakan langkah positif dan harus terus digalakkan untuk meminimalisir kurangnya hubungan kerjasama

---

129 Lihat Menristekdikti Tegaskan, Ibid., Diakses tanggal 08 Juli 2019.

antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri. Berbagai pihak seperti perguruan tinggi, industri, dan pemerintah harus memiliki kesadaran, kepentingan, dan keinginan bersama untuk menata serta meningkatkan "link and match" tersebut dan jangan terkesan bersikap saling"menunggu",<sup>130</sup>

Dengan demikian, Peneliti dengan melihat beberapa data yang terkait dengan kondisi internal FEBI UIN Mataram sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kondisi kualitas internal FEBI UIN Mataram mendukung *link and match* kebutuhan dunia kerja, termasuk bagi pemenuhan kebutuhan IKNB Syariah di Kota Mataram.

### **1. Kurikulum FEBI UIN dan Kebutuhan Sektor IKNB Syariah**

Strategi pengembangan *link and match* di FEBI UIN Mataram sudah seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas internal lembaga FEBI UIN Mataram, baik yang terkait erat dengan aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik mahasiswa, tenaga pengajar (dosen) maupun administrator pengelola manajemennya, selain dukungan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai serta kebijakan-kebijakan internal lembaga. Karenanya, Peneliti untuk melakukan analisa tersebut tidak bisa terlepas dari hasil analisa terhadap kondisi eksternal lembaga FEBI UIN Mataram sebelumnya.

#### **1. Strategi Peningkatan Kualitas Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru**

Jika menilik data Tabel 1 kuisisioner kedua yang menunjukkan hasil sebanyak 82% responden yang berasal dari mahasiswa dan alumni menyatakan bahwa sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di FEBI UIN

---

130 Asep Afia Hidayat, *Kemitraan...., Ibid*, Diakses tanggal 08 Juli 2019.

Mataram sangat sulit dan dilakukan dengan sistem yang sangat ketat, maka kondisi ini sebenarnya menunjukkan gambaran bahwa sistem yang diterapkan UIN Mataram untuk melakukan seleksi penerimaan telah ideal untuk dapat menjaring calon-calon mahasiswa baru yang berkualitas. Namun, kualitas penerimaan mahasiswa baru ini sudah seharusnya didukung oleh adanya kebijakan internal lembaga yang mampu untuk menopang sistem yang ada dengan juga mempersyaratkan penentuan penerimaannya dengan adanya kemampuan (skill) penguasaan teknologi informasi ataupun dari kemampuan penguasaan bahasa yang secara umum saat ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja.

2. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengajar (Dosen). Data Tabel 2 yang mendeskripsikan secara jelas terjadi ketidak-seimbangan rasio perbandingan antara jumlah tenaga pengajar FEBI UIN Mataram dengan jumlah mahasiswa yang ada, maka kondisi ini secara tidak langsung akan berimbas pada kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Maka, strategi peningkatan *link and match* FEBI UIN Mataram untuk kebutuhan sektor IKNB Syariah di Kota Mataram yang seharusnya dilakukan adalah dengan menambah rekrutmen dosen sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi pada huruf (C).<sup>131</sup> Di mana, jika melihat jenis atau kategori

---

<sup>131</sup> Lihat Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.

dari program studi yang ada di FEBI UIN Mataram, maka seharusnya perbandingan yang ideal untuk 45 jumlah mahasiswa akan ditangani oleh 1 orang dosen. Lebih spesifik lagi jika regulasi tersebut yang dijadikan patokan utama, maka sudah seharusnya pada satu program studi di sebuah perguruan tinggi minimum harus memiliki 6 (enam) orang dosen yang berlatar belakang keilmuan relevan dengan program studi yang diasuh, kecuali program studi yang diatur secara khusus.

Dan jika melihat hasil kuisioner yang kelima pada Tabel 3 sebelumnya, maka terlihat hasil yang menunjukkan bahwa ternyata tidak semua (38%) responden menyatakan dosen FEBI UIN Mataram belum memiliki kualifikasi sebagai dosen yang berkualitas/bermutu. Kondisi ini tentunya harus segera ditinjaulanjuti sebagai bagian strategi peningkatan kualitas dosen yang dimiliki FEBI UIN Mataram. Karena tanpa ada upaya untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada sekarang, perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar mengajar akan timpang dan bisa jadi kurang efektif. Paling tidak, untuk memenuhi tuntutan perubahan guna meningkatkan kualitas tersebut, seorang dosen harus memenuhi 2 kualifikasi, yaitu *pertama* Seorang dosen harus memiliki kemampuan atau kapabilitas (*capability*) dan juga seorang dosen harus memiliki kesetiaan atau loyalitas (*loyalty*).<sup>132</sup>Selain itu, strategi peningkatan kualitas dosen tersebut dapat dimulai dengan menyempurnakan sistem perekrutan dengan lebih selektif dan berkualitas, karena ketersediaan tenaga pengajar (dosen) pada perguruan tinggi yang memiliki kualitas yang kapabel dan berdedikasi tinggi akan berpengaruh besar pada kualitas out-put (lulusan) lembaga tersebut. Miskinnya kualitas pengajar/dosen

---

132 D. Rosyada, Paradigma....*Ibid.*, hlm., 169.

baik secara teori dan praktis akan sangat memberikan efek yang kurang baik pada kualitas pembelajaran. Kondisi ini pada dasarnya sebagai imbas adanya pola rekrutmen tenaga pengajar/dosen yang tidak mempertimbangkan kualitas sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah strategi peningkatan kemampuan dosen dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para dosen untuk melanjutkan strata pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,<sup>133</sup> selain juga pentingnya melakukan penilaian (evaluasi) terhadap kualitas kinerja para dosen yang guna menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten untuk merealisasikan visi dan misi lembaga.<sup>134</sup>

### 3. Strategi Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Bahan Ajar

Meskipun jumlah responden yang menyatakan belum idealnya kurikulum FEBI UIN Mataram tersebut lebih kecil (26%) dari jumlah responden yang menyatakan telah ideal sebagaimana Tabel 6, kondisi ini harus disikapi dengan obyektif karena diperoleh dari apa yang dialami (pengalaman) yang diperoleh oleh mahasiswa, terutama alumni yang secara khusus sebagai penyumbang nilai terbanyak untuk data kuisioner terkait materi tersebut. Lembaga FEBI UIN Mataram sudah seharusnya melakukan pembenahan terhadap kurikulum yang ada melalui kegiatan pengembangannya dengan melakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi dan informasi dengan tetap memperhatikan aspek tuntutan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan stakeholder lainnya. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum ini harus melibatkan stakeholder langsung FEBI UIN

---

<sup>133</sup> Darwin Syamsulbahri, *Strategi*, *Ibid.*, hlm., 125.

<sup>134</sup> Lihat Pentingnya Evaluasi Kinerja Dosen. <https://sevima.com/pentingnya-evaluasi-kinerja-dosen/> Diakses tanggal 9 Juli 2019. .

Mataram seperti lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam penyusunan materi perkuliahan dan sebagainya. Apalagi, jika melihat data kuisioner yang keempat pada Tabel 6 diketahui bahwa lembaga FEBI UIN Mataram belum pernah melibatkan pihak eksternal dalam melakukan pengembangan kurikulum selain selama ini pihak lembaga juga belum pernah melaksanakan evaluasi terhadap implementasi kurikulumnya. Kondisi ini tentunya merupakan kelemahan yang harus segera dibenahi oleh lembaga FEBI UIN Mataram untuk meminimalisir terjadinya *mismatch* dan *mislink* antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja/industri yang sebagian besar sebagai akibat dari terjadinya disparitas jenis dan mutu kompetensi kurikulum yang diimplementasikan perguruan tinggi yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

#### 4. Strategi Peningkatan Kualitas Evaluasi Hasil Perkuliahan

Terlepas dari kecilnya data jumlah responden (80%) pada Tabel 8 yang menyatakan masih belum/tidak idealnya sistem penilaian hasil belajar pada FEBI UIN Mataram tersebut, namun paling tidak dari aspek ini harus dapat disimpulkan bahwa harus diakui atau tidak terdapat pihak stakeholder yang juga merasakan kondisi sebaliknya (tidak sempurnanya kegiatan evaluasi hasil perkuliahan) yang mana kondisi minus ini harus menjadi perhatian utama pengelola lembaga FEBI UIN Mataram dengan menjadikannya sebagai pemicu untuk melaksanakan penyempurnaan pada tahapan ini sebagai strategi peningkatan kualitas kegiatan evaluasi hasil perkuliahan yang harus dilaksanakan oleh FEBI UIN Mataram. Karena, dalam sistem penilaian atas hasil pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi ini memiliki peranan yang besar dalam menentukan kualitasnya out-

putnya, sehingga proses ini harus dilakukan secara yang sistematis, terencana dan berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan siswa.<sup>135</sup>

#### 5. Strategi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Jika menilik hasil penelitian yang secara khusus memberikan penilaian atas kondisi riil sarana dan prasarana perkuliahan yang dimiliki FEBI UIN Mataram, maka terlihat gambaran terdapat sebanyak 29% pada Tabel 9 responden menyatakan keberadaan sarana dan prasarana perkuliahan pada FEBI UIN Mataram belum representatif untuk menunjang mutu proses perkuliahan. Meskipun jumlah responden tersebut sedikit jumlahnya, namun sebagian besar responden yang menyatakan kondisi minus terkait ketersediaan sarana dan prasarana ini lebih dominan menekankan pada adanya ketidaknyamanan ruang perkuliahan yang digunakan para mahasiswa dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti kursi ataupun alat peraga penyampaian materi perkuliahan.

Menyikapi kondisi ini, meskipun menurut pengelola lembaga FEBI UIN Mataram tidak terlepas dari adanya ketersediaan alokasi anggaran yang merupakan ranah kebijakan utama lembaga UIN Mataram, namun paling tidak pihak FEBI UIN Mataram sudah seharusnya lebih proaktif dalam memberikan data dukung yang valid terkait kondisi sarana dan prasarana tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pengelola UIN Mataram sebagai pertimbangan prioritas dalam mengadakan sarana dan prasarana perkuliahan. Sehingga, strategi yang seharusnya ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FEBI UIN Mataram ini (terutama dengan adanya pembangunan yang saat ini sedang

---

135 Zainal Arifin, *Evaluasi...*, *Ibid.*, hlm., 15.

berjalan) harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

6. Strategi Peningkatan Kualitas Kemitraan dengan Lembaga Eksternal

Meskipun kondisi kemitraan berdasarkan Tabel 10 menunjukkan angka yang cukup besar jumlahnya (78%), namun oleh karena kualitas kemitraan yang ada belum maksimal memenuhi target untuk mewujudkan *link and match* FEBI UIN Mataram dengan dunia kerja, maka strategi yang dapat dilakukan oleh pengelola FEBI UIN adalah dengan lebih mengefektifkan kembali secara lebih intensif dan lebih konkrit berbagai bentuk kerjasama yang telah terjalin, khususnya yang menyangkut aspek penyusunan kurikulum termasuk magang, pemberdayaan dunia pendidikan tinggi (infrastruktur, SDM, dan riset). Bentuk konkrit kerjasama ini adalah strategi yang paling efektif untuk merealisasikan kondisi *link and match* antara FEBI UIN Mataram dengan dunia usaha. Kemitraan ini sudah seharusnya ditopang dengan pengkajian dan penataan terhadap adanya payung hukum yang jelas beserta peraturan pelaksanaan yang rinci tentang penanganan masalah “link and match” tersebut dan otoritas institusi yang tegas dan berdaya (kewenangan dan sumberdaya memadai) yang dapat menjamin/mewajibkan/memaksa kerjasama para pihak terkait diatas berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan, khususnya yang terkait dengan aspek kerjasama penempatan alumni pada lembaga yang terlibat pada kemitraan tersebut.<sup>136</sup> Paling tidak, konkrit kerjasama ini lebih mengedepankan pendekatan ketenagakerjaan

---

<sup>136</sup> Nani, Grace, ..., *Ibid.*, hlm. 15.

yang berupaya untuk dapat menciptakan peluang dapat diakomodirnya lulusan FEBI UIN Mataram di dunia usaha yang digandeng sebagai mitra.

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kondisi kondisi *link and match* FEBI UIN Mataram secara umum telah mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja pada sektor IKNB Syariah di kota Mataram.
2. Strategi-strategi yang diterapkan FEBI UIN Mataram untuk meningkatkan *link dan match* dengan kebutuhan dunia kerja pada sektor IKNB Syariah di kota Mataram antara lain adalah dengan memaksimalkan kualitas internal lembaga FEBI UIN Mataram, baik yang terkait erat dengan aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik mahasiswa, tenaga pengajar (dosen) maupun administrator pengelola manajemennya, selain dukungan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang memadai serta kebijakan-kebijakan internal lembaga.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bandung, Rineka Cipta, 2007.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Disas, Eka Prihatin, *Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan*, Jurnal Penelitian Pendidikan ISSN 1412-565 X, Bandung, UPI, 2018
- Djojonegoro, Wardiman, *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 1999
- Enoch, Jusuf, *Dasar-Dasar Perencanaan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Guba, Egon G, *The Paradigm Dialog*, California, Sage Publications, 1990
- Hamalik, Oemar, *Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*, Bandung, Mandar Maju, 1992
- Indar, Djumberansyah, *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya*, Surabaya, Karya Aditama, 1995
- Jubaedah, Yoyoh, Neni Rohaeni dan Tati, *Model Link And Match dengan Pendekatan Competency Based Training pada Pembelajaran Tata Graha di Sekolah Menengah Kejuruan*, Jurnal Penelitian Pendidikan, Jakarta, Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, 2007
- Kellermann, P and G Sagmeister, *Higher Education and Graduate Employment in Austria*, European Journal of Education Vol 35 No 2 June 2000
- Louis, Cohen, et.al., *Research Methods in Education*, 5th ed.,

- USA, Routledge Falmer, 2005
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Rosda Karya, 2001
- Nata, Abudin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta, Grasindo, 2001
- Putranto, Ivan, *Pengembangan Model Kerja Sama Link And Match Untuk Meningkatkan Kesiapan Kerja Bagi Lulusan SMK Kompetensi Keahlian Akuntansi di Kota Semarang*, Jurnal Mandiri Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi, Volume 1 No. 12 Juni 2017, Pamulang, Universitas Pamulang, 2017
- Rasyid, Saifuddin A, *Tracer Study Tentang Link And Match Alumni S1 Ilmu Perpustakaan Fah UIN Ar-Raniry dan Dunia Kerja di Wilayah Pantai Barat Selatan Aceh*, Jurnal LIBRIA, Vol. 10, No. 1, Juni 2018, Aceh, UIN Ar-Raniry Press, 2018
- Sa'ud, Udin Syaefudin, dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006
- Sadjad, Rhiza S., *Paradigma Baru Pendidikan Tinggi Untuk Menciptakan Sumber Daya Manusia Unggulan*, Makasar, Universitas Hasanudin, 2002
- Senarath, MF. R. & Patabendige, S.SJ., *Job Education Mismatch Among the Graduates: A Srilangka Perspective*, Ruhuna Journal of Management and Finance, 2014
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Soesilowati, Endang S., *Link and Match Dunia Pendidikan dan*

- Industri dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan Industri*, Jakarta, Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005
- ....., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2004.
- ....., *Statistik untuk Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2006
- Sumadhinata, Yelli Eka dan Pipin Sukandi, *Analisis Relevansi Kompetensi Lulusan terhadap Kebutuhan Kerja*, *Conference on Management and Behavioral Studies*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 27 Oktober 2016
- Suparno, Erman, *Kompetensi, Jabatan Penghubung Dunia Pendidikan dan Industri*, Jakarta, LPE, 2012
- Supriadi Dedi, *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2002
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rajawali, 1987
- Syamsulbahri, Darwin, *Strategi Peningkatan Link And Match Dunia Pendidikan Tinggi dan Industri*, Jakarta, Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009
- Teichler, U., *Research on The Relationship Between Higher Education and the World Of Work: Past Achievements, Problems and New Challenges*, *Higher Education Journal*, 1999, Vol 38
- Usman, Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset*

*Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006

Warsiti, dkk, *Laporan Studi Pelacakan Alumni (Tracer Study) Tahun 2015*, Yogyakarta, BPM. STIKES Aisyiyah Yogyakarta, 2015

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-792/MK/IV/12/1970 Tentang Lembaga Keuangan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Mataram

Badan Pusat Statistik, Indonesia dalam Angka 2018

Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Katalaog Kota Mataram Dalam Angka Tahun 2018

Dokumentasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, UIN Mataram